



# **PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2023 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

## **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **Ringkasan**

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

## **Bab I Pendahuluan**

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2023

## **Bab II Perkembangan Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD**

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2023.

## **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2023.

## **Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## **Bab VI Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan SAL**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

## **Bab VII Penjelasan Pos - Pos Neraca**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

## **Bab VIII Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

## **Bab IX Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

### **Bab X Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### **Bab XI Penjelasan Informasi Non Keuangan**

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2023 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.

### **Bab XII Penutup**

Memberikan informasi mengenai kesimpulan uraian secara ringkas Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

## **PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD**

### **2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO**

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun Tahun 2023 telah menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

#### **2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik ADHB/Atas Dasar Harga Berlaku maupun ADHK/Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,80. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana pada Tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52. Angka kenaikan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh upaya Pemerintah Kota Madiun dalam menciptakan ruang usaha di Kota Madiun yang kondusif sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan pendirian usaha, perlindungan usaha, pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM,

partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan serta optimalisasi fungsi lapak UMKM sebagai katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Rancangan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Madiun yang telah berhasil memberikan stimulus dalam upaya mengakselerasi perekonomian daerah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi lanjutan di tahun 2023, dengan mencatatkan angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun yang positif yang diproyeksikan pada angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80.

**Grafik 2.1.1.1**

**Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

\*) Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2019-2023 menunjukkan terjadi fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berada pada angka 5,69 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi

Kota Madiun mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar -3,39 hal itu disebabkan adanya wabah pandemi COVID 19. Selanjutnya pada Tahun 2021 telah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Jawa Timur maupun Nasional kenaikannya lebih dalam yaitu sebesar 4,73. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun melanjutkan trend pemulihan yang positif dimulai pada Tahun 2021 dengan angka pertumbuhan 4,73 Tahun 2022 dengan angka pertumbuhan 5,52 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,80. Hal ini terjadi karena adanya upaya Pemerintah Kota Madiun yang telah melakukan optimalisasi dalam pemulihan ekonomi dan mengantisipasi efek jangka panjang ekonomi dari pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi & daya beli masyarakat. Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun agar target tersebut tercapai :

- a. Percepatan Belanja Pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat teknis, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi kebijakan publik.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Perlambatan ekonomi regional.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.

- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2023 sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

## 2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun pada umumnya terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pola recovery telah dimulai pada tahun 2021 yang menunjukkan trend angka pertumbuhan pada zona positif yang disebabkan semakin pulihnya kondisi ekonomi regional . Pada Tahun 2021 hingga 2022 telah terjadi perbaikan data pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB tahun 2021 dan 2022 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2021 dan 2022 bergerak positif, serta Tahun 2023 diproyeksikan mampu tumbuh di atas rata - rata daerah yang lain.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan proyeksi 2023 dapat dilihat data di bawah ini.

**Tabel 2.1.2.1**  
**Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 sampai tahun 2023 (Milyar)**

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2019	14.107,3	10.623,8	5,69
2020	13.769,3	10.262,4	-3,39
2021	14.699,8	10.748,1	4,73
2022	15.018,7	11.273,7	5,52
2023*)	17.033,1	11.745,6	5,80

*Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024*

*\*) angka sementara*

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023. Nilai PDRB pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp14.107,3 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp10.623,8 milyar. Sedangkan pada Tahun 2020 baik berdasarkan harga konstan atau harga berlaku mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Dimana untuk PDRB atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp10.262,4 (Milyar) dan untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp13.769,3 (milyar). Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar Rp361,40 (Milyar), sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar Rp338,0 (Milyar). Sedangkan untuk Tahun 2021 seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp10.748,1 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp14.699,8 (Milyar) sedangkan Tahun 2022 nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.273,7 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp15.818,61 (Milyar). Pada Tahun 2023 ekonomi Kota Madiun semakin membaik maka diproyeksikan nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.764,40 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp17.256,23 (Milyar)

**Tabel 2.1.2.2**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s/d 2023 (Milyard)**

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106,81	120,59	108,7	110,35	121,77
2	Pertambangan dan Penggalian	3,05	2,95	2,91	2,71	2,65
3	Industri Pengolahan	2.290,02	1.780,97	1.985,25	2.099,37	2.340,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	11,48	11,72	12,89	13,75
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	29,04	30,4	32,65	34,76	36,82
6	Konstruksi	834,71	798,95	805,73	928,22	1005,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.657,66	3.311,32	3.712,41	4.216,70	4.608,99
8	Transportasi dan Pergudangan	498,89	477,53	516,72	643,89	780,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	705,63	661,55	716,4	900,81	811,41
10	Informasi dan Komuniasi	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2.632,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.432,48	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1.668,21
12	Real Estate	374,2	381,91	388,09	413,3	438,04
13	Jasa Perusahaan	98,17	97,71	100,68	108,69	117,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438,16	452,66	447,71	454,35	465,47
15	Jasa Pendidikan	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1.202,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,69	212,57	227,26	240,59	256,87
17	Jasa Lainnya	518,48	474,94	506,98	586,23	664,37
<b>PDRB</b>		<b>14.107,34</b>	<b>13.519,88</b>	<b>14.435,43</b>	<b>15.818,61</b>	<b>17.256,23</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

\*) angka sementara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun.

**Tabel 2.1.2.3**  
**Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2019 s/d 2023 (%)**

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,63	84,38	78,26	73,82	77,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,2	2,08	1,99	1,82	1,72
3	Industri Pengolahan	1.878,54	1.430,78	1.532,38	1.565,69	1.690,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,61	8,78	9,04	9,76	10,28
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,26	23,34	24,8	25,67	26,75
6	Konstruksi	647,2	616,69	611,17	661,51	693,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.514,39	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2.805,14
8	Transportasi dan Pergudangan	333	318,4	341,24	398,92	445,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	559,24	514,6	531,1	583,98	2286,79
10	Informasi dan Komuniasi	1.671,41	1.940,86	2.032,96	2.153,80	2.153,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	947,54	941,3	945,67	948,75	975,52
12	Real Estate	263,02	263,89	267,05	280,64	292,84
13	Jasa Perusahaan	77,36	74,9	75,48	79,45	84,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,38	315,18	312,05	310,7	312,28
15	Jasa Pendidikan	768,65	783,82	788,06	792,75	817,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,55	153,48	161,86	167,19	172,55
17	Jasa Lainnya	392,1	350,22	364,51	408,67	447,05
<b>PDRB</b>		<b>10.623,07</b>	<b>10.055,91</b>	<b>10.537,70</b>	<b>11.119,55</b>	<b>11.764,40</b>

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

\*) angka sementara

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2019 hingga 2023, mayoritas ditopang oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 57,08% pada Tahun 2019, sebesar 56,63% pada Tahun 2020 dan sebesar 58,01% pada Tahun 2021 serta sebesar 55,30% pada Tahun 2022 dan 56,52% pada Tahun 2023.

### **2.1.3. INFLASI**

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2023 tingkat Inflasi Kota Madiun masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2019 s/d 2023. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan daya beli penduduk Kota Madiun di atas kenaikan harga – harga yang terjadi dan kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Kondisi tersebut mengalami pembalikan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya angka deflasi yang mengindikasikan melemahnya tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Sementara pada tahun 2021 dan tahun 2022 mulai menunjukkan angka inflasi yang positif dalam range yang terkontrol yang menunjukkan *outlook* perbaikan tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Pada Tahun 2023 perkembangan tingkat inflasi Kota Madiun diproyeksikan di angka  $\beta \pm 1$ . Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

**Grafik 2.1.3.1**  
**Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2023

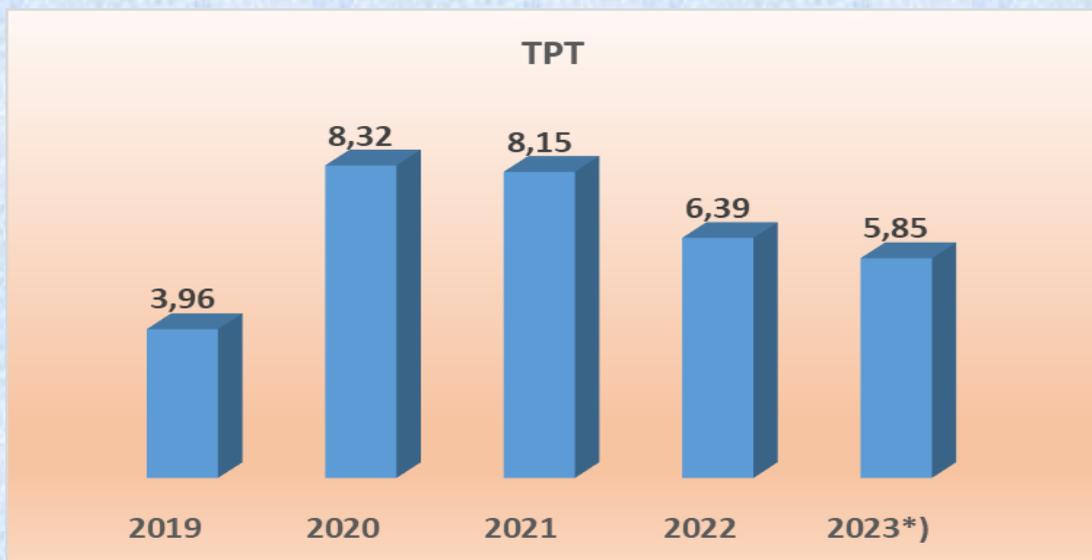
\*\*.) Angka Proyeksi

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 inflasi pada level sebesar 2,2 persen, di tahun 2020 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 1,86 dan di tahun 2020 angka inflasi sebesar 1,86 yang berarti inflasi di Kota Madiun cenderung berubah menuju deflasi akibat ketimpangan *supply - demand* antara pasokan produksi dan kebutuhan konsumen akibat adanya pandemi COVID-19. Angka Inflasi di tahun 2021 sesuai rilis \* data dari BPS pada mengalami kenaikan menjadi sebesar tetap 2,00 (akibat mulai adanya *recovery* ekonomi yang ditopang dengan pertumbuhan uang beredar dan kenaikan produksi akibat pulihnya kemampuan daya beli konsumen dengan mulai tumbuhnya geliat aktivitas ekonomi akibat terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan inflasi Kota Madiun selama 5 tahun terakhir sudah berangsur angsur terkendali.) Pada Tahun 2022 dan 2023 seluruh dunia mengalami krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi menjadi lebih besar dan banyak negara yang mengalami krisis, sehingga untuk Kota Madiun inflasi pada Tahun 2023 diproyeksi sekitar 3,5 persen.

## 2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Namun demikian, permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

**GRAFIK 2.1.4.1**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024  
\*) Angka Sementara

Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 3,96 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan cukup tajam menjadi 8,32 sebagai dampak adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya PHK dan pelaku usaha tidak bisa melaksanakan usahanya secara maksimal. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 8,15, karena kondisi ekonomi masih sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM sudah mulai sedikit bangkit karena

dukungan dari pemerintah, sedangkan pada Tahun 2022 TPT Kota Madiun sudah mengalami penurunan sebesar 6,39. Kondisi penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2023, dimana TPT Kota Madiun diproyeksikan sebesar 5,85.

## 2.1.5. KEMISKINAN

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat di bawah ini.

Grafik 2.1.5.1

### Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun tahun 2019 menunjukkan angka yang sangat rendah yang menunjukkan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah yang mempunyai efek jangka panjang. Pada Tahun 2022 Tingkat Kemiskinan berhasil diturunkan sejalan dengan dilaksanakannya program – program pengentasan kemiskinan dan stimulus ekonomi oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai bagian upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik sebagaimana melaksanakan apa yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dengan meluncurkan Program PEN. Kondisi tersebut masih berlanjut pada Tahun 2023, dimana Tingkat Kemiskinan diproyeksikan mengalami

penurunan lagi sejalan kondisi ekonomi yang stabil dan mengalami perbaikan berkelanjutan, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Madiun bisa berjalan dengan baik.

## 2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

**Tabel 2.1.6.1**  
**Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023**

Indeks	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
IPM	80,88	81,03	82,27	83,02	83,71
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,82	
Umur Harapan Hidup	72,75	72,81	72,83	73,13	75,40
Indeks Pengetahuan	0,77	0,85	0,78	0,79	
Harapan Lama Sekolah	14,39	14,4	14,40	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Indeks Pengeluaran	0,83	0,85	0,85	0,85	
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	16,040	16,010	16,095	16,503	17,115

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

\*) Angka Sementara

IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 diproyeksikan mencapai 83,71 atau naik sebesar 0,69 poin dibanding Tahun 2022 yang mencapai 83,02. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Umur Harapan Hidup Kota Madiun diproyeksikan juga mengalami kenaikan dari 73,13 menjadi 75,40 atau mengalami peningkatan sebesar 2,27 dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata

Lama Sekolah masing – masing mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan 0,15 dibandingkan tahun 2022. Sementara angka Pengeluaran per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 0,612 dibandingkan tahun 2022 yang mengindikasikan inflasi bergerak moderat terkendali yang menandakan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang cukup signifikan.

### 2.1.7. GINI RATIO (IPM)

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019-2023 tercatat secara rinci pada angka 0,350 pada tahun 2019, pada angka 0,390 pada tahun 2020, pada angka 0,345 pada tahun 2021, pada angka 0,398 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 tercapai pada angka 0,329, dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Mulai Tahun 2021 pergerakan sudah mulai melandai maka Gini Ratio Kota Madiun menunjukkan trend yang semakin menurun, yang menunjukkan ketimpangannya semakin berkurang.

**Grafik 2.1.7.1**  
**Perkembangan GINI RATIO Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023**



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

\*\*.) Angka Proyeksi

# LAPORAN SERAPAN INSENTIF FISKAL & DAU



Tabel Laporan TL.1  
RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH  
(DID TAHUN BERJALAN PRIORITAS NASIONAL) TAHUN ANGGARAN 2023  
KOTA MADIUN

KEG	SUB KEG	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI (Rp)	OUTPUT	%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.700.000.000	2800 Orang	4.896.000.000	720	73%
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bantuan Beasiswa Masyarakat Miskin)		4.714.031.000	780 Orang	811.015.500	971	17%
<b>TOTAL</b>		11.414.031.000		5.707.015.500		50%

**Tabel Laporan TL.2**  
**REALISASI PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL (IF KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - REGULER)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KOTA MADIUN**

JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTPUT	
			JUMLAH	SATUAN
<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>63.300.891.000</b>	<b>46.399.802.428</b>		
pengelolaan dan pengembangan sistem drainasi yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota (Pembangunan sistem drainase)	13.174.370.000	6.418.978.100	100	meter
pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah kab/kota (Normalisasi stasiun pompa banjir)	2.065.661.000	2.065.661.000	500	meter
pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah kab/kota (peningkatan stasiun pompa banjir)	2.100.000.000	1.997.000.000	2	
penyelenggaraan jalan kab/kota (panjang jalan yang dilakukan pelebaran dengan menambah lajur seperti bangunan pelengkap dan trotoar)	12.627.160.000	8.564.158.000	2	KM
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pembangunan Jalan)	1.842.780.000	1.634.847.000	1	KM
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pembangunan jembatan)	1.098.080.000	-	40	m2
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pemeliharaan berkala jalan seperti pengaspalan)	14.343.950.000	13,278,135,119	6	KM
penyelenggaraan jalan kab/kota (pemeliharaan rutin jalan seperti tambal sulam pengaspalan jalan rusak)	2.491.560.000	2.291.229.445	1500	m

penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota (penataan bangunan dan lingkungan untuk pembangunan saluran lingkungan di kelurahan)	13.557.330.000	10.149.793.764	15	kelurahan
---	----------------	----------------	----	-----------

**Tabel Laporan TL.3**  
**LAPORAN REALISASI DAU BIDANG KESEHATAN**  
**KOTA MADIUN**  
**2023**

Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keluaran		
Uraian Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan			Uraian	Jumlah	Satuan
(2)		(3)	(4)	(5)		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.072.593		Gaji		Orang/Bulan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.386.362.000		JKN		Dokumen
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan <b>UKP Kewenangan</b> Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	377.829.000		alat kesehatan/alat medik yang disediakan		Unit
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246629.080		Rehabilitasi Puskesmas		Unit

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.376.422.095		jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan lainnya		Dokumen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.126.922.860		jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi UKBM		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	659.406.000		jumlah PSC tersediaan		Unit
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350		jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		Orang
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	61.684.700		Jumlah dokumen pendengandalian dan pengaawasan		Dokumen

	(UMOT)					
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000		Jumlah dokumen pendenganda lian dan pengaawasan		Dokumen
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaa n Masyarakat	355.011.920		Jumlah dokumen		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	231.957200		Jumlah dokumen		Dokumen
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	143.404.500		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi		Unit

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	485.679.932		pengadaan obat dan vaksin yang disediakan		Paket
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	78.450.000		alat kesehatan yang terpelihara sesuai standar		Unit
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	310.623.200		ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	40.866.400		ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.834.000		bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.600.000		balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.130.000		usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.786.408		usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	69.678.100		usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.567.000		penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.788.000		penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000		orang menderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.894.750		orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	163.368.900		Jumlah orang terduga menderita HIV		Orang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	159.330.000		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.281.400		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.061.000		jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.204.200		jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	276.645.000		jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.124.800		jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kab/kota sehat		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.939.200		jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota		Unit

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	52.515.000		jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Oistribusi Sarana KIE Program KKBPK	20.576.200		jumlah unit sarana penyediaan dan <b>pendistribusi an KIE Program KKBPK</b>		Unit
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000		jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	14.323.912		jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Laporan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	15.245.500		Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		Laporan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	9.189.000		Jumlah laporan hasil pengendalian pendistribusi an alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB		Laporan

	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.100.439.900		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		Dokumen
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	306.987.900		jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Orang
<b>TOTAL</b>		21.545.448.000	-			

**Tabel Laporan TL.4**  
**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU BIDANG KESEHATAN**  
**KOTA MADIUN**  
**TAHAP I dan TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN		SISA PAGU	REALISASI KELUARAN		
	Keg	Sub Keg		Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)		Uraian	Juml	Sat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080	1.192.000	1.192.000	244.245.080	Rehabilitasi Puskesmas	1	Unit

2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	377.829.000	167.655.700	210.173.300	-	alat kesehatan/alat medik yang disediakan	140	Unit
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	143.404.500	-	115.316.000	28.088.500	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	100	Unit
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	485.679.932	406.152.228	79.527.704	-	pengadaan obat dan vaksin yang disediakan	4	Paket

5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kotora	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	78.450.000	36.197.725	42.252.275	-	alat kesehatan yang terpelihara sesuai standar	140	Unit
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	310.623.200	20.464.000	5.287.600	284.871.600	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1248	Orang
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotora	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	40.866.400	16.613.200	13.890.000	10.363.200	ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1166	Orang

8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.834.000	7.636.000	5.198.000	-	bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1147	Orang
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.600.000	-	-	166.600.000	balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.130.000	4.612.000	4.066.000	94.452.000	usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20608	Orang

11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.786.408	11.946.000	26.315.200	74.525.208	usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	73037	Orang
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	69.678.100	-	27.457.600	42.220.500	usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19484	Orang
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.567.000	-	4.174.000	9.393.000	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	24119	Orang

14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.788.000	-	-	28.788.000	penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000	13.972.000	22.020.800	28.742.200	orang menderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	273	Orang
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.894.750	-	24.396.000	28.498.750	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2043	Orang

17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	163.368.900	56.629.800	24.747.200	81.991.900	Jumlah orang terduga menderitanya HIV	4264	Orang
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.100.439.900	-	79.743.600	2.020.696.300	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Dokumen
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	159.330.000	81.999.000	920.000	76.411.000	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2	Dokumen

20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.281.400	-	26.436.000	65.845.400	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	Dokumen
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.061.000	19.787.000	55.533.400	39.740.600	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	3	Dokumen
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.204.200	12.000.000	20.317.200	25.887.000	jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	273	Orang

23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	276.645.000	28.565.000	42.809.700	205.270.300	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2	Dokumen
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan JamINAN Kesehatan Masyarakat	5.386.362.000	-	5.386.362.000	-	JKN	18	Dokumen
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.124.800	42.736.000	21.472.500	259.916.300	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kab/kota sehat	7	Dokumen

26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.376.422.095	303.060.472	670.414.788	1.402.946.835	jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan lainnya	6	Dokumen
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.939.200	-	-	22.939.200	jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota		Unit
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	659.406.000	271.267.200	69.522.000	318.616.800	jumlah PSC tersediaan	1	Unit

29	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350	74.602.850	123.757.500	-	jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	590	Orang
30	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61.684.700	20.370.600	10.965.200	30.348.900	Jumlah dokumen pendengendalian dan pengawasan	1	Dokumen

31	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000	6.149.800	14.289.600	14.081.600	Jumlah dokumen pendengendalian dan pengawasan	1	Dokumen
32	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	355.011.920	4.269.620	100.820.370	249.921.930	Jumlah dokumen	1	Dokumen

33	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.126.922.860	574.272.000	311.174.700	1.241.476.160	jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi UKBM	1	Dokumen
34	Pemetaan Perkiraan Pengan dalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengan dalian Lapangan dan Pelayanan KB	52.515.000	-	-	52.515.000	jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengan dalian lapangan dan pelayanan KB		Dokumen

35	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	231.957.200	73.681.600	88.601.600	69.674.000	Jumlah dokumen	1	Dokumen
36	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	20.576.200	-	-	20.576.200	jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program KKBPk		Unit

37	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000	-	25.000.000	-	jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBPk melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1	Dokumen
38	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	14.323.912	14.323.912	-	-	jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	40	Laporan

39	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBP	15.245.500	-	-	15.245.500	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBP		Laporan
40	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kotora	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.189.000	1.650.000	1.000.000	6.539.000	Jumlah laporan hasil pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	4	Laporan

41	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	306.987.900	141.755.700	159.833.500	5.398.700	jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	291	Orang
42	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.072.593	4.050.072.593	-	-	Gaji	339	Orang/Bulan
<b>TOTAL</b>			<b>21.545.448.000</b>	<b>6.463.634.000</b>	<b>7.814.987.337</b>	<b>7.266.826.663</b>			

**Tabel Laporan TL.5**  
**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KOTA MADIUN**

NO.	URAIAN		BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN				
	Kegiatan	Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	OUTPUT	
						VOLU ME	SATUAN
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Penerangan lingkungan pemukiman	232.699.481	150.670.731	82.028.750	2	Unit
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jalan pemukiman	3.619.500.585	1.230.535.374	2.388.965.211	25	Meter
3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya	99.251.000	62.350.000	36.901.000	3	Unit
4	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan pelatihan kerja	1.448.548.934	1.256.443.895	192.105.039	78	Pokmas/ Ormas
<b>TOTAL</b>			<b>5.400.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>		

## **2.1.8. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN**

Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Madiun selalu mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik, regional dan global, karena kondisi perekonomian domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Pada Tahun 2023 tantangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh inflasi harga pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim kemarau ekstrem *el nino* yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Februari 2024. Dengan menghadapi kondisi harga pangan yang melonjak terutama kenaikan harga beras di tingkat konsumen, Pemerintah Kota Madiun secara rutin telah mengadakan operasi pasar murah Bahan Pokok, terutama beras murah. Hal tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menopang daya beli masyarakat bawah terhadap kebutuhan harga bahan pokok. Selain tantangan di atas, kondisi Geopolitik & Geoekonomi juga sangat berpengaruh, dimana gejolak peperangan yang masih berlangsung di eropa dan timur tengah masih akan memberikan efek domino pada kondisi perekonomian global, dimana mengakibatkan penurunan konsumsi produk – produk dari Negara Asia termasuk Indonesia oleh Negara Eropa dan Timur Tengah. Hal itu akan berimplikasi pada pengurangan kapasitas produksi manufaktur dan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Efek domino dari rangkaian kondisi di atas Kota Madiun akan terimbas, terutama dari kondisi arus balik korban PHK yang mencoba untuk memulai usaha di Kota Madiun dalam jumlah yang relatif besar. Hal itu tercermin dari jumlah pedagang UMKM yang mengalami kenaikan yang cukup tajam.

Dengan melihat kondisi di atas Pemerintah Kota Madiun telah berupaya dengan memberikan stimulus ekonomi pada sektor menengah dan bawah dengan kebijakan – kebijakan Pro Rakyat sebagai upaya membantu berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga selalu memperhatikan faktor ekonomi yang bersifat internal dan eksternal, yaitu kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Sehingga Pemerintah Kota Madiun juga merasakan tidak terlepas dari dampak tersebut dimana dalam postur APBD selalu melakukan penyesuaian prioritas program untuk menghadapi kondisi tersebut. Penajaman program unggulan yang bersifat kerakyatan menjadi hal yang utama dalam upaya memberi jalan keluar atas beberapa tantangan di atas, sehingga Kota Madiun telah melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional provinsi Jawa Timur, maka capaian perekonomian Kota Madiun tahun 2022 dan prospek tahun 2023 dapat dilihat dalam indikator ekonomi di bawah ini.

**Tabel 2.1.8.1**  
**Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2022 – 2024**

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19	5,41	
PDRB ADHB (juta rupiah)	15.018,65	15.691,11	
PDRB ADHK (juta rupiah)	11.273,68	11.838,49	
PDRB per Kapita (juta rupiah)	77,65	80,43	
TPT (%)	7,47	6,15	
IPM	81,70	82,15	
Inflasi (%)	3±1	3±1	
Kemiskinan	4,92	4,77	
Indeks Gini	0,332	0,329	

*Sumber: KUA Tahun 2022*

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2022 mencapai 5,19 dan pada tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai 5,41 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan baru yaitu peperangan geopolitik dan cuaca ekstrem kemarau el nino yang berimbas pada inflasi & perlambatan ekonomi. Dengan level pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 7,47 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2023 terjadi *recovery* ekonomi yang ditopang dengan kelanjutan atas program pemerintah yang dapat menurunkan tingkat resiko inflasi dan perlambatan ekonomi, sehingga angka TPT di proyeksikan mengalami penurunan sampai angka 6,15 persen pada tahun 2023. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 tercapai sebesar 81,70 persen dan pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi sebesar 82,15. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,92 diperkirakan menjadi 4,77 pada Tahun 2023 seiring dengan berjalannya *recovery* ekonomi yang telah mulai berjalan sejak tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.

- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.
- k. Memberikan insentif fiskal kepada pengusaha kecil (UMKM) sebagai bantalan ekonomi dalam menghadapi fluktuasi harga pangan.

## **2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH**

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian terkini dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi fundamental ekonomi daerah sebagai dampak inflasi dan perlambatan ekonomi membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan d
4. daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kontra produktif;

5. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
6. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan pendapatan;
7. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang bersifat reward kepada daerah yang tentu saja dibuktikan dengan capaian keberhasilannya;
8. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
9. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
11. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

## 2.2.12. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah.

Grafik 2.2.1.2.1  
Trend Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif mulai terbitnya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 Tren Pendapatan tumbuh sebesar 8,63%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,17%. Pada Tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah sebesar 1.100,67 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,87%. Pada tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 1.060,71 atau sebesar minus 3,63, karena adanya pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan kompensasi pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh TNI/Polri yang dibiayai APBN. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1.117,60 atau sebesar 5,36 %.

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

**Tabel 2.2.1.2.1**  
**Peta Potensi Pajak Daerah**

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>90.291.466.033,07</b>	<b>87.874.777.059,32</b>	<b>106.165.312.122,76</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>102.506.770.000,00</b>
Pajak Hotel	4.372.533.671,20	4.651.995.032,00	7.026.280.556,00	8.130.855.159,00	6.900.000.000,00
Pajak Restoran	11.403.756.266,81	12.191.757.300,09	19.278.495.104,00	23.343.654.772,00	18.000.000.000,00
Pajak Hiburan	836.732.808,00	416.770.721,00	1.638.210.592,00	1.845.737.251,00	1.375.000.000,00
Pajak Reklame	1.928.783.033,00	2.079.605.858,00	2.114.017.568,00	2.304.955.619,00	1.922.220.000,00
Pajak Penerangan Jalan	20.664.839.579,46	20.011.884.363,64	22.103.164.301,44	23.482.333.529,83	21.936.250.000,00
Pajak Parkir	808.361.637,00	664.001.863,00	1.434.441.434,55	1.683.862.056,00	1.350.000.000,00
Pajak Air Tanah	329.465.566,00	324.737.466,40	292.100.851,30	318.395.998,84	280.000.000,00
BPHTB	27.567.526.535,00	24.684.757.509,19	27.704.042.227,47	28.519.672.350,00	26.633.600.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	22.379.466.936,00	22.849.266.946,00	24.574.559.488,00	23.884.649.634,00	24.109.700.000,00

**Tabel 2.2.1.2.2**  
**Peta Potensi Retribusi Daerah**

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>15.619.539.719,00</b>	<b>17.501.688.195,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>18.012.701.000,00</b>
Retribusi Jasa Umum	6.004.754.409,50	3.456.867.597,00	4.255.304.240,00	3.795.130.578,00	3.718.317.400,00
Retribusi Jasa Usaha	8.786.735.909,50	13.366.161.598,00	16.102.531.597,00	17.565.540.621,00	13.543.303.600,00
Retribusi Perijinan Tertentu	828.049.400,00	678.659.000,00	1.027.513.000,00	1.190.401.354,00	751.080.000,00

**Tabel 2.2.1.2.3**  
**Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
<b>HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN</b>	<b>15.216.268.562,40</b>	<b>16.199.882.796,95</b>	<b>15.595.752.355,97</b>	<b>14.983.008.032,73</b>	<b>16.029.310.600,00</b>
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.754.363.181,00	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	16.029.310.600,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.461.905.381,40	0,00	15.595.752.355,97	0,00	0,00

**Tabel 2.2.1.2.4**  
**Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah**

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>127.817.130.173,12</b>	<b>144.339.306.884,51</b>	<b>121.065.816.201,82</b>	<b>104.506.296.452,22</b>	<b>117.592.932.800,00</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	37.410.000,00	0,00	512.718.642,00	481.891.662,00	32.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.355.620.963,85	84.667.299,92	89.080.155,53	599.729.647,13	80.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	9.026.027.396,74	9.099.624.602,86	6.961.975.880,18	2.880.498.521,96	4.500.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	34.209.856,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	3.782.676,00	70.676.998,78	56.062.722,01	172.086.543,39	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	159.920.658,00	624.387.027,00	629.196.758,00	142.852.500,00
Pendapatan Dari Pengembalian	00,00	168.330.911,73	2.715.956.140,09	1.187.998.977,67	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.315,83	0,00	98.561.827,86	75.333.024,01	0,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	21.387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	1.324.459.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	115.885.942.419,43	133.834.775.856,60	110.007.073.807,15	98.357.722.618,06	112.709.790.000,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.

**Grafik 2.2.1.2.2**  
**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2023**

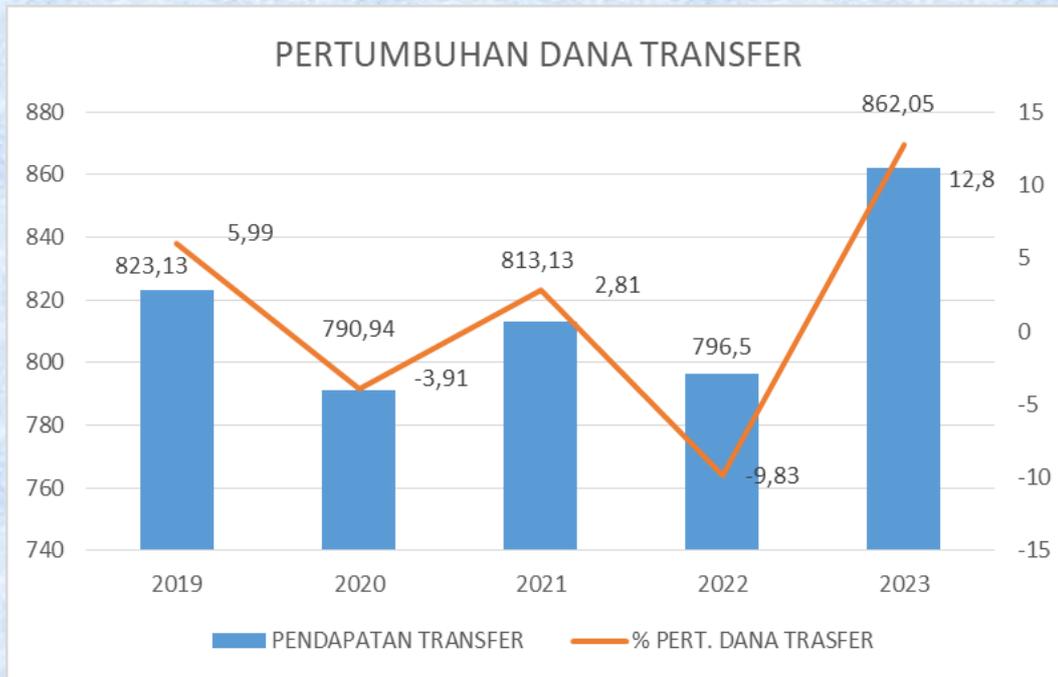


Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

## 2. Dana Perimbangan

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah ini, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.

Grafik 2.2.1.2.3  
Persentase Pertumbuhan Dana Transfer Tahun 2019 – 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dana transfer terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, DBH-CHT, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi.

## 2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### 2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja

yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah di atas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luarbiasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.3. TARGET KINERJA APBD**

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 pada setiap urusan pemerintahan.

### **2.3.1. URUSAN WAJIB**

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

#### **a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan
17. Urusan Kearsipan

### **2.3.2. URUSAN PILIHAN**

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

### **2.3.3 URUSAN PENUNJANG**

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Kecamatan

### 2.3.4. TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

#### Pengungkapan Perubahan Anggaran:

Selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan sekali perubahan penjabaran APBD terkait mandatory spending yang harus dianggarkan. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.4.1**  
**Tabel Perubahan Anggaran**

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 16 Tahun 2023 Tanggal 17 April 2023 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
<b>Pendapatan:</b>	<b>1.071.012.267.175</b>	<b>1.092.446.885.377</b>	<b>1.088.817.109.508</b>
PAD	255.138.115.765	265.644.885.765	261.815.342.908
Dana Transfer	815.874.151.410	826.801.999.612	827.001.766.600
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0
<b>Belanja</b>	<b>1.263.012.267.175</b>	<b>1.283.690.557.824</b>	<b>1.280.060.781.955</b>
Belanja Pegawai	490.371.338.423	490.393.338.423	468.936.215.253
Belanja Barang dan Jasa	463.979.666.642	488.606.957.526	513.171.846.360
Belanja Modal	244.661.755.441	247.744.683.137	222.872.275.205
Belanja Hibah	15.725.267.295	26.325.267.295	38.190.636.759
Belanja Bansos	26.482.927.100	26.482.927.100	32.772.802.700
Belanja Subsidi	99.146.000	99.146.000	99.146.000
Belanja Tak Terduga	21.692.166.273	4.038.238.343	4.017.860.642
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>192.000.000.000</b>	<b>191.243.672.447</b>	<b>191.243.672.447</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sebelum Penetapan APBD-Perubahan Tahun 2023, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Perubahan Penjabaran APBD sebanyak satu kali, yaitu :

Perkada Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 17 April 2023

Alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah bahwa dengan terbitnya :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/Sj tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2023.

Sehingga harus melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Kenaikan Target Pendapatan

Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi kenaikan walaupun relatif kecil, merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan pendapatan secara total adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, karena di sisi yang lain pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.

b. Kenaikan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi kenaikan juga selain disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya optimalisasi belanja yang lebih optimal optimal.

c. Penurunan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi pengurangan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2023 SiLPA yang dipergunakan sebagai acuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka dilakukan penyesuaian.

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2023 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

### **3.1. URUSAN WAJIB**

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

#### **1. Urusan Pendidikan**

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pendidikan dari anggaran sebesar Rp305.108.012.078,00 dan terealisasi sebesar Rp283.017.127.138,51. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pendidikan ini sebesar 92.76 % dari total pagu belanja pada APBD.

Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Urusan Wajib Bidang Pendidikan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	184.684.189.527,00	172.195.902.384,81
program pengelolaan pendidikan	114.007.283.435,00	104.946.970.140,50
program pengembangan kurikulum	4.807.339.116,00	4.282.839.413,20
program pendidik dan tenaga kependidikan	1.609.200.000,00	1.591.415.200,00
<b>Total</b>	<b>305.108.012.078,00</b>	<b>283.017.127.138,51</b>

## 2. Urusan Kesehatan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp262.237.846.290,00 dan terealisasi sebesar Rp252.898.531.901,24 Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang Kesehatan ini sebesar 96.44 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Urusan Wajib Bidang Kesehatan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	157.099.246.924,00	152.239.755.421,00
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100.956.564.930,00	96.697.529.640,24
program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	893.645.000,00	749.215.874,0
program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	91.395.000,00	86.676.500,00
program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.196.994.436,00	3.125.354.466,00
<b>Total</b>	<b>262.237.846.290,00</b>	<b>252.898.531.901,24</b>

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp132.150.748.174,00 dan terealisasi sebesar Rp127.717.127.540,67 Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini sebesar 96.65 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.182.802.674,00	11.037.463.120,00
program pengelolaan sumber daya air (sda)	7.157.271.500,00	7.010.488.116,00
program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	16.872.319.750,00	16.367.960.473,67
program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	21.269.000,00	20.095.000,00
program penataan bangunan gedung	46.838.268.400,00	45.720.190.655,00
program penataan bangunan dan lingkungannya	12.877.487.200,00	12.318.273.218,00
program penyelenggaraan jalan	34.139.050.650,00	33.622.922.546,00
program pengembangan jasa konstruksi	986.419.000,00	699.751.992,00
program penyelenggaraan penataan ruang	1.075.860.000,00	919.981.420,00
<b>Total</b>	<b>132.150.748.174,00</b>	<b>127.717.127.540,67</b>

### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp42.207.303.705,00 dan terealisasi sebesar Rp40.611.823.081.081,33. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini sebesar

96.22 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.4**

**Urusan Wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.285.243.705,00	9.364.651.236,00
program pengembangan perumahan	2.477.810.500,00	2.384.725.563,00
program kawasan permukiman	6.051.801.600,00	5.955.079.435,00
program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	23.392.447.900,00	22.907.366.847,33
<b>Total</b>	<b>42.207.303.705,00</b>	<b>40.611.823.081,33</b>

**5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp29.271.228.805,00 dan terealisasi sebesar Rp25.256.353.227,57. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang ketentraman dan ketertiban umum ini sebesar 86.28 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.5**

**Urusan Wajib Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.115.062.494,00	15.091.170.869,57
program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	11.032.938.311,00	9.089.711.388,00
program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.123.228.000,00	1.075.470.970,00
<b>Total</b>	<b>29.271.228.805,00</b>	<b>25.256.353.227,57</b>

## 6. Urusan Sosial

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Sosial dari anggaran sebesar Rp28.563.359.197,00 dan terealisasi sebesar Rp26.683.738.259,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang sosial ini sebesar 93.42 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.6**  
**Urusan Wajib Bidang Sosial**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.748.477.718,00	7.978.441.042,00
program pemberdayaan sosial	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00
program rehabilitasi sosial	2.981.665.743,00	2.759.004.510,00
program perlindungan dan jaminan sosial	12.167.195.900,00	11.598.123.900,00
program penanganan bencana	656.991.300,00	557.893.500,00
program pengelolaan taman makam pahlawan	182.250.086,00	168.359.248,00
<b>Total</b>	<b>28.563.359.197,00</b>	<b>26.683.738.259,00</b>

## 7. Urusan Tenaga Kerja

Belanja Urusan Wajib untuk bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp11.278.758.543,00 dan terealisasi sebesar Rp10.052.122.765,69. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 89.12 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.7**  
**Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.836.774.846,00	6.400.101.827,00
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.093.811.800,00	1.845.107.133,00
program penempatan tenaga kerja	170.900.000,00	167.363.350,00
<b>Total</b>	<b>11.278.758.543,00</b>	<b>10.052.122.765,69</b>

## 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp2.057.950.700,00 dan terealisasi sebesar Rp1.984.916.528,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 96.45 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.8**

### Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.090.047.400,00	1.052.738.714,00
Program perlindungan perempuan	240.370.350,00	238.647.650,00
Program peningkatan kualitas keluarga	271.270.300,00	253.631.300,00
Program pengelolaan system data gender dan anak	108.891.900,00	102.384.500,00
Program pemenuhan hak anak	264.553.110,00	259.447.124,00
Program perlindungan khusus anak	82.817.640,00	78.067.240,00
<b>Total</b>	<b>2.057.950.700,00</b>	<b>1.984.916.528,00</b>

## 9. Urusan Pangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp7.451.412.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.471.641.616,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pangan ini sebesar 86.85 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.9**

### Urusan Wajib Bidang Pangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.837.267.500,00	5.864.616.791,00
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	503.271.500,00	499.880.150,00
program penanganan kerawanan pangan	32.480.000,00	32.473.700,00
<b>Total</b>	<b>7.451.412.500,00</b>	<b>6.471.641.616,00</b>

## 10. Urusan Pertanahan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp314.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp260.951.885,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 82.95 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.10**  
**Urusan Wajib Bidang Pertanahan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program pengelolaan izin lokasi	15.000.000,00	10.347.750,00
program penyelesaian sengketa tanah garapan	36.200.000,00	32.249.185,00
program penatagunaan tanah	263.400.000,00	218.354.950,00
<b>Total</b>	<b>314.600.000,00</b>	<b>260.951.885,00</b>

## 11. Urusan Lingkungan Hidup

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp26.805.066.066,00 dan terealisasi sebesar Rp25.378.637.614,30. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 94.68 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.11**  
**Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.941.018.760,00	17.230.152.988,45
program perencanaan lingkungan hidup	299.284.000,00	283.494.300,00
program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.110.568.770,00	1.106.894.600,00
program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	76.700.000,00	76.530.000,00
program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	51.985.000,00	45.855.000,00
program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	323.629.200,00	319.872.000,00
program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	672.265.000,00	618.230.100,00
program penanganan pengaduan lingkungan hidup	145.000.000,00	143.579.000,00
program pengelolaan persampahan	6.184.615.336,00	5.554.028.825,85
<b>Total</b>	<b>26.805.066.066,00</b>	<b>25.378.637.614,30</b>

## 12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari anggaran sebesar Rp6.884.144.194,00 dan terealisasi sebesar Rp6.756.225.074,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.14 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.12**

### Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.309.474.457,00	6.186.308.279,00
program pendaftaran penduduk	187.143.864,00	187.002.585,00
program pencatatan sipil	172.282.982,00	169.333.600,00
program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	215.242.891,00	213.580.610,00
<b>Total</b>	<b>6.884.144.194,00</b>	<b>6.756.225.074,00</b>

## 13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp5.167.292.100,00 dan terealisasi sebesar Rp4.337.343.723,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 83.94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.13**

### Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengendalian penduduk	704.621.300,00	701.551.430,00
program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.674.264.000,00	2.226.608.033,00
program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00
<b>Total</b>	<b>5.167.292.100,00</b>	<b>4.337.343.723,00</b>

## 14. Urusan Perhubungan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perhubungan dari anggaran sebesar Rp18.304.063.966,00 dan terealisasi sebesar Rp17.926.570.593,21. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang

pertanahan ini sebesar 97.94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.14**

**Urusan Wajib Bidang Perhubungan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.564.529.014,00	10.337.697.857,21
program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	7.739.534.952,00	7.588.872.736,00
<b>Total</b>	<b>18.304.063.966,00</b>	<b>17.926.570.593,21</b>

**15. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp31.043.126.258,00 dan terealisasi sebesar Rp30.485.190.632,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.20 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.15**

**Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.371.300.337,00	6.888.069.588,00
program informasi dan komunikasi publik	4.005.319.361,00	3.976.856.378,00
program pengelolaan aplikasi informatika	19.666.506.560,00	19.620.264.366,00
<b>Total</b>	<b>31.043.126.258,00</b>	<b>30.485.190.632,00</b>

## 16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp843.889.506,00 dan terealisasi sebesar Rp809.654.225,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95.94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.16**

### Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	460.790.000,00	456.964.000,00
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	180.804.100,00	151.363.900,00
Program pengembangan UMKM	202.295.406,00	201.326.325,00
<b>Total</b>	<b>843.889.506,00</b>	<b>809.654.225,00</b>

## 17. Urusan Penanaman Modal

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp7.303.552.247,00 dan terealisasi sebesar Rp6.981.191.473,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95.59 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.17**

### Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.500.905.047,00	5.252.974.369,00
program pengembangan iklim penanaman modal	34.700.000,00	30.371.000,00
program promosi penanaman modal	308.848.200,00	294.344.205,00
program pelayanan penanaman modal	798.175.500,00	780.764.791,00
program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	462.675.000,00	434.873.708,00
program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	198.248.500,00	187.863.400,00
<b>Total</b>	<b>7.303.552.247,00</b>	<b>6.981.191.473,00</b>

## 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kepemudaan dan Olah Raga dari anggaran sebesar Rp7.968.389.861,00 dan terealisasi sebesar Rp7.867.451.678,90. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.73 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.18**

### Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	475.000.000,00	469.713.928,00
program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7.493.389.861,00	7.397.737.750,90
<b>Total</b>	<b>7.968.389.861,00</b>	<b>7.867.451.678,90</b>

## 19. Urusan Statistik

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp123.426.700,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.74 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.19**

### Urusan Wajib Bidang Statistik

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan statistik sektoral	125.000.000,00	123.426.700,00
<b>Total</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>123.426.700,00</b>

## 20. Urusan Persandian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp292.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp284.892.875,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.28 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.20**

### Urusan Wajib Bidang Persandian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	292.872.000,00	284.892.875,00
<b>Total</b>	<b>292.872.000,00</b>	<b>284.892.875,00</b>

## 21. Urusan Kebudayaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp8.900.774.689,00 dan terealisasi sebesar Rp8.703.816.884,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.78 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.21**

### Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.908.074.689,00	6.718.551.234,00
program pengembangan kebudayaan	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00
program pengembangan kesenian tradisional	50.000.000,00	49.883.250,00
program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50.000.000,00	49.842.900,00
<b>Total</b>	<b>8.900.774.689,00</b>	<b>8.703.816.884,00</b>

## 22. Urusan Perpustakaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp6.241.451.423,00 dan terealisasi sebesar Rp5.778.506.417,40. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.58 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.22**

### Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.097.514.767,00	4.686.876.773,00
program pembinaan perpustakaan	1.015.899.000,00	988.000.144,40
program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	128.037.656,00	103.629.500,00
<b>Total</b>	<b>6.241.451.423,00</b>	<b>5.778.506.417,40</b>

## 23. Urusan Kearsipan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp868.470.773,00 dan terealisasi sebesar Rp846.863.907,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini

sebesar 97.51 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.1.23**

**Urusan Wajib Bidang Kearsipan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program pengelolaan arsip	705.708.673,00	688.097.607,00
program perlindungan dan penyelamatan arsip	162.762.100,00	158.766.300,00
<b>Total</b>	<b>868.470.773,00</b>	<b>846.863.907,00</b>

## **3.2. URUSAN PILIHAN**

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp404.505.000,00 dan terealisasi sebesar Rp401.398.026,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanian ini sebesar 99.23 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**

**Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program pengelolaan perikanan budidaya	186.241.000,00	184.615.317,00
program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	34.510.000,00	34.353.600,00
program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	183.754.000,00	182.429.109,00
<b>Total</b>	<b>404.505.000,00</b>	<b>401.398.026,00</b>

## 2. Urusan Pariwisata

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp1.856.446.866,00 dan terealisasi sebesar Rp1.852.993.139,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 99.81 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Urusan Pilihan Bidang Pariwisata**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	437.660.866,00	436.897.915,00
program pemasaran pariwisata	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00
program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	278.000.000,00	277.650.600,00
<b>Total</b>	<b>1.856.446.866,00</b>	<b>1.852.993.139,00</b>

## 3. Urusan Pertanian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp5.334.742.300,00 dan terealisasi sebesar Rp4.913.122.573,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.10 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.2.3**  
**Urusan Pilihan Bidang Pertanian**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.269.957.000,00	2.151.431.701,00
program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	439.684.000,00	419.957.100,00
program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	337.591.000,00	310.429.397,00
program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	167.855.000,00	155.018.250,00
program perizinan usaha pertanian	33.600.000,00	25.025.150,00
program penyuluhan pertanian	2.086.055.300,00	1.851.260.975,00
<b>Total</b>	<b>5.334.742.300,00</b>	<b>4.913.122.573,00</b>

#### 4. Urusan Perdagangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp16.352.788.030,00 dan terealisasi sebesar Rp15.151.606.033,00 . Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.65 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.2.4**

##### **Urusan Pilihan Bidang Perdagangan**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.916.553.086,00	9.832.574.993,00
program perizinan dan pendaftaran perusahaan	267.374.400,00	267.325.700,00
program peningkatan sarana distribusi perdagangan	4.373.887.270,00	4.266.057.440,00
program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	250.257.000,00	249.511.500,00
program standardisasi dan perlindungan konsumen	235.684.724,00	230.943.400,00
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	309.031.550,00	305.193.000,00
<b>Total</b>	<b>16.352.788.030,00</b>	<b>15.151.606.033,00</b>

#### 5. Urusan Perindustrian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp2.465.313.388,00 dan terealisasi sebesar Rp658.398.930,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 49.49 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

**Tabel 3.2.5**

##### **Urusan Pilihan Bidang Perindustrian**

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
Program perencanaan dan pengembangan industri	2.090.592.950,00	283.918.745,00
Program pengelolaan system informasi industry nasional	374.720.438,00	374.480.185,00
<b>Total</b>	<b>2.465.313.388,00</b>	<b>658.398.930,00</b>

## 6. Urusan Transmigrasi

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.6

### Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Total	0,00	0,00

## 3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu, Sekretariat Daerah terdiri dari 6 Bagian, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 15 Dinas, 3 kecamatan dan Inspektorat.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI**

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

- (08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

### 4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (12) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	100%

- (13) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (14) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.
- (15) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (16) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (17) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
  - Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.

- (18) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (19) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.
- (20) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.
- (21) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (22) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- (23) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (24) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (25) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika OPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.
- (26) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

#### **4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- (27) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:
  - (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
  - (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
  - (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - (31) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca

- (32) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
- (33) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
- (34) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
- (35) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
- (36) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
- (37) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
- (38) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
- (39) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
- (40) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- (41) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

#### **4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI**

- (42) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- (43) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.
- (44) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 28 perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut :
  1. Sekretariat Daerah terdiri dari 6 bagian sebagai entitas pelaporan yaitu : Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
  2. Sekretariat DPRD;
  3. Inspektorat;
  4. Dinas Pendidikan;
  5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Dinas Perdagangan;
  11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  15. Dinas Perhubungan;
  16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  17. Dinas Lingkungan Hidup;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  22. Badan Pendapatan Daerah;
  23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  26. Kecamatan Kartoharjo;
  27. Kecamatan Manguharjo;
  28. Kecamatan Taman.
- (45) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah UPT pada Dinas Kesehatan dan KB yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.
- (46) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (47) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

**BAB**  
**5**

## **PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN**

### **5.1. PENDAPATAN**

#### **5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>PAD</b>	<b>261.815.342.908,00</b>	<b>255.554.493.407,62</b>	<b>97,61</b>	<b>264.212.229.517,55</b>

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp255.554.493.407,62 atau mencapai 97,61% yang berarti Rp6.260.849.500,38 atau 2,39% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp261.815.342.908,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp255.554.493.407,62 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp264.212.229.517,55 terjadi penurunan sebesar Rp8.657.736.109,93 atau 3,28%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.  
Pendapatan Asli Daerah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90	106.165.312.122,76
Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71	15.595.752.355,97
Lain-lain PAD yang sah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82
<b>Total</b>	<b>261.815.342.908,00</b>	<b>255.554.493.407,62</b>	<b>97,61</b>	<b>264.212.229.517,55</b>

### 5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Pajak Daerah</b>	<b>104.240.450.000,00</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>108,90</b>	<b>106.165.312.122,76</b>

Realisasi seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 113.514.116.369,67 atau mencapai 108,90% yang berarti sebesar Rp9.273.666.369,67 atau 8,90% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp104.240.450.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.514.116.369,67 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp106.165.312.122,76 terjadi peningkatan sebesar Rp7.348.804.246,91 atau lebih tinggi 6,92%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.  
Pajak Daerah**

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.950.000.000,00	8.130.855.159,00	116,99	7.026.280.556,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	20.230.000.000,00	23.343.654.772,00	115,39	19.278.495.104,00
4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.612.500.000,00	1.845.737.251,00	114,46	1.638.210.592,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.304.955.619,00	115,25	2.114.017.568,00

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	21.528.250.000,00	23.482.333.529,83	109,08	22.103.164.301,44
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.530.000.000,00	1.683.862.056,00	110,06	1.434.441.434,55
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	270.000.000,00	318.395.998,84	117,92	292.100.851,30
4.1.01.15. PBB P2	23.944.700.000,00	23.884.649.634,00	99,75	24.574.559.488,00
4.1.01.16. BPHTB	26.175.000.000,00	28.519.672.350,00	108,96	27.704.042.227,47
<b>Jumlah</b>	<b>104.240.450.000,00</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>108,90</b>	<b>106.165.312.122,76</b>

1. Realisasi pajak hotel sebesar Rp8.130.855.159,00 atau mencapai 116,99% yang berarti Rp1.180.855.159,00 atau 16,99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.950.000.000,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.130.855.159,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp7.026.280.556,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.104.574.603,00 atau lebih tinggi 15,72%.
2. Realisasi pajak restoran sebesar Rp23.343.654.772,00 atau mencapai 115,39% yang berarti Rp3.113.654.772,00 atau 15,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.230.000.000,00. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.343.654.772,00 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp19.278.495.104,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.065.159.668,00 atau lebih 21,09%. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas, dan telah dilaksanakan penggunaan aplikasi SIMPADAMA sehingga memudahkan Wajib Pajak restoran dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara online.
3. Realisasi pajak hiburan sebesar Rp1.845.737.251,00 atau mencapai 114,46% yang berarti Rp233.237.251,00 atau 14,46% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.612.500.000,00. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.845.737.251,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp1.638.210.592,00 terjadi peningkatan sebesar Rp207.526.659,00 atau lebih tinggi 12,67%. Pencapaian target kinerja tersebut

- dipengaruhi telah dihapuskannya kebijakan PPKM secara menyeluruh sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan hiburan
4. Realisasi pajak reklame sebesar Rp2.304.955.619,00 atau mencapai 115,25% yang berarti sebesar Rp304.955.619,00 atau 15,25% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.304.955.619,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp2.114.017.568,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 190.938.051,00 atau lebih tinggi 9,03%. Pencapaian pajak reklame dipengaruhi oleh penambahan dan keterisian papan reklame dan penyelenggaraan acara di Kota Madiun
  5. Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp23.482.333.529,83 atau mencapai 109,08% yang berarti Rp1.954.083.529,83 atau 9,08% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.528.250.000,00. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.482.333.529,83 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp22.103.164.301,44 terjadi peningkatan sebesar Rp1.379.169.228,39 atau lebih tinggi 6,24%. Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil.
  6. Realisasi pajak parkir sebesar Rp1.683.862.056,00 atau mencapai 110,06% yang berarti sebesar Rp153.862.056,00 atau 10,06% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.530.000.000,00. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.683.862.056,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp1.434.441.434,55 terjadi peningkatan sebesar Rp249.420.621,45 atau lebih tinggi 17,39%. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil.
  7. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp318.395.998,84 atau mencapai 117,92% yang berarti sebesar Rp48.395.998,84 atau 17,92% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp270.000.000,00. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp318.395.998,84 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2022 sebesar Rp292.100.851,30 terjadi peningkatan sebesar Rp26.295.147,54 atau lebih tinggi 9,00%. Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil.
  8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sebesar Rp23.884.649.634,00 atau mencapai 99,75% yang berarti sebesar Rp60.050.366,00 atau 0,25% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.944.700.000,00. Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2023 sebesar

Rp23.884.649.634,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2022 sebesar Rp24.574.559.488,00 terjadi penurunan sebesar Rp689.909.854,00 atau lebih rendah 2,81%. Pencapaian target kinerja PBB P2 dipengaruhi adanya rangsangan berupa reward untuk wajib pajak, dan petugas pungut dan petugas penagih piutang PBB P2 sampai dengan tahun 2023.

9. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan sebesar Rp28.519.672.350,00 atau mencapai 108,96% yang berarti sebesar Rp2.344.672.350,00 atau 8,96% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp26.175.000.000,00. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp27.704.042.227,47 terjadi peningkatan sebesar Rp815.630.122,53 atau lebih tinggi 2,94%. Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya kenaikan permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

### 5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>18.446.515.665,00</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>122,25</b>	<b>21.385.348.837,00</b>

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp22.551.072.553,00 atau mencapai 122,25% yang berarti sebesar Rp4.104.556.888,00 atau 22,25% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2023 sebesar Rp 18.446.515.665,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2023 sebesar Rp22.551.072.553,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp21.385.348.837,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.165.723.716,00 atau lebih tinggi 5,45%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.2.  
Retribusi Daerah**

<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.01. Jasa Umum	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00
4.1.02.02. Jasa Usaha	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00
4.1.02.03. Perizinan tertentu	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.446.515.665,00</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>122,25</b>	<b>21.385.348.837,00</b>

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.2.a.  
Retribusi Jasa Umum**

<b>4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan ( <b>Dinas Lingkungan Hidup</b> )	155.000.000,00	171.940.000,00	110,93	167.605.500,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( <b>Dinas Perhubungan</b> )	2.898.595.940,00	2.986.960.408,00	103,05	3.234.432.000,00
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios ( <b>Dinas Perhubungan</b> )	0,00	0,00	0,00	148.337.000,00
4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( <b>Dinas Perhubungan</b> )	410.020.000,00	364.421.204,00	88,88	427.874.709,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ( <b>Dinas Perdagangan</b> )	61.060.000,00	71.884.000,00	117,73	64.240.500,00

<b>4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas <b>(Dinas Komunikasi dan Informatika)</b>	160.000.000,00	202.331.966,00	126,46	212.814.531,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.684.675.940,00</b>	<b>3.797.537.578,00</b>	<b>103,06</b>	<b>4.255.304.240,00</b>

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp171.940.000,00 atau mencapai 110,93% yang berarti sebesar Rp16.940.000,00 atau 10,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp155.000.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2023 sebesar Rp171.940.000,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2022 sebesar Rp167.605.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.334.500,00 atau lebih tinggi 2,59%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp2.986.960.408,00 atau mencapai 103,05% yang berarti Rp88.364.468,00 atau 3,05% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.898.595.940,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.986.960.408,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2022 sebesar Rp3.234.432.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp247.471.592,00 atau lebih rendah 7,65%. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipengaruhi kenaikan jumlah kunjungan kepusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena terbangunnya cluster ikonik di beberapa wilayah Kota Madiun seperti Malioboro Jalan Pahlawan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sehingga menyebabkan kenaikan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata di Kota Madiun.
3. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp364.421.204,00 atau mencapai 88,88% yang berarti Rp45.598.796,00 atau 11,12% lebih

rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp410.020.000,00. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 sebesar Rp364.421.204,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2022 sebesar Rp427.874.709,00 terjadi penurunan sebesar Rp63.453.505,00 atau lebih rendah 14,83%. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor yang harus di uji.

4. Realisasi retribusi ulang tera dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp71.884.000,00 atau mencapai 117,73% yang berarti sebesar Rp10.824.000,00 atau 17,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp61.060.000,00. Realisasi retribusi ulang tera 2023 sebesar Rp71.884.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp64.240.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.643.500,00 atau lebih tinggi 11,90%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.
5. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp202.331.966,00 atau mencapai 126,46% yang berarti sebesar Rp42.331.966,00 atau 26,46% lebih tinggi dibandingkan dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi anggaran 2023 sebesar Rp202.331.966,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2022 sebesar Rp212.814.531,00 terjadi penurunan sebesar Rp10.482.565,00 atau lebih rendah 4,93%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah inspeksi ke manara telekomunikasi di Kota Madiun.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.2.b.**  
**Retribusi Jasa Usaha**

<b>4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.420.305.425,00	8.564.678.574,00	115,42	9.075.075.225,00
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4.970.924.300,00	7.456.013.647,00	149,99	5.100.253.966,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	627.120.000,00	781.654.000,00	124,64	1.012.902.200,00

<b>4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	23.079.000,00	71,21	26.414.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.000.000,00	737.708.400,00	76,84	887.886.206,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.010.759.725,00</b>	<b>17.563.133.621,00</b>	<b>125,35</b>	<b>16.102.531.597,00</b>

6. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa OPD tersaji pada tabel berikut dari :

**Tabel 5.1.1.2.b1.**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

<b>4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.01. Dinas PU	5.000.000,00	5.025.000,00	100,50	10.035.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Budparpora	250.000.000,00	368.756.000,00	147,50	250.345.000,00
4.1.02.02.01. BKPSDM	100.000.000,00	136.775.000,00	136,78	174.630.000,00
4.1.02.02.01. BKAD	3.728.033.425,00	3.602.802.949,00	96,64	5.649.840.610,00
4.1.02.02.01. Kec,Kartoharjo	1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	125,02	1.242.923.340,00
4.1.02.02.01. Kec,Manguharjo	1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	142,21	670.502.965,00
4.1.02.02.01. Kec,Taman	1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	131,89	932.114.310,00
4.1.02.02.01. Dinas Pertanian	29.067.000,00	29.067.000,00	100,00	20.279.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Perkim	102.000.000,00	162.385.000,00	159,20	124.405.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.420.305.425,00</b>	<b>8.564.678.574,00</b>	<b>115,42</b>	<b>9.075.075.225,00</b>

**a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.025.000,00 atau mencapai 100,50% yang berarti sebesar Rp25.000,00 atau 0,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.025.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp10.035.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.010.000,00 atau 49,93%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**b. Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp368.756.000,00 atau mencapai 147,50% yang berarti sebesar Rp118.756.000,00 atau 47,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp368.756.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp250.345.000,00 peningkatan sebesar Rp118.411.000,00 atau 47,30%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp136.775.000,00 atau mencapai 136,78% yang berarti sebesar Rp36.775.000,00 atau 36,78% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp136.775.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp174.630.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp37.855.000,00 atau lebih rendah 21,68%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

**d. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.602.802.949,00 atau mencapai 96,64% yang berarti sebesar Rp125.230.476,00 atau 3,36% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.728.033.425,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.302.802.949,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp5.649.840.610,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.047.037.661,00 atau lebih

rendah 36,23%. Hal ini dipengaruhi kerjasama pemanfaatan sewa dengan PT SRITANAYA berupa KSP Pengelolaan Plaza Lawu pembayaran kontribusi tetap dari tahun 2023-2024 senilai Rp1.312.500.000 akan dibayarkan secara mengangsur sesuai dengan Surat permohonan Audensi kepada walikota madiun tanggal 20 Desember 2023 nomor 006/ADM-LEAS/HO/STM-PL/XII/2023 .

e. **Kecamatan Kartoharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp1.337.932.175,00 atau mencapai 125,02% yang berarti sebesar Rp267.727.175,00 atau lebih tinggi 25,02% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.070.205.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp40.600.000,00 berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.297.322.175,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.337.932.175,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp1.242.923.340,00 terjadi peningkatan sebesar Rp95.008.835,00 atau lebih tinggi 7,64%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

f. **Kecamatan Manguharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Manguharjo sebesar Rp1.443.472.670,00 atau mencapai 142,21% yang berarti sebesar Rp428.472.670,00 atau 42,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.015.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 yang dikelola oleh kecamatan manguharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp21.000.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan Realisasi sebesar Rp1.422.472.670,00 adalah berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.443.472.670,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp670.502.965,00 terjadi peningkatan sebesar Rp772.969.705,00 atau lebih tinggi 115,28%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

g. **Kecamatan Taman**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Taman sebesar Rp1.478.462.780,00 atau mencapai 131.89% yang berarti sebesar Rp357.462.780,00 atau 31,89% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.121.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 yang dikelola oleh kecamatan taman terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp56.400.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.422.062.780,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.478.462.780,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp932.114.310,00 terjadi peningkatan sebesar Rp546.348.470,00 atau lebih tinggi 58.61 %. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

h. **Dinas Pertanian**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pertanian sebesar Rp29.067.000,00 atau mencapai 100.% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.067.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp20.279.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.788.000,00 atau lebih tinggi 43.34 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

i. **Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perkim sebesar Rp162.385.000,00 atau mencapai 159.20% yang berarti sebesar Rp60.385.000,00 atau 59.20% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp102.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp162.385.000,00 Dinas Perkim ini merupakan sewa rusunawa dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp124.405.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp37.980.000,00 atau lebih tinggi 30.53 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

7. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi lahan parkir Sumber Umis atas, parkir jalan jawa , parkir terminal dan parkir exs Terminal Barang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp781.654.000,00 atau mencapai 124.64% yang berarti sebesar Rp54.534.000,00 atau 24.64 % lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp627.120.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2023 sebesar Rp781.654.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2022 sebesar Rp1.012.902.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp231.248.200,00 atau lebih rendah 22.83%. Pencapaian target kinerja Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan potensi riil.
8. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp7.456.013.647,00 atau mencapai 149.99% yang berarti sebesar Rp2.485.089.347,00 atau 49.99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.970.924.300,00. Realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2023 sebesar Rp7.456.013.647,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2022 sebesar Rp5.100.253.966,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.355.759.681,00 atau lebih tinggi 46.19% Pencapaian target kinerja Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sesuai dengan potensi riil.
9. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp23.079.000,00 atau mencapai 71.21% yang berarti Rp9.331.000,00 atau 28.79% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.410.000,00. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.079.000,00 dibandingkan dengan Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2022 sebesar Rp26.414.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.335.000,00 atau 12.63%. Pencapaian target kinerja Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan potensi riil.

Perincian anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dikelola oleh beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini :

**Tabel 5.1.1.2.b2.**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

<b>4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.02.09. Dinas Perkim	10.000.000,00	12.500.000,00	<b>125,00</b>	34.000.000,00
4.1.02.02.09. Dinas Budparpora	950.000.000,00	725.208.400,00	<b>76,34</b>	853.886.206,00
<b>Jumlah</b>	<b>960.000.000,00</b>	<b>737.708.400,00</b>	<b>76,84</b>	<b>887.886.206,00</b>

**a. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)**

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp 12.500.000,00 atau mencapai 125.00% yang berarti sebesar Rp2.500.000,00 atau 25.00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.500.000,00 yang merupakan sewa alon alon dibandingkan dengan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2022 sebesar Rp34.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp21.500.000,00 atau lebih rendah 63.24%

**b. Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora).**

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp725.208.400,00 atau mencapai 76.34% yang berarti sebesar Rp224.791.600,00 atau 23.66% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp950.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2023 sebesar Rp725.208.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp853.886.206,00 terjadi penurunan sebesar Rp128.677.806,00 atau lebih rendah 15.07%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.2.c**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

<b>4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b> )	750.000.000,00	1.189.201.354,00	158,56	1.026.433.000,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek ( <b>Dinas Perhubungan</b> )	1.080.000,00	1.200.000,00	111,11	1.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>751.080.000,00</b>	<b>1.190.401.354,00</b>	<b>158,49</b>	<b>1.027.513.000,00</b>

1. Realisasi Retribusi IMB dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.189.201.354,00 atau mencapai 158.56% yang berarti sebesar Rp439.201.354,00 atau 58,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.189.201.354,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2022 sebesar Rp1.026.433.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp162.768.354,00 atau lebih tinggi 15.86%. Pencapaian target kinerja Retribusi IMB sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi izin trayek dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.200.000,00 atau mencapai 111.11% yang berarti sebesar Rp120.000,00 atau 11,11% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.080.000,00. Realisasi izin trayek tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.200.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2022 sebesar Rp1.080.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp120.000,00 atau lebih tinggi 11.11%. Pencapaian target kinerja izin trayek sesuai dengan potensi riil.

**5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>16.160.694.027,00</b>	<b>14.983.008.032,73</b>	<b>92,71</b>	<b>15.595.752.355,97</b>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp14.983.008.032,73 atau 92,71% yang berarti sebesar Rp1.177.685.994,27 atau 7,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16.160.694.027,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.983.008.032,73 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.595.752.355,97 terjadi penurunan sebesar Rp612.744.323,24 atau lebih rendah 3,93%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.3.**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 Perumda Air Minum	7.285.623.200,00	7.285.623.205,30	100,00	6.878.627.376,00
4.1.3.01.02 Perumda BPR Bank Daerah	579.904.398,00	579.904.398,00	100,00	930.412.525,00
4.1.3.01.03 Perumda Aneka Usaha	1.177.685.900,00	0,00	100,00	800.615.164,00
4.1.3.02.01 Bank Jatim	7.117.480.529,00	7.117.480.429,43	100,00	6.986.097.290,97
<b>Total</b>	<b>16.160.694.027,00</b>	<b>14.983.008.032,73</b>	<b>92,71</b>	<b>15.595.752.355,97</b>

1. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum sebesar Rp7.285.623.205,30 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.285.623.200,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2023 dari Perumda Air Minum dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Audited Laporan Keuangan Perumda Air Minum Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum

anggaran 2023 sebesar Rp7.285.623.205,30 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum tahun 2022 sebesar Rp6.878.627.376,00 terjadi peningkatan sebesar Rp406.995.829,30 atau lebih tinggi 5,92%.

2. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah sebesar Rp579.904.398,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp579.904.398,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2023 dari Perumda BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Bank Pasar per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 579.904.398,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun 2022 sebesar Rp930.412.525,00 terjadi penurunan sebesar Rp350.508.127,00 atau lebih rendah 37,67 %.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha sebesar Rp 0,00 meskipun telah dianggarkan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.177.685.900,00. berdasarkan Surat Nomor 900/4594/401.202/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang setoran laba Perumda Aneka Usaha Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 Jika Perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan pasal ini, Perumda Aneka Usaha untuk Surat Penetapan target anggaran tahun anggaran 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha per 31 Desember 2023 tidak perlu menyetorkan ke kas daerah sampai seluruh kerugian tertutup. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha tahun anggaran 2022 sebesar Rp800.615.164,00 terjadi penurunan sebesar Rp800.615.164,00 atau sama 0,00%.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.529,00. Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya No.2 Tahun Buku 2022 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 tanggal 12 april 2023 oleh Notaris. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2022 sebesar Rp6.986.097.290,97 terjadi peningkatan sebesar Rp131.383.138,46 atau lebih rendah 1,88 %.

#### 5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp104.506.296.452,22 atau 84,99% yang berarti sebesar Rp18.461.386.763,78 atau 15,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp122.967.683.216,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp104.506.296.452,22 dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp121.065.816.201,82 terjadi penurunan sebesar Rp16.559.519.749,60 atau lebih rendah 13,68%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.4.**  
**Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	449.118.662,00	0,00	481.163.642,00
b. 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.555.000,00
c. 4.1.04.05 Jasa giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
d. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	59,65	98.561.827,86
e. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
f. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
g. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
h. 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	28.122.900,00	121.838.700,00	433,24	0,00
i. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
j. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
k. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>122.967.683.216,00</b>	<b>104.506.296.452,22</b>	<b>84,99</b>	<b>121.065.816.201,82</b>

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.4.a**  
**Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah**

<b>4.1.04</b> <b>Lain-Lain PAD yang</b> <b>sah Per OPD</b>	<b>Anggaran 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>Realisasi 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2</b> <b>)</b>	<b>5</b>
<b>1. Dinas Kesehatan dan</b> <b>Rumah Sakit Umum</b> <b>Daerah</b>	<b>113.379.270.000,00</b>	<b>98.357.722.618,06</b>	<b>86,75</b>	<b>110.007.073.807,15</b>
a. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
<b>2.BAPENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>629.196.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.387.027,00</b>
a. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
<b>3.BKAD</b>	<b>9.528.290.316,00</b>	<b>5.364.765.376,16</b>	<b>56,30</b>	<b>10.402.800.292,67</b>
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	449.118.662,00	0,00	481.163.642,00
b. 4.1.04.05 Jasa giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
b. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	58,72	98.561.827,86
c. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
d. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterb Pelak Pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
e. 4.1.04.16 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
f. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
<b>4.Dinas Ketahanan Pangan &amp; Pertanian</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.773.000,00</b>	<b>102,42</b>	<b>31.555.000,00</b>
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.555.000,00
<b>5.Dinas Perhubungan</b>	<b>28.122.900,00</b>	<b>121.462.500,00</b>	<b>431,90</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	28.122.900,00	121.462.500,00	342,41	0,00
<b>5.Dinas Perkim</b>	<b>0,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	376.200,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>122.967.683.216,00</b>	<b>104.506.296.452,22</b>	<b>84,99</b>	<b>121.065.816.201,82</b>

#### 1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp98.357.722.618,06 atau mencapai 86,75% yang berarti Rp15.021.547.381,94 atau 13,25% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.379.270.000,00. Realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.357.722.618,06 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp110.007.073.807,15 terdapat penurunan sebesar Rp11.649.351.189,09 atau lebih rendah sebesar 10,59%.Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per Puskesmas tersaji dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.4.a1**  
**Pendapatan lain-lain PAD yang sah BLUD**

4.1.04 Lain-Lain PAD yang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo	2.081.950.000,00	2.193.860.448,96	105,38	1.828.303.600,68
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong	1.269.900.000,00	1.506.072.254,61	118,60	1.186.923.268,72
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Demangan	1.825.000.000,00	2.039.884.785,95	111,77	1.639.047.938,73
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo	2.035.000.000,00	2.133.823.584,81	104,86	1.869.611.800,87
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari	1.554.000.000,00	1.694.651.514,35	109,05	1.525.339.767,08
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Tawangrejo	1.613.420.000,00	1.784.716.368,93	110,62	1.412.594.925,57
4.1.04.16 Pendapatan BLUD RSUD	103.000.000.000,00	87.004.713.660,45	84,47	100.545.252.505,50
<b>Jumlah</b>	<b>113.379.270.000,00</b>	<b>98.357.722.618,06</b>	<b>86,75</b>	<b>110.007.073.807,15</b>

- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.193.860.448,96 atau mencapai 105.38% yang berarti sebesar Rp111.910.448,96 atau 5.38% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.081.950.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.193.860.448,96 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.828.303.600,68 terdapat peningkatan sebesar Rp365.556.848,28 atau lebih tinggi 19.99%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.506.072.254,61 atau mencapai 118.60% yang berarti sebesar Rp236.172.254,61 atau 18.60% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.269.900.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.506.072.254,61 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun

anggaran 2022 sebesar Rp1.186.923.268,72 terdapat peningkatan sebesar Rp319.148.985,89 atau lebih rendah 26.89%.

- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.039.884.785,95 atau mencapai 111.77% yang berarti sebesar Rp214.884.785,95 atau 11.77% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.825.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.039.884.785,95 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.639.047.938,73 terdapat peningkatan sebesar Rp400.836.847,22 atau lebih tinggi 24.46%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.133.823.584,81 atau mencapai 104.86% yang berarti Rp98.823.584,81 atau 4.86% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.035.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.133.823.584,81 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.869.611.800,87 terdapat peningkatan sebesar Rp264.211.783,94 atau lebih tinggi 14.13%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.694.651.514,35 atau mencapai 109.05% yang berarti sebesar Rp140.651.514,35 atau 9.05% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.554.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.694.651.514,35 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.525.339.767,08 terdapat peningkatan sebesar Rp169.311.747,27 atau lebih tinggi 11.10%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas tawangrejo tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.784.716.368,93 atau mencapai 110.62% yang berarti sebesar Rp171.296.368,93 atau 10.62% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.613.420.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas tawangrejo tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.784.716.368,93 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas tawangrejo tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.412.594.925,57 terdapat peningkatan sebesar Rp372.121.443,36 atau lebih tinggi 26.34%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2023 sebesar

Rp87.004.713.660,45 atau mencapai 84,47% yang berarti sebesar Rp15.995.286.339,55 atau 15,53% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp103.000.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 87.004.713.660,45 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp100.545.252.505,50 terdapat penurunan sebesar Rp13.540.538.845,05 atau lebih rendah 13,47%.

## **2. Badan Pendapatan Daerah.**

### **a. Pendapatan Denda Pajak Daerah.**

Realisasi pendapatan denda pajak daerah berupa denda Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB sebesar Rp629.196.758,00. Pendapatan denda pajak daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena realisasi denda pajak daerah berupa denda Pajak Resto, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB tidak dapat diprediksi perolehannya.

## **3. BKAD.**

### **a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**

Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp449.118.662,00 ini meliputi realisasi atas penjualan alat angkutan sebesar Rp448.409.662,00 dan realisasi atas penjualan alat kantor sebesar Rp709.000,00. Realisasi penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp449.118.662,00 tidak ditargetkan dalam APBD dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp481.163.642,00 terdapat penurunan sebesar Rp39.044.980,00 atau lebih rendah 6,66% . karena realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tidak dapat diprediksi perolehannya.

### **b. Pendapatan jasa giro.**

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp599.729.647,13 atau mencapai 33,32% yang berarti sebesar Rp1.200.270.352,87 atau 66,68% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2023 sebesar Rp599.729.647,13 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2022 sebesar Rp89.080.155,53 terdapat penurunan sebesar Rp 510.649.491,60 atau lebih tinggi 573,25%.

### **c. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.**

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp75.333.024,01

atau mencapai 58,72% yang berarti sebesar Rp52.957.291,99 atau 41,28% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.290.316,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2023 sebesar Rp75.333.024,01 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2022 sebesar Rp98.561.827,86 terdapat penurunan sebesar Rp23.228.803,85 atau lebih rendah 23,57%.

d. Pendapatan Bunga Deposito.

Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp2.880.498.521,96 atau 37,90% yang berarti sebesar Rp4.719.501.478,04 atau 62,10% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.600.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.961.975.880,18 terdapat penurunan sebesar Rp4.081.477.358,22 atau lebih rendah 58,63%. Turunnya pendapatan bunga deposito karena berkurangnya dana yang di depositokan.

e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp172.086.543,39. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023.

f. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.187.998.977,67 pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023. Pendapatan dari pengembalian antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.187.998.977,67 Pendapatan ini tidak di anggarakan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023.

#### **4 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

a. Pendapatan hasil penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan.

Realisasi pendapatan penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan sebesar Rp32.773.000,00 atau mencapai 102,42% yang berarti sebesar Rp773.000,00 atau 2,42% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.000.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.773.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil

periklanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.555.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp1.218.000,00 atau lebih tinggi 3.86%.

## 5 Dinas Perhubungan

### a. Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda Retribusi daerah berupa denda Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp121.462.500,00. Pendapatan denda Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan dari perpanjangan sewa parkir dan sewa kios Pemakaian Kekayaan daerah tidak dapat diprediksi perolehannya.

## 6 Dinas Perumahan dan Pemukiman

### a. Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda Retribusi daerah berupa denda Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp376.200,00 Pendapatan denda Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan denda dari sewa rusunawa. Pemakaian Kekayaan daerah tidak dapat diprediksi perolehannya.

## 5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

### 5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.2.01.Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>667.418.485.000,00</b>	<b>666.070.630.012,80</b>	<b>99,80</b>	<b>668.609.902.487,00</b>

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp666.070.630.012,80 mencapai 99.80% yang berarti sebesar Rp1.347.854.987,20 atau 0.20% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp667.418.485.000,00. Realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 666.070.630.012,80 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp668.609.902.487,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.539.272.474,20 atau lebih rendah 0.38%. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil

atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1**  
**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	24.092.136.000,00	24.092.136.000,00	100	29.804.646.600,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00
Dana Alokasi Umum	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00
Dana Alokasi Khusus	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,33	71.207.048.405,00
Dana Bagi Hasil Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00
<b>Jumlah</b>	<b>667.418.485.000,00</b>	<b>666.070.630.012,80</b>	<b>99,80</b>	<b>668.609.902.487,00</b>

#### **5.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	3
<b>4.2.01.01.01</b> <b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>100</b>	<b>29.804.646.600,00</b>

Realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp24.092.136.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sebesar sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.092.136.000,00. Realisasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp24.092.136.000,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 29.804.646.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.712.510.600,00 atau lebih rendah 19.17%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara.

Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.1.  
Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0001 Bagi Hasil PBB	2.725.606.000,00	2.725.606.000,00	100	5.510.384.675,00
4.2.01.01.01.0003 Bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29	21.366.530.000,00	21.366.530.000,00	100	24.294.261.925,00
<b>Total</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>100</b>	<b>29.804.646.600,00</b>

1. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp2.725.606.000,00 atau yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.510.384.675,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.784.778.675,00 atau lebih rendah 50.54%.
2. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 sebesar Rp21.366.530.000,00 atau yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.294.261.925,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.927.731.925,00 atau lebih rendah 12.05%.

### 5.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01 Bagi Hasil Bukan Pajak	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00

Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp36.475.210.342,00 atau mencapai 113.73% yang berarti sebesar Rp4.403.858.342,00 atau 13.73% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 32.071.352.000,00. Realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp36.475.210.342,00 dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp82.308.678.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp45.833.467.658,00 atau lebih rendah 55.68%. Pendapatan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.2.  
Bagi Hasil Bukan Pajak**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi	29.896.423.000,00	33.797.056.552,00	113.05	76.819.003.249,00
4.2.01.01.01.0007 Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi	9.728.000,00	12.969.320,00	113.32	46.240.672,00
4.2.01.01.01.0009 Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batubara	687.558.000,00	938.550.591,00	136.50	3.049.142.985,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0010 Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan	244.509.000,00	281.746.668,00	115.23	435.980.094,00
4.2.01.01.01.0013 Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117.17	1.958.311.000,00
<b>Total</b>	<b>32.071.352.000,00</b>	<b>36.475.210.342,00</b>	<b>113,73</b>	<b>82.308.678.000,00</b>

1. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi sebesar Rp33.797.056.552,00 atau 113.05% yang berarti sebesar Rp6.351.120.435,00 atau 13.05% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.896.423.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2023 sebesar R 33.797.056.552,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2022 sebesar Rp76.819.003.249,00 terjadi penurunan sebesar Rp43.021.946.697,00 atau lebih rendah 56.00%. Penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
2. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi sebesar Rp12.969.320,00 atau 133.32% yang berarti sebesar Rp3.241.320,00 atau 33.32% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.728.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.969.320,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi tahun anggaran 2022 sebesar Rp46.240.672,00 terjadi penurunan sebesar Rp33.271.352,00 atau lebih rendah 71,95%. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
3. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara sebesar Rp938.550.591,00 atau 136.50% yang berarti sebesar Rp250.992.591,00 atau 36.50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp687.558.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2023 sebesar Rp938.550.591,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.049.142.985,00 terjadi

penurunan sebesar Rp2.110.592.394,00 atau lebih rendah 69.22%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

4. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan sebesar Rp281.746.668,00 atau 115.23% yang berarti sebesar Rp37.237.668,00 atau 15.23% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp244.509.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp281.746.668,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp435.980.094,00 terjadi penurunan sebesar Rp154.233.426,00 atau lebih rendah 35,38%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
5. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan sebesar Rp1.444.887.211,00 atau 117.17% yang berarti sebesar Rp211.753.211,00 atau 17.17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran 2023 sebesar Rp1.233.134.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 penurunan sebesar Rp513.423.789,00 atau lebih rendah 26.22%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

### 5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp487.141.770.396,00 atau 99.97% yang berarti sebesar Rp146.503.604,00 atau 0.03% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp487.288.274.000,00. Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp487.141.770.396,00 apabila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2022 sebesar Rp463.486.748.121,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.655.022.275,00 atau 5.10%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrollable* karena menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima. Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.4  
Dana Alokasi Umum**

<b>Penerimaan Dana Alokasi Umum</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.2.01.01.02.0001 DAU	459.655.490.000,00	459.508.986.396,00	99,97	463.486.748.121,00
4.2.01.01.02.0002 DAU				
Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0004 DAU				
Tambahan Dukungan Pendanaan Penggajian P3K	22.232.784.000,00	22.232.784.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>487.288.274.000,00</b>	<b>487.141.770.396,00</b>	<b>99,97</b>	<b>463.486.748.121,00</b>

#### **5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>4.2.01.01.03 DAK</b>	<b>94.358.814.000,00</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>87,33%</b>	<b>71.207.048.405,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp82.402.483.839,80 atau 87,33% yang berarti sebesar Rp 11.956.330.160,20 atau 12,67% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.358.814.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 sebesar Rp82.402.483.839,80 apabila dibandingkan dengan Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp71.207.048.405,00 terjadi peningkatan sebesar Rp11.195.435.434,80 atau lebih tinggi 15,72%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan

demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.1.4**  
**Dana Alokasi Khusus**

<b>Penerimaan Dana Alokasi Khusus</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.2.01.01.03 DAK Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	89,05	2.921.025.894,00
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	87,20	68.286.022.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>94.358.814.000,00</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>87,33</b>	<b>71.207.048.405,00</b>

Sedangkan perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

**Tabel 5.1.2.1.5.**  
**Dana Alokasi Khusus**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 =(3/2)</b>	<b>5</b>
<b>4.2.01.01.03.</b>				
<b>Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>6.400.881.000,00</b>	<b>5.699.869.054,00</b>	<b>89.05</b>	<b>2.921.025.894,00</b>
4.2.01.01.03.0003 Pendidikan Reguler SMP	3.437.834.000,00	2.876.952.272,00	83.69	864.908.794,00
4.2.01.01.03.0017 Kesehatan& KB Penguatan Stunting	1.723.545.000,00	1.706.171.149,00	98.99	-
4.2.01.01.03.0025 Kesehatan& KB Reguler KB	1.158.982.000,00	1.042.518.233,00	89.95	1.068.470.000,00
4.2.01.01.03.0060 Kesehatan& KB Reguler KB Penguatan sistem kesehatan	80.520.000,00	74.227.400,00	92.19	-
4.2.01.01.03.0011 perpustakaan daerah				279.410.600,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
<b>4.2.01.01.03.0018</b> DAK Fisik Bid.Kes dan KB-penug. peningk.pence.pengen. penyt dan sanitasi total berbasis masy.	-	-		586.140.600,00
<b>4.2.01.01.03.0030</b> Industri Kecil danmenengah penugasan Pembangunan	-			122.095.900,00
<b>4.2.01.01.04</b> <b>Dana Alokasi Khusus</b> <b>.Non Fisik :</b>	<b>87.957.933.000,00</b>	<b>76.702.614.785,80</b>	<b>87,20</b>	<b>68.286.022.511,00</b>
<b>4.2.01.01.04.0001</b>  DAK Non Fisik BOS Reguler	24.405.700.000,00	19.860.631.414,80	81,38	-
<b>4.2.01.01.04.0003</b> DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.327.500.000,00	717.500.000,00	54,05	19.884.278.226,00
<b>4.2.01.01.04.0004</b> DAK Non Fisik TPG PNSD	45.266.705.000,00	45.266.704.000,00	100,00	42.516.989.020,00
<b>4.2.01.01.04.0005</b>  DAK Non Fisik -Tamsil Guru PNSD	949.500.000,00	605.685.285,00	55,00	654.000.000,00
<b>4.2.01.01.04.0007</b>  DAK Non Fisik BO P PAUD	4.422.900.000,00	99.000.000,00	2,24	-
<b>4.2.01.01.04.0008</b> BOP Pendidikan kesetaraan	728.430.000,00	-	-	-
<b>4.2.01.01.04.0011</b> BOK KB-BOK	2.301.503.000,00	2.301.503.000,00	100,00	2.816.134.090,00
<b>4.2.01.01.04.0013</b> BOK KB-Akreditasi puskesmas	4.958.759.000,00	4.958.759.000,00	100,00	-
<b>4.2.01.01.04.0015</b> BOKKB-BOKB	2.842.666.000,00	2.195.894.686,00	77,25	946.394.000,00
<b>4.2.01.01.04.0016</b>  DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman	333.900.000,00	315.318.450,00	94,43	182.478.000,00

Modal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.2.01.01.04.0016</b> DAK Non Fisik- PK2UKM	420.370.000,00	381.618.950,00	0.91	360.496.800,00
<b>4.2.01.01.04.0016</b> DAK Non Fisik-Pelayan Perlindungan perempuan dan anak	-	-		451.800.000,00
<b>4.2.01.01.04.0016</b> DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-		473.452.375,00
<b>Jumlah</b>	<b>94,358,814,000,00</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>87.33%</b>	<b>71.207.048.405,00</b>

Realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) non fisik berupa dana BOS bagi SD dan SMP swasta periode berakhir 31 Desember 2023 secara detil telah tersaji dalam **Lampiran 1**.

#### 5.1.2.1.5. Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.2.01.01.01</b> <b>Dana Bagi Hasil</b> <b>Cukai</b>	<b>29.607.909.000,00</b>	<b>35.959.029.435,00</b>	<b>121,45</b>	<b>21.802.781.361,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai adalah sebesar Rp35.959.029.435,00 atau 121,45% yang berarti sebesar Rp6.351.120.435,00 atau 21,45% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.607.909.000,00. Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2023 sebesar Rp35.959.029.435,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp21.802.781.361,00 terjadi peningkatan sebesar Rp14.156.248.074,00 atau lebih tinggi 64,93%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable*. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

### 5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya</b>	<b>63.300.891.000,00</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>118.03%</b>	<b>28.870.790.000,00</b>

Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp74.714.922.000,00 atau 118,03% yang berarti sebesar Rp11.414.031.000,00 atau 18,03% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 63.300.891.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp45.844.132.000,00 atau lebih tinggi 158,79%.

Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

#### 5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>4.3.4.01 Dana Insentif Daerah</b>	<b>63.300.891.000,00</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>118,03%</b>	<b>28.870.790.000,00</b>

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp74.714.922.000,00 atau 118,03% yang berarti lebih tinggi dari

anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp63.300.891.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.844.132.000,00 atau lebih tinggi 158,79%.

### 5.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>96.282.390.600,00</b>	<b>121.272.084.812,00</b>	<b>125,95%</b>	<b>99.023.389.080,00</b>

Penerimaan dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp121.272.084.812,00 atau 125.95% yang berarti sebesar Rp24.989.694.200,00 atau 25.95% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp96.282.390.600,00. Realisasi transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah provinsi dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp99.023.389.080,00 terjadi peningkatan sebesar Rp22.248.695.732,00 atau lebih tinggi 22.47%. Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/180/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 Berdasarkan Realisasi Pajak daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

#### 5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>95.663.488.000,00</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>126,03</b>	<b>98.284.006.080,00</b>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi adalah sebesar Rp120.565.582.200,00 mencapai 126.03% yang berarti sebesar Rp24.902.094.200,00 atau 26.03% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp95.663.488.000,00. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 dibandingkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi tahun anggaran 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00. atau terjadi peningkatan sebesar Rp22.281.576.120,00 atau lebih tinggi 22.67%.

Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.3.1**  
**Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB	28.601.641.000,00	34.918.489.800,00	122.09	30.500.722.060,00
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB	12.062.084.000,00	15.339.681.100,00	127.17	13.983.937.380,00
4.2.02.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB	17.363.013.000,00	29.292.250.400,00	168.70	18.943.492.380,00
4.2.02.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	231.250.000,00	371.681.600,00	160.73	270.478.040,00
4.2.02.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.405.500.000,00	40.643.479.300,00	108.66	34.585.376.220,00
<b>Total</b>	<b>95.663.488.000,00</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>126.03</b>	<b>98.284.006.080,00</b>

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp34.918.489.800,00 atau mencapai 122.09% yang berarti sebesar Rp6.316.848.800,00 atau 22.09% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan

- dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp28.601.641.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2022 sebesar Rp30.500.722.060,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.417.767.740,00 atau lebih tinggi 14.48%.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp15.339.681.100,00 atau mencapai 127.17% yang berarti sebesar Rp3.277.597.100,00 atau 27,17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.062.084.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2022 sebesar Rp13.983.937.380,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.355.743.720,00 atau lebih tinggi 9,70%.
  3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp29.292.250.400,00 atau mencapai 168.70% yang berarti sebesar Rp11.929.237.400,00 atau 68.70% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.363.013.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp18.943.492.380,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp10.348.758.020,00 atau lebih tinggi 54.63%.
  4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp371.681.600,00 atau mencapai 160.73% yang berarti sebesar Rp140.431.600,00 atau 60.73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp231.250.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp371.681.600,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2022 sebesar Rp270.478.040,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp101.203.560,00 atau lebih tinggi 37.4282%.
  5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp40.643.479.300,00 atau mencapai 108.66% yang berarti sebesar Rp3.237.979.300,00 atau 8.66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp37.405.500.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun anggaran 2023 sebesar Rp40.643.479.300,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rokok tahun 2022 sebesar Rp34.585.376.220,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp6.058.103.080,00 atau lebih tinggi 17,52%.

### 5.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%	739.383.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp 706.502.612,00 atau mencapai 114.15% yang berarti sebesar Rp87.600.000,00 atau 14.15% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 618.902.600,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 706.502.612,00 dibandingkan dengan realiasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2022 sebesar Rp739.383.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp32.880.388,00 atau lebih rendah 4,45%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 89 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.2.3.2**  
**Pendapatan Bagi Hasil Lainnya**  
**Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemerintah Lainnya**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan Ta.2023	476.850.000,00	476.850.000,00	100,00%	476.850.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Honorarium Kinerja Guru Non PNS Sejenjang TK/SD/SMP selama 10 Bulan Ta.2023	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,00
Honorarium Kinerja Kepala /GuruTK/Paud Non PNS selama 6 bulan ta 2023	81.600.000,00	163.200.000,00	100,00%	0,00
Bantuan Keuangan khusus Bidang Kesehatan Ta.2023	30.452.612,00	30.452.612,00	100,00%	0,00
Honorarium Kinerja Guru Non PNS jenjang /TK/SD/SMP selama 2 bulan ta 2023	0,00	6.000.000,00	0%	0,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	0,00	0,00	0%	108.800.000,0
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	0,00	0,00	0%	12.000.000,0
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	0,00	0,00	0%	12.000.000,0
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	0,00	0,00	0%	12.000.000,0
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	0,00	0,00	0%	117.733.000,0
<b>Total</b>	<b>618.902.612,00</b>	<b>706.502.612,00</b>	<b>114.15%</b>	<b>739.383.000,00</b>

### 5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.3. Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2023 tidak ada realisasi. Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2023 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.3.**  
**Lain Lain Pendapatan Yang Sah**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan hibah Dana BOS	0,00	0,00		0,00
4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas pengembalian hibah	0,00	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

#### **5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
<b>4.3.03.01.01.</b> <b>Pendapatan Dana Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2023 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Pada tahun 2023 tidak terdapat penerimaan dari pendapatan dana hibah Bos, karena di reklas menjadi pendapatan DAK Non Fisik.

## 5.2. BELANJA

### 5.2.1. BELANJA OPERASI

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.053.170.646.108,00</b>	<b>975.874.375.042,70</b>	<b>92,66</b>	<b>930.473.573.791,29</b>

Realisasi belanja Operasi sebesar Rp975.874.375.042,70 atau mencapai 92,66% yang berarti sebesar Rp45.039.062.408,61 atau 7,34% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.053.170.646.108,00.

Perincian anggaran dan realisasi belanja operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1**  
**Belanja Operasi**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.1.1 Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25
5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04
5.2.1.3 Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00	6.480.445.500,00
5.2.1.4 Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,71	11.562.623.718,00
5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05	33.248.185.680,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.053.170.646.108,00</b>	<b>975.874.375.042,70</b>	<b>92,66</b>	<b>930.473.573.791,29</b>

#### 5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Pegawai</b>	<b>468.936.215.253,00</b>	<b>423.896.152.844,39</b>	<b>90,40</b>	<b>404.406.660.608,25</b>

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp423.896.152.844,39 atau mencapai 90,40% yang berarti sebesar Rp45.040.062.408,61 atau 9,60% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp468.936.215.253,00. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang sudah pensiun.

Realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp404.406.660.608,25 terjadi kenaikan sebesar Rp113.259.269.986,75 atau lebih tinggi 28,01%.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.1.1**  
**Belanja Pegawai**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	235.945.666.095,00	210.825.345.289,00	89,35	205.776.281.913,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.060.181.873,00	132.981.043.160,00	90,43	128.194.668.409,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	66.868.963.435,00	64.056.690.831,33	95,79	51.522.008.317,25
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	14.980.503.217,00	14.287.484.704,00	95,37	15.392.700.656,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.859.590.633,00	912.138.860,06	49,05	934.173.813,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	741.600.000,00	731.340.000,00	98,62	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.364.400.000,00	0,00	0,00	1.501.667.500,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	115.310.000,00	102.110.000,00	88,55	353.820.000,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>468.936.215.253,00</b>	<b>423.896.152.844,39</b>	<b>90,40</b>	<b>404.406.660.608,25</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.1.1**

**Belanja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

<b>Belanja Pegawai OPD</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 =(3/2)</b>	<b>5</b>
Dinas Pendidikan	172.659.737.000,00	159.677.191.999,00	92,48	148.247.482.206,00
Dinas Kesehatan PP & KB	76.408.122.561,00	71.923.686.377,00	94,13	58.746.782.273,00

<b>Belanja Pegawai OPD</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
Dinas PU TR	7.713.444.030,00	6.741.362.679,00	87,40	7.294.620.499,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	85,33	4.928.758.233,00
Satpol PP & Damkar	7.862.298.000,00	6.239.014.742,00	79,35	6.921.448.013,00
BPBD	1.756.695.000,00	1.701.613.226,00	96,86	1.529.845.511,00
Dinas Sosial	5.943.774.352,00	5.424.675.511,00	91,27	5.240.733.141,00
Dinas Tenaga Kerja	5.479.630.413,00	5.067.862.752,00	92,49	4.725.786.477,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	5.158.957.000,00	4.204.677.559,00	81,50	4.184.281.170,00
Dinas LH	9.775.953.388,00	9.297.966.573,00	95,11	10.126.696.205,00
Dispendukcapil	4.405.303.400,00	4.317.572.955,00	98,01	3.763.290.319,00
Dinas Perhubungan	6.413.732.086,00	6.228.595.727,00	97,11	6.340.822.791,00
Dinas Kominfo	5.390.459.137,00	4.931.346.454,00	91,48	5.148.484.206,00
Dinas PM & PTSP	4.016.473.000,00	3.818.343.136,00	95,07	3.784.736.829,00
Dinas Budparpora	4.436.532.397,00	4.265.260.370,00	96,14	4.147.363.429,00
Dinas Perpustakaan	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	92,17	3.340.386.062,00
Dinas Perdagangan	9.362.352.622,00	8.343.248.151,00	89,11	8.330.818.574,00
Bagian Pemerintahan	899.410.000,00	816.749.507,00	90,81	783.029.832,00
Bagian Organisasi	815.884.310,00	790.595.690,00	96,90	752.659.122,00
Bagian Hukum	864.232.000,00	829.661.789,00	96,00	1.167.982.365,00
Bagian PBJ & Adbang	1.667.521.476,00	1.652.305.058,00	99,09	1.531.030.620,00
Bagian Perekkesra	1.007.694.810,00	906.628.617,00	89,97	979.512.379,00
Bagian Umum	13.725.803.781,00	11.090.677.770,00	80,80	10.527.377.772,00
Sekretariat DPRD	18.225.445.841,00	17.377.019.689,00	95,34	18.575.840.357,00
BAPELITBANGDA	5.429.057.476,00	4.693.769.022,00	86,46	4.706.023.722,00
BKAD	29.584.637.209,00	18.764.087.938,00	63,43	20.477.087.237,00
Bependa	8.095.808.900,00	7.725.180.552,39	95,42	8.693.387.116,25
BKPSDM	5.903.398.559,00	5.690.093.810,00	96,39	5.494.527.396,00
Inspektorat	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	97,16	7.297.810.514,00
Kec Manguharjo	11.873.549.082,00	11.070.556.260,00	93,24	10.998.897.097,00

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Kec Kartoharjo	11.469.217.545,00	10.742.772.955,00	93,67	10.978.147.747,00
Kec Taman	11.508.809.855,00	10.266.975.319,00	89,21	11.216.851.061,00
Bakesbangpol	4.054.921.149,00	3.618.182.330,00	89,23	3.424.160.333,00
<b>Total</b>	<b>468.936.215.253,00</b>	<b>423.896.152.844,39</b>	<b>90,40</b>	<b>404.406.660.608,25</b>

### 5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>513.171.846.360,00</b>	<b>487.718.322.693,31</b>	<b>95,04</b>	<b>474.775.658.285,04</b>

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp487.718.322.693,31 atau mencapai 95,04% yang berarti sebesar Rp25.453.523.666,69 atau 4,96% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp513.171.846.360,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja barang dan jasa karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.2**  
**Belanja Barang dan Jasa**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.1.02 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>513.171.846.360,00</b>	<b>487.718.322.693,31</b>	<b>95,04</b>	<b>474.775.658.285,04</b>
<b>5.1.02.01 Belanja Barang</b>	<b>130.795.592.613,00</b>	<b>122.590.404.708,50</b>	<b>93,73</b>	<b>115.594.663.182,78</b>
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	129.792.145.529,00	121.594.690.615,50	93,68	114.728.050.077,78
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.003.447.084,00	995.714.093,00	99,23	866.613.105,00
<b>5.1.02.02 Belanja Jasa</b>	<b>204.871.335.191,00</b>	<b>191.169.925.758,63</b>	<b>93,31</b>	<b>183.234.906.322,00</b>
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	148.855.012.110,00	138.950.330.745,70	93,35	129.182.236.001,00

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan Asuransi	34.848.509.300,00	33.350.830.308,00	95,70	33.730.869.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	98.100.000,00	98.058.450,00	99,96	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.906.865.962,00	5.050.319.519,00	85,50	3.126.510.544,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.142.102.053,00	808.833.130,00	70,82	1.582.317.684,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	145.607.679,00	131.839.800,00	90,54	343.792.090,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.539.339.100,00	1.109.490.690,00	72,08	3.287.222.994,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.126.428.437,00	6.807.330.669,00	95,52	6.812.408.837,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	530.000.000,00	530.000.000,00	100,00	336.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek & Diklat	4.470.889.650,00	4.205.608.886,00	94,07	4.767.548.595,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah	208.480.900,00	127.283.560,93	61,05	66.000.377,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26.250.933.904,00</b>	<b>25.428.091.070,18</b>	<b>96,87</b>	<b>25.800.670.244,28</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.157.980.412,00	1.131.743.591,90	97,73	49.625.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	6.073.443.038,00	5.747.336.369,00	94,63	8.961.018.445,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	8.987.758.154,00	8.841.745.814,28	98,38	9.574.633.319,28
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	9.386.190.000,00	9.079.879.600,00	96,74	7.059.352.655,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	645.562.300,00	627.385.695,00	97,18	156.040.825,00

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2 )	5
<b>5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.184.775.959,00</b>	<b>41.205.029.504,00</b>	<b>93,26</b>	<b>37.852.741.707,00</b>
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.784.541.709,00	39.262.456.274,00	93,97	37.504.458.331,00
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.400.234.250,00	1.942.573.230,00	80,93	348.283.376,00
<b>5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>4.730.804.000,00</b>	<b>4.183.782.600,00</b>	<b>88,44</b>	<b>4.496.435.749,00</b>
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.464.604.000,00	3.926.482.600,00	87,95	2.653.357.899,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	266.200.000,00	257.300.000,00	96,66	1.843.077.850,00
<b>5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>16.493.491.830,00</b>	<b>17.756.446.336,00</b>	<b>107,66</b>	<b>15.861.064.197,98</b>
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	16.493.491.830,00	17.756.446.336,00	107,66	15.861.064.197,98
<b>5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>85.844.912.863,00</b>	<b>85.384.642.716,00</b>	<b>99,46</b>	<b>91.935.176.882,00</b>
5.1.02.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.2.1**  
**Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2 )	5
Dinas Pendidikan	55.607.019.271,00	53.079.016.505,01	95,45	47.949.446.184,98
Dinas Kesehatan PP & KB	154.977.198.817,00	150.714.595.708,50	97,25	167.437.182.354,00
Dinas PU TR	22.608.591.154,00	21.271.408.630,67	94,09	19.128.788.261,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.083.470.802,00	20.384.711.510,00	96,69	18.583.243.327,00
Satpol PP & Damkar	16.828.809.305,00	14.570.976.270,00	86,58	9.963.403.806,00
BPBD	1.925.294.000,00	1.906.036.750,00	99,00	2.200.383.870,00

<b>Belanja Barang dan Jasa OPD</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
Dinas Sosial	11.404.112.687,00	10.375.921.776,00	90,98	10.787.919.018,00
Dinas Tenaga Kerja	8.787.282.996,00	6.167.232.530,69	70,18	7.056.338.199,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	7.440.134.057,00	6.997.365.725,00	94,05	5.372.428.956,00
Dinas LH	13.777.060.928,00	13.111.415.204,26	95,17	13.566.223.428,00
Dispendukcapil	2.187.884.413,00	2.151.651.519,00	98,34	3.177.500.773,00
Dinas Perhubungan	10.479.618.202,00	10.305.567.592,21	98,34	10.279.376.199,00
Dinas Kominfo	25.889.039.121,00	25.784.803.453,00	99,60	20.283.478.049,00
Dinas PM & PTSP	3.228.379.247,00	3.104.851.437,00	96,17	2.473.397.565,00
Dinas Budparpora	12.067.435.519,00	11.997.219.231,90	99,42	13.110.882.006,00
Dinas Perpustakaan	2.991.832.538,00	2.824.534.718,40	94,41	2.633.971.756,00
Dinas Perdagangan	6.748.121.408,00	6.571.766.182,00	97,39	7.454.561.859,00
Bagian Pemerintahan	2.585.927.600,00	2.516.839.475,00	97,33	2.629.698.953,78
Bagian Organisasi	1.767.415.270,00	1.743.535.582,00	98,65	2.023.558.069,00
Bagian Hukum	1.502.806.358,00	1.447.167.083,00	96,30	1.423.924.604,00
Bagian PBJ & Adbang	1.534.866.261,00	1.525.127.316,00	99,37	1.609.600.453,28
Bagian Perekkesra	3.411.520.984,00	2.831.143.183,00	82,99	2.864.869.175,00
Bagian Umum	23.008.763.652,00	21.682.748.142,10	94,24	18.121.275.348,00
Sekretariat DPRD	28.274.585.713,00	25.300.933.755,00	89,48	22.850.435.952,00
BAPELITBANGDA	6.381.816.829,00	5.948.828.901,00	93,22	5.500.064.961,00
BKAD	25.160.823.179,00	23.056.547.075,00	91,64	17.679.599.807,00
Bependa	2.325.399.054,00	2.126.399.791,93	91,44	1.647.658.588,00
BKPSDM	5.667.400.905,00	5.342.016.703,00	94,26	6.099.082.501,00
Inspektorat	2.221.645.630,00	2.206.273.886,00	99,31	2.435.248.711,00
Kec Manguharjo	9.494.095.030,00	9.336.694.143,64	98,34	9.145.564.007,00
Kec Kartoharjo	8.814.481.218,00	8.613.550.630,00	97,72	8.410.792.712,00
Kec Taman	10.001.741.133,00	9.836.692.809,00	98,35	8.649.037.990,00
Bakesbangpol	2.987.273.079,00	2.884.749.474,00	96,57	2.226.720.842,00
<b>Total</b>	<b>513.171.846.360,00</b>	<b>487.718.322.693,31</b>	<b>95,04</b>	<b>474.775.658.285,04</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 Sekolah SDN dan SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.2.2**  
**Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	236.873.359,00	239.930.825,00	101,29	221.671.785,00
SDN 02 Kartoharjo	44.550.000,00	56.861.454,00	127,64	40.841.500,00
SDN 03 Kartoharjo				55.029.888,00
SDN 01 Klegén	241.323.300,00	263.821.160,00	109,32	254.981.483,00
SDN 02 Klegén	94.025.000,00	93.551.745,00	99,50	60.008.843,00
SDN 03 Klegén	263.909.100,00	263.909.058,00	100,00	223.955.353,00
SDN 04 Klegén	65.778.000,00	80.778.000,00	122,80	70.955.813,00
SDN Oro Oro Ombo	190.823.200,00	187.653.293,00	98,34	157.941.849,00
SDN 01 Rejomulyo	84.154.000,00	84.102.646,00	99,94	63.739.562,00
SDN 02 Rejomulyo				39.453.039,00
SDN 01 Kanigoro	64.300.000,00	64.543.864,00	100,38	38.835.144,00
SDN 02 Kanigoro	123.008.700,00	132.006.212,00	107,31	110.227.915,98
SDN 03 Kanigoro	110.680.000,00	110.077.417,00	99,46	120.507.902,00
SDN Sukosari	21.958.600,00	21.958.502,00	100,00	24.205.015,00
SDN Pilangbango	178.290.000,00	187.182.896,00	104,99	129.751.981,00
SDN 01 Tawangrejo	121.427.595,00	121.034.194,00	99,68	98.972.445,00
SDN 02 Tawangrejo	70.480.900,00	83.980.728,00	119,15	41.169.500,00
SDN Kelun	123.321.097,00	123.251.500,00	99,94	137.503.352,00
SDN 01 Manguharjo	180.654.200,00	185.773.127,00	102,83	183.233.853,00
SDN 01 Nambangan Lor	236.097.482,00	205.005.227,00	86,83	213.971.164,00
SDN 02 Nambangan Lor	120.680.000,00	120.677.090,00	100,00	113.591.872,00
SDN 01 Madiun Lor	88.380.000,00	88.397.666,00	100,02	93.945.392,00
SDN 02 Madiun Lor	87.262.500,00	87.307.553,00	100,05	66.809.371,00
SDN 03 Madiun Lor	456.159.200,00	438.484.270,00	96,13	329.131.318,00
SDN 04 Madiun Lor	281.440.000,00	279.399.458,00	99,27	225.542.477,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 05 Madiun Lor	317.640.722,00	369.603.950,00	1,16	385.550.620,00
SDN 01 Nambangan Kidul	94.680.000,00	94.883.828,00	100,22	95.922.150,00
SDN 02 Nambangan Kidul	97.141.450,00	95.887.500,00	98,71	66.289.695,00
SDN 03 Nambangan Kidul	235.813.000,00	238.552.000,00	101,16	192.308.540,00
SDN 04 Nambangan Kidul				92.814.277,00
SDN 01 Winongo	222.150.000,00	222.149.935,00	100,00	199.583.583,00
SDN 02 Winongo	55.440.000,00	55.439.872,00	100,00	48.226.200,00
SDN Ngegong	139.623.000,00	139.622.849,00	100,00	128.344.485,00
SDN Patihan	192.976.000,00	192.976.000,00	100,00	212.600.820,00
SDN 01 Pangongangan		243.360.630,00	0,00	47.556.650,00
SDN 02 Pangongangan				185.841.940,00
SDN Sogaten	153.418.000,00	153.417.242,00	100,00	101.821.421,00
SDN 01 Taman	361.104.100,00	371.939.712,00	103,00	404.856.809,00
SDN 02 Taman	57.492.000,00	57.491.364,00	100,00	60.339.206,00
SDN 03 Taman	61.934.900,00	59.665.855,00	96,34	75.351.010,00
SDN 01 Pandean	278.580.000,00	287.557.590,00	103,22	226.274.353,00
SDN 02 Pandean	241.062.690,00	241.061.493,00	100,00	215.071.448,00
SDN Banjarejo	330.316.730,00	303.201.647,00	91,79	204.283.783,00
SDN 01 Mojorejo	81.183.000,00	81.182.897,00	100,00	87.226.174,00
SDN 02 Mojorejo	401.494.150,00	401.403.085,00	99,98	333.681.968,00
SDN 01 Manisrejo	260.673.000,00	260.653.076,00	99,99	237.696.358,00
SDN 02 Manisrejo	243.365.000,00	228.393.100,00	93,85	146.065.875,00
SDN 03 Manisrejo	142.630.400,00	142.630.304,00	100,00	130.694.698,00
SDN 04 Manisrejo	157.160.000,00	157.303.044,00	100,09	161.899.402,00
SDN 01 Demangan	105.634.000,00	111.670.175,00	105,71	100.981.723,00
SDN 02 Demangan	124.030.000,00	124.030.500,00	100,00	108.401.550,00
SDN 01 Josenan	144.796.274,00	143.770.773,00	99,29	124.395.225,00
SDN 02 Josenan	147.577.450,00	147.570.724,00	100,00	98.127.515,00
SDN 03 Josenan	60.835.200,00	60.986.500,00	100,25	35.529.547,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN Kejuron	35.640.000,00	35.974.749,00	100,94	13.930.350,00
SDN Kuncen	64.735.450,00	73.323.390,00	113,27	48.203.615,00
SMP NEGERI 1	822.564.450,00	859.041.086,00	104,43	763.895.742,00
SMP NEGERI 2	902.660.000,00	851.291.301,00	94,31	797.584.841,00
SMP NEGERI 3	582.170.000,00	581.187.404,00	99,83	534.415.978,00
SMP NEGERI 4	941.304.900,00	998.195.541,00	106,04	879.707.562,00
SMP NEGERI 5	466.176.100,00	465.985.111,00	99,96	412.969.564,00
SMP NEGERI 6	668.020.000,00	666.671.908,00	99,80	638.660.059,00
SMP NEGERI 7	773.370.350,00	773.364.483,00	100,00	757.333.242,00
SMP NEGERI 8	538.985.000,00	473.446.485,00	87,84	391.839.451,00
SMP NEGERI 9	408.663.600,00	476.609.054,00	116,63	303.435.384,00
SMP NEGERI 10	510.898.700,00	580.587.818,00	113,64	394.497.575,00
SMP NEGERI 11	758.296.000,00	758.295.900,00	100,00	692.941.767,00
SMP NEGERI 12	589.195.050,00	589.189.281,00	100,00	627.220.706,00
SMP NEGERI 13	769.189.501,00	778.788.426,00	101,25	671.614.718,00
SMP NEGERI 14	288.400.000,00	288.400.869,00	100,00	309.098.802,00
<b>Total</b>	<b>17.314.596.400,00</b>	<b>17.756.446.336,00</b>	<b>102,55</b>	<b>15.861.064.197,98</b>

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan periode 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.2.3**  
**Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang	34.593.269.355,00	31.180.220.179,00	90,13	36.635.434.357,00
Belanja Jasa	44.923.007.748,00	48.646.782.419,00	108,29	48.869.595.226,00
Belanja Pemeliharaan	4.563.029.460,00	3.987.889.031,00	87,40	4.984.044.095,00
Belana Perjalanan Dinas	1.765.606.300,00	1.569.751.087,00	88,91	1.446.103.204,00
<b>Total Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>85.844.912.863,00</b>	<b>85.384.642.716,00</b>	<b>99,46</b>	<b>91.935.176.882,00</b>

### 5.2.1.3 BELANJA SUBSIDI

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	99.146.000,00	99.146.000,00	100	6.480.445.500,00

Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2023 sebesar Rp99.146.000,00 atau 100,00% yang berarti Rp0,00 atau 0,00% sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp99.146.000,00. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota. Perincian anggaran dan realisasi belanja Subsidi yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.3**  
**Belanja Subsidi**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.04.01. Belanja Subsidi kepada BUMN	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00	6.480.445.500,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>99.146.000,00</b>	<b>99.146.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.480.445.500,00</b>

### 5.2.1.4. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,72	11.562.623.718,00

Realisasi belanja hibah sebesar Rp32.355.896.005,00 atau mencapai 84,72% yang berarti sebesar Rp5.834.740.790,00 atau 15,28% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp38.190.636.795,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota

Madiun Nomor : 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/16/2023 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Realisasi belanja hibah tahun 2023 termasuk belanja hibah berupa bantuan kepada parpol pada tahun 2023 sebesar Rp950.563.500,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.4  
Belanja Hibah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.487.861.000,00	6.383.188.600,00	98,39	0,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	30.752.212.295,00	25.022.143.905,00	81,37	10.612.060.218,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	950.563.500,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>38.190.636.795,00</b>	<b>32.355.896.005,00</b>	<b>84,72</b>	<b>11.562.623.718,00</b>

#### **5.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Bantuan Sosial</b>	<b>32.772.801.700,00</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>97,05</b>	<b>33.248.185.680,00</b>

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp31.804.857.500,00 atau mencapai 97,05% yang berarti sebesar Rp967.994.200,00 atau 2,95% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.772.801.700,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.1.5  
Belanja Bantuan Sosial**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	28.044.911.700,00	27.376.940.000,00	97,62	28.528.115.680,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	00,00	113.400.000,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	4.727.890.000,00	4.427.917.500,00	93,66	4.606.670.000,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>32.772.801.700,00</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>97,05</b>	<b>33.248.185.680,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada Individu terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP.

## 5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal</b>	<b>222.872.275.205,00</b>	<b>217.790.302.662,69</b>	<b>97,72</b>	<b>232.434.449.701,97</b>

Realisasi jenis belanja modal sebesar Rp217.790.302.662,69 atau mencapai 97,72% yang berarti sebesar Rp5.081.972.542,31 atau 2,28% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp222.872.275.205,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja

modal aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp217.790.302.662,69 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp232.434.449.701,97 terjadi penurunan sebesar Rp14.644.147.039,28 atau lebih rendah 6,72%. Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.2**  
**Belanja Modal**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.1 Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2 Peralatan & mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00
5.2.2.3 Gedung & bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97
5.2.2.4 Jalan, irigasi, jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00
5.2.2.5 Aset tetap lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>222.872.275.205,00</b>	<b>217.790.302.662,69</b>	<b>97,72</b>	<b>232.434.449.701,97</b>

### 5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	0,00	0,00	00,00	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2023 tidak ada alokasi anggaran belanja modal tanah

### 5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp71.585.868.051,04 atau mencapai 97,87% yang berarti sebesar Rp1.559.135.197,96 atau 2,13% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp73.145.003.249,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.585.868.051,04 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp53.011.211.346,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.574.656.705,04 atau lebih tinggi 25,95%. Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.2.2.2**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>73.145.003.249,00</b>	<b>71.585.868.051,04</b>	<b>97,87</b>	<b>53.011.211.346,00</b>
5.2.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.660.786.600,00	2.654.100.000,00	99,75	3.436.776.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	3.377.556.750,00	3.243.522.130,00	96,03	26.814.906.500,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	81.655.000,00	81.120.000,00	99,34	327.688.765,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	129.870.000,00	128.500.000,00	98,95	16.650.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	5.137.916.366,00	4.624.879.550,00	90,01	9.475.981.185,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	923.791.522,00	872.617.018,00	94,46	910.538.025,00
5.2.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	5.571.940.953,00	4.804.418.371,00	86,23	1.957.878.063,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Komputer	50.195.953.480,00	50.089.399.142,00	99,79	2.628.164.333,00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.530.000,00	25.308.000,00	99,13	195.950.000,00
5.2.3.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	0,00	1.490.625,00
5.2.3.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.999.563,00
5.2.3.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.080.000,00	35.030.000,00	97,09	147.073.890,00
5.2.3.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu	3.076.259.437,00	3.058.049.636,04	99,41	4.549.069.492,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	127.800.000,00	126.928.500,00	99,32	200.220.000,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	999.056.841,00	1.048.869.678,00	104,99	1.852.590.889,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	800.806.300,00	793.126.026,00	99,04	486.234.016,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.2.1**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	51.579.315.135,00	51.496.407.814,00	99,84	2.239.884.949,00
Dinas Kesehatan KB	9.309.472.987,00	8.085.234.765,00	86,85	3.970.394.299,00
Dinas PU TR	2.113.875.000,00	2.109.075.000,00	99,77	1.336.670.000,00
Dinas Perumahan	2.268.892.444,00	2.261.467.636,04	99,67	7.607.045.467,00
Dinas Satpol PP & Damkar	316.991.500,00	307.330.000,00	96,95	663.264.799,00
BPBD	29.011.000,00	29.010.182,00	100,00	44.639.900,00
Dinas Sosial	281.021.158,00	263.900.000,00	93,91	873.645.000,00
Dinas Tenaga Kerja	200.238.928,00	193.032.738,00	96,40	652.499.856,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	348.907.743,00	343.989.456,00	98,59	370.322.905,00
Dinas LH	794.551.750,00	759.652.700,00	95,61	3.704.180.600,00
Dispendukcapil	74.506.381,00	74.480.000,00	99,96	836.277.650,00
Dinas Perhubungan	1.410.713.678,00	1.392.407.274,00	98,70	2.531.153.000,00
Dinas Infokom	156.500.000,00	153.440.000,00	98,04	759.037.500,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	58.700.000,00	57.996.900,00	98,80	530.202.700,00
Dinas Budparpora	17.800.000,00	17.300.000,00	97,19	157.497.980,00
Dinas Perpustakaan	12.210.000,00	11.400.000,00	93,37	1.049.639.070,00

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Perdagangan	143.168.000,00	137.445.700,00	96,00	273.681.600,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Bagian Organisasi	26.267.344,00	26.267.344,00	100,00	0,00
Bagian Umum	1.504.255.320,00	1.474.385.000,00	98,01	20.057.377.490,00
Bagian Hukum	247.881.926,00	245.459.830,00	99,02	6.451.875,00
Bagian Perekkesra	3.265.065,00	2.865.000,00	87,75	56.295.000,00
Bagian Adbang	48.277.600,00	48.257.600,00	99,96	119.646.600,00
Sekretariat DPRD	185.433.000,00	150.927.000,00	81,39	291.763.037,00
BPK SDM	242.218.145,00	201.890.000,00	83,35	0,00
BKAD	855.100.000,00	842.070.000,00	98,48	178.000.000,00
Bependa	254.870.280,00	244.700.000,00	96,01	177.300.000,00
BAPELITBANGDA	45.077.300,00	43.925.000,00	97,44	598.494.900,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	1.356.918.000,00
Kec Kartoharjo	173.508.960,00	171.316.142,00	98,74	980.790.734,00
Kec Manguharjo	147.685.500,00	146.125.720,00	98,94	784.393.845,00
Kec Taman	226.714.402,00	226.237.950,00	99,79	802.767.590,00
Bakesbangpol	68.572.703,00	67.871.300,00	98,98	0,00
<b>Total</b>	<b>73.145.003.249,00</b>	<b>71.585.868.051,04</b>	<b>97,87</b>	<b>53.011.211.346,00</b>

### 5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>83.254.511.750,00</b>	<b>80.940.539.683,65</b>	<b>97,22</b>	<b>72.843.838.757,97</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp80.940.539.683,65 atau 97,22% yang berarti Rp2.313.972.066,35 atau mencapai 2,78% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam

APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.254.511.750,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.2.2.3**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	82.001.521.750,00	79.753.930.683,65	97,26	71.911.964.241,57
5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	687.590.000,00	681.564.000,00	99,12	265.076.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	115.738.000,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000,00	505.045.000,00	89,33	551.060.516,40

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.3.3.1**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	5.403.652.071,00	4.344.326.045,50	80,40	10.981.678.341,04
Dinas Kesehatan KB	24.630.114.480,00	24.557.084.208,74	99,70	5.075.788.557,71
Dinas PU TR	35.595.735.500,00	34.910.704.931,00	98,08	25.259.479.700,00
Dinas Perkim	10.763.571.789,00	10.648.663.456,29	98,93	14.068.662.615,45

<b>Modal Gedung dan Bangunan OPD</b>	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (3/2)</b>	<b>5</b>
Dinas Satpol PP	300.000.000,00	250.860.057,57	83,62	0,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	36.630.000,00	36.000.000,00	98,28	146.345.691,00
Dinas LH	2.457.500.000,00	2.209.603.137,04	89,91	759.483.637,69
Dispendukcapil	216.450.000,00	212.520.600,00	98,18	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi	0,00	0,00	0,00	394.801.000,00
Perpustakaan & Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	957.523.441,96
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	214.666.000,00
Bapenda	19.286.250,00	19.086.250,00	98,96	149.774.400,00
BK & PSDM	0,00	0,00	0,00	190.763.000,00
Inspektorat	497.750.000,00	461.606.622,51	92,74	196.549.600,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	3.902.496.585,12
Kec Manguharjo	3.275.821.660,00	3.232.120.375,00	98,67	5.904.131.076,00
Kec Taman	58.000.000,00	57.964.000,00	99,94	4.641.695.112,00
BAPELITBANGDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>83.254.511.750,00</b>	<b>80.940.539.683,65</b>	<b>97,22</b>	<b>72.843.838.757,97</b>

#### 5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>64.036.113.165,00</b>	<b>62.832.477.443,00</b>	<b>98,12</b>	<b>103.137.296.907,00</b>

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp62.832.477.443,00 atau mencapai 98,12% yang berarti Rp1.203.635.722,00 atau 1,88% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp64.036.113.165,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.4

#### Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.04.01 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>64.036.113.165,00</b>	<b>62.832.477.443,00</b>	<b>98,12</b>	<b>103.137.296.907,00</b>
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	35.368.976.275,00	34.989.390.906,00	98,93	59.563.387.262,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	24.934.457.040,00	24.239.146.850,00	97,21	43.115.947.645,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	3.157.850.000,00	3.125.017.187,00	98,96	457.962.000,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	0,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.2.4.1**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Kesehatan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	425.106.000,00
Dinas PU TR	53.337.576.490,00	52.306.847.300,00	98,07	95.003.626.595,00
Dinas Perkim	695.000.000,00	689.991.000,00	99,28	1.072.533.772,00
Dinas Satpol PP	202.130.000,00	201.512.000,00	99,69	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.031.000,00	204.129.475,00	99,08	525.135.000,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
Bapenda	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	0,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00	00,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	4.430.391.947,00	4.385.444.607,00	98,99	2.584.059.786,00
Kecamatan Taman	4.567.953.878,00	4.545.630.561,00	99,51	3.493.979.754,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	00,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.036.113.165,00</b>	<b>62.832.477.443,00</b>	<b>98,12</b>	<b>103.137.296.907,00</b>

### 5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.436.647.041,00</b>	<b>2.431.417.485,00</b>	<b>99,79</b>	<b>3.442.102.691,00</b>

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.431.417.485,00 atau mencapai 99,79% yang berarti Rp5.229.556,00 atau 0,21% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun

anggaran 2023 sebesar Rp2.436.647.041,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.2.2.5**  
**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya</b>	<b>2.436.647.041,00</b>	<b>2.431.417.485,00</b>	<b>99,79</b>	<b>3.442.102.691,00</b>
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	135.737.440,00	73.487.150,00	54,14	145.110.700,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	298.400.000,00	263.074.464,00	88,16	244.755.000,00
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	00,00	29.342.850,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	145.000.000,00	43.465.000,00	29,98	1.129.431.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.857.509.601,00	2.051.390.871,00	110,44	1.451.797.553,00
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.2.5.1**  
**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	2.051.058.601,00	2.181.483.335,00	106,36	1.456.597.553,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00
Dinas PU TR	120.000.000,00	19.545.000,00	16,29	100.000.000,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	00,00	748.883.000,00

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	43.847.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga	0,00	0,00	0,00	244.755.000,00
Bagian Pereksos	175.000.000,00	141.000.000,00	80,57	0,00
Dinas Komunikasi	25.000.000,00	23.920.000,00	95,68	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	98.901.000,00
Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	29.342.850,00
Dinas Perpustakaan	65.588.440,00	65.469.150,00	99,82	278.110.700,00
<b>Total</b>	<b>2.436.647.041,00</b>	<b>2.431.417.485,00</b>	<b>99,79</b>	<b>3.442.102.691,00</b>

### 5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

#### 5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4.017.860.642,00</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>30,83</b>	<b>2.502.082.962,00</b>

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp1.238.717.822,00 atau mencapai 30,83% yang berarti Rp2.779.142.820,00 atau 69,17% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.017.860.642,00.

Perincian realisasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.3.1**  
**Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	551.363.000,00	262.205.712,00
Belanja Jasa	0,00	1.708.752.850,00
Belanja Perjalanan	0,00	321.160.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Pengembalian	641.753.696,00	209.964.400,00
Pengembalian Pajak	26.011.126,00	0,00
Pengembalian Retribusi	17.576.000,00	0,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah	2.014.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>

Perincinan Dinas yang menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga tersaji pada table dibawah ini :

**Tabel 5.2.3.2**  
**OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1	2
Dinas Pendidikan	640.715.446,00
Dinas Pekerjaan Umum	5.176.000,00
Dinas Perhubungan	13.159.750,00
Dinas Kebudayaan	12.400.000,00
Dinas Perdagangan	551.363.000,00
BKAD	1.038.250,00
Kelurahan Klegen	2.014.000,00
Badan Pendapatan Daerah	12.851.376,00
<b>Total</b>	<b>1.238.717.822,00</b>

## 5.3. PEMBIAYAAN

### 5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

#### 5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	191.243.672.447,00	191.243.672.447,43	100,00	295.936.667.818,14

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 sebesar Rp191.243.672.447,43. dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp295.936.667.818,14 terjadi penurunan sebesar Rp104.692.995.370,71 atau lebih rendah 42,26% .

#### 5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	1.198.000,00	100,00	800.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2023 terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.198.000,00

## 5 . 4 . SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	3	5
SiLPA	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

Jumlah tersebut merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.4.1**  
**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Surplus (Defisit)	(77.291.265.294,97)	(104.693.795.370,71)
Pembiayaan Neto	191.244.870.447,43	295.937.467.818,14
<b>Total</b>	<b>113.953.605.152,46</b>	<b>191.243.672.447,43</b>

## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL**

### **6.1. SAL Awal**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal</b>	<b>191.243.672.447,43</b>	<b>295.936.667.818,14</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2023 dan pada tanggal 1 Januari 2022.

### **6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan</b>	<b>191.243.672.447,43</b>	<b>295.936.667.818,14</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

### **6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>Sisa lebih /kurang pembiayaan tahun berjalan</b>	<b>113.953.605.152,46</b>	<b>191.243.672.447,43</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto tahun berjalan.

### **6.4. SAL Akhir**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>SAL Akhir</b>	<b>113.953.605.152,46</b>	<b>191.243.672.447,43</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

## **PENJELASAN POS - POS NERACA**

### **7.1. ASET**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Aset</b>	<b>2.829.387.208.598,82</b>	<b>2.813.637.454.500,29</b>

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.813.637.454.500,29. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82 dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.813.637.454.500,29, terjadi penurunan sebesar Rp15.749.754.098,53

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1  
Aset Pemerintah**

<b>Aset</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
Aset lancar	146.619.826.286,07	220.864.402.624,77
Investasi	155.818.150.212,56	155.830.753.717,25
Aset Tetap	2.381.738.610.915,86	2.304.956.764.976,94
Aset Lainnya	145.210.621.184,33	131.985.533.181,33
<b>Total</b>	<b>2.829.387.208.598,82</b>	<b>2.813.637.454.500,29</b>

### 7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Aset Lancar</b>	<b>146.619.826.286,07</b>	<b>220.864.402.624,77</b>

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp220.864.402.624,77. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp220.864.402.624,77 terjadi penurunan sebesar Rp74.244.576.338,70.

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1  
Aset Lancar**

Aset Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas di kas daerah	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
2. Deposito Berjangka 1 Bulan	0,00	0,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	601.132.820,00	0,00
4. Kas di bendahara penerimaan	10.230.722,00	10.236.077,00
5. Kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
6. Kas di BLUD Puskesmas	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
7. Kas Lainnya BOS	187.018.419,15	474.385.599,35
8. Kas Lainnya BOP	0,00	0,00
9. Kas Lainnya BOK	423.463.174,00	0,00
9. Piutang Pajak Daerah	11.995.973.053,35	11.226.316.634,00
10. Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.296.540.965,20)	(5.208.614.573,93)
11. Piutang Retribusi Daerah	4.625.019.057,00	7.217.998.007,00
12. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.068.159.551,60)	(2.959.719.866,00)
13. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	110.358.980,00	121.517.355,00
14. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(110.358.980,00)	(121.517.355,00)
15. Piutang Lain-lain	8.072.837.702,85	6.558.726.241,18
16. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(165.826.573,75)	(151.600.739,41)
17. Persediaan	13.537.733.840,96	12.928.832.764,50
18. Belanja dibayar dimuka	364.051.750,00	0,00
<b>Total</b>	<b>146.619.826.286,07</b>	<b>220.864.402.624,77</b>

## 7.1.1.1. Kas dan Bank

### 7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>67.071.188.644,14</b>	<b>119.817.397.122,23</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum (RKUD) Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23 terjadi penurunan sebesar Rp52.746.208.478,07

Kas di kas daerah merupakan saldo rekening Bank Jatim 0051021333 RKUD Kota Madiun. Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.1  
Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Bank Jatim 0051021333	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
<b>Total</b>	<b>67.071.188.644,14</b>	<b>119.817.397.122,23</b>

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.1  
Rincian Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	<b>61.881.641.683,14</b>	<b>106.742.828.817,23</b>
2. Kas yang ditentukan penggunaannya ( <i>mandatory</i> )	<b>5.189.546.961,00</b>	<b>13.074.568.305,00</b>
- DBH CHT	4.569.517.376,00	4.639.365.839,00
- DAK Non Fisik Total	620.029.585,00	8.435.202.466,00
a. Tunjangan Profesi Guru (TPG)	595.344.300,00	7.690.611.100,00
b. Tunjangan Non Profesi Guru (TPG)	24.685.285,00	73.000.000,00
c. DAK Non Fisik	0,00	671.591.366,00
<b>Total</b>	<b>67.071.188.644,14</b>	<b>119.817.397.122,23</b>

### 7.1.1.1.2. Deposito

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Deposito	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2023.

### 7.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	601.132.820,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran BKAD yang berasal dari penerbitan SP2D tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1697/LS/2023, SP2D 1698/LS/2023, SP2D 1709/LS/2023 dan SP2D Nomor 1710/LS/2023 untuk pembayaran BPJS Bulan Juli sd Bulan Desember 2023 yang telah terkirim ke Bank Jatim dan baru ditransfer ke rekening BPJS di tanggal 2 Januari 2024. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp601.132.820,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp601.132.820,00. Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023. Kas dibendahara pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu SMPN, SDN, Puskesmas, Kelurahan, Kas di Bendahara BTT dan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun. Rekening bendahara pengeluaran telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/306/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/263/2022 tentang Penunjukan Bendahara Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dan dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/313/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023.

#### 7.1.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>10.230.722,00</b>	<b>10.236.077,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.355. Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023. Kas di bendahara penerimaan terdiri dari saldo kas tunai kas di bendahara penerimaan OPD dan saldo kas di rekening penampungan penerimaan. Rekening penampungan penerimaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun dan Keputusan Walikota Madiun Nomor 900-401.202/363/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Retribusi Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor dan E-tilang pada Dinas Perhubungan, Keputusan Walikota Madiun Nomor 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Madiun pada Badan Pendapatan Daerah, dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/312/2021 tentang Penunjukan Bank Rekening Penampungan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Pemerintah Kota Madiun pada Dinas Perdagangan. Rincian kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.4**  
**Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Bendahara Penerimaan RSUD	4.975.722,00	2.574.077,00
2. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	5.255.000,00	7.662.000,00
<b>Total</b>	<b>10.230.722,00</b>	<b>10.236.077,00</b>

#### 7.1.1.1.5. Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kas di BLUD RSUD</b>	<b>38.758.539.712,32</b>	<b>64.695.549.324,61</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang merupakan saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD RSUD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 terjadi penurunan sebesar Rp25.936.009.612,29.

Perincian kas di BLUD RSUD Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.5**  
**Kas BLUD RSUD**

Kas di BLUD RSUD	Nomer Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
1. Giro Bank Jatim	0051035160	38.500.313.570,14	54.461.230.475,85
2. Tabungan Bank Mandiri	171-00-1250000-8	103.148.530,38	80.171.524,96
3. Tabungan BRI	0045-01-001272-56-9	102.945.401,80	102.259.257,80
4. Tabungan BNI	8125909889	52.132.210,00	51.888.066,00
5. Tabungan Muamalat	7450015607	0,00	0,00
6. Deposito Bank Mandiri	AF354424	0,00	2.000.000.000,00
7. Deposito BNI	PAB1847464	0,00	2.000.000.000,00
8. Deposito Bank BTN	A2111867	0,00	4.000.000.000,00
9. Deposito Bank BSI	1088930	0,00	2.000.000.000,00
<b>Total</b>		<b>38.758.539.712,32</b>	<b>64.695.549.324,61</b>

#### 7.1.1.1.6. Kas di BLUD Puskesmas/JKN

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kas di BLUD</b>	<b>7.503.164.480,85</b>	<b>6.254.896.034,24</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo Kas di Bank pada tanggal

31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD Puskesmas/JKN pada tanggal 31 Desember 2023 Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24 terjadi kenaikan sebesar Rp1.248.268.446,61. Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.6**  
**Kas BLUD Puskesmas**

<b>Kas di BLUD Puskesmas</b>	<b>Nomer Rekening</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
1. BLUD Puskesmas Ngegong	0051036131	764.180.165,12	708.009.270,51
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	0051036123	1.692.218.890,43	1.251.913.547,47
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	0051036158	2.057.882.759,58	1.968.876.512,77
4. BLUD Puskesmas Demangan	0051036140	720.386.632,28	466.279.812,33
5. BLUD Puskesmas Sukosari	0051036166	1.082.810.835,20	968.258.539,85
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	0051036174	1.185.685.198,24	891.558.351,31
<b>Total</b>		<b>7.503.164.480,85</b>	<b>6.254.896.034,24</b>

#### **7.1.1.1.7. Kas Lainnya**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Kas Lainnya</b>	<b>610.481.593,15</b>	<b>474.385.599,35</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya yang bersasal dari sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN, SMPN, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 474.385.599,35. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.385.599,35. terjadi kenaikan sebesar Rp136.095.993,80.

Di tahun 2023 ada beberapa sekolah dasar yang diregrouping dan berkewajiban mengembalikan Dana BOS berdasarkan :

1. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-19/PK/PK.3/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Tentang Pemantauan Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022 ;
2. Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/282/2022 Tentang Perubahan Dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Madiun serta Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/3740/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP. Dan telah ditindaklanjuti pengembalian dana BOS sebesar Rp1.588.088,06 ke Kasda dari SDN 03 Kartoharjo sebesar Rp750.811,14 ; SDN 02 Rejomulyo sebesar Rp196.561,40 ; SDN 02 Nambangan Kidul sebesar Rp390.304,97 dan SDN 01 Pangongangan sebesar Rp250.410,55. Pengembalian dana BOS Tahap I sebesar Rp101.019.166,00 dari SDN 03 Kartoharjo sebesar Rp23.999.298,00, SDN 02 Rejomulyo sebesar Rp 20.275.173,00, SDN 02 Nambangan Kidul sebesar Rp31.499.695,00, SDN 01 pangongangan sebesar Rp25.245.000,00.

Pengembalian BOS Kinerja pada SDN 02 Klegen sebesar Rp80.000.000,00 karena pergantian satuan pendidik psp angkatan III berdasarkan :

1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3574/CI/DM.00.02/2023 perihal Pergantian Satuan Pendidikan PSP angkatan III ;
2. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/4190/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP Reguler Tahap I dan BOSP Kinerja 2023 ;

Pengembalian bos kinerja karena regrouping pada sdn 03 kartoharjo sebesar Rp22.500.000 berdasarkan

1. Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/282/2022 Tentang Perubahan Dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Madiun
2. Surat Dinas Pendidikan Nomor 420/4967/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP Reguler Tahap II 2023 dan BOSP Kinerja 2023.

Seluruh sekolah negeri telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran BOS dan BOP PAUD pada tanggal 31 Desember 2023. Rekening Bendahara Pengeluaran BOS sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/296/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.385.599,35 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.1.7  
Kas Lainnya**

<b>Kas Lainnya</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
1. Dana BOS SDN	40.111.846,78	105.196.147,98
2. Dana BOS SMPN	146.906.572,37	360.397.741,37 ,00
3 Kas Lainnya BOP PAUD	0,00	0,00
4 Kas Lainnya BOK	423.463.174,00	0,00
5 Utang PFK		8.791.710,00
<b>Total</b>	<b>610.481.593,15</b>	<b>474.385.599,35</b>

### **7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>11.995.973.053,35</b>	<b>11.226.316.634,00</b>

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00 terjadi kenaikan sebesar Rp769.654.419,35 atau sebesar 6,85%.

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.2.a**  
**Piutang Pajak Daerah**

<b>Perubahan 2023</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (1 + 2 - 3)</b>
Pajak hotel	96.796.634,00	8.034.758.525,00	8.130.855.159,00	700.000,00
Pajak restoran	500.544.088,00	22.941.828.006,00	23.343.654.772,00	98.717.322,00
Pajak hiburan	17.708.500,00	1.828.328.751,00	1.845.737.251,00	300.000,00
Pajak reklame	122.235.590,00	2.377.338.769,00	2.304.955.619,00	194.618.740,00
Pajak penerangan jalan	9.192.539,00	25.674.378.651,18	23.482.333.529,83	2.201.237.660,35
Pajak parkir	1.072.000,00	1.700.245.616,00	1.683.862.056,00	17.455.560,00
Pajak air tanah	1.483.530,00	321.693.220,84	318.395.998,84	4.780.752,00
PBB	10.423.184.353,00	22.885.528.900,00	23.884.649.634,00	9.424.063.619,00
BPHTB	54.099.400,00	28.519.672.350,00	28.519.672.350,00	54.099.400,00
	<b>11.226.316.634,00</b>	<b>114.283.772.789,02</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>11.995.973.053,35</b>
				<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023</b>
				<b>4.296.540.965,20</b>
				<b>Piutang Pajak Daerah Neto Per 31 Desember 2023</b>
				<b>7.699.432.088,15</b>

### 1. Pajak Hotel

Pajak hotel terdiri dari hotel, rumah penginapan dan rumah kos. Piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki piutang sebesar Rp700.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang pajak rumah kos dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang tahun 2020 sebesar Rp160.000,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp360.000,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp180.000,00

Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak hotel sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak hotel akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak hotel.

## **2. Pajak Restoran**

Pajak restoran terdiri dari restoran dan catering. Piutang pajak restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.717.322,00. Dari total piutang tersebut terdiri dari piutang pajak restoran sebesar Rp53.028.335,00 dan piutang jasa boga/catering sebesar Rp45.688.987,00.

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak restoran sebesar Rp70.540.500,00 yang terdiri dari piutang pajak restoran :
  - Tahun 2010 sebesar Rp4.706.000,00
  - Tahun 2011 sebesar Rp1.334.500,00
  - Tahun 2012 sebesar Rp64.200.000,00
  - Tahun 2016 sebesar Rp150.000,00
  - Tahun 2017 sebesar Rp150.000,00
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak jasa boga/catering sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak restoran akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak restoran.

## **3. Pajak Hiburan**

Saldo piutang pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp300.000,00. Piutang pajak tersebut merupakan piutang pajak tahun 2022 pada wajib pajak Cave Diva, Jl. Mancung Sari.

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak hiburan sebesar Rp14.565.000,00 yang terdiri dari piutang pajak hiburan :
  - Tahun 2010 sebesar Rp12.225.000,00
  - Tahun 2011 sebesar Rp1.665.000,00
  - Tahun 2012 sebesar Rp675.000,00
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak hiburan tontonan film sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak hiburan akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak hiburan.

## **4. Pajak Reklame**

Piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp194.618.740,00

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak reklame sebesar Rp18.262.380,00 yang terdiri dari piutang pajak reklame :
  - Tahun 2010 sebesar Rp3.337.900,00
  - Tahun 2011 sebesar Rp355.000,00
  - Tahun 2012 sebesar Rp856.500,00
  - Tahun 2015 sebesar Rp1.611.500,00
  - Tahun 2016 sebesar Rp5.698.200,00
  - Tahun 2017 sebesar Rp6.403.280,00
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak hiburan tontonan film sebesar Rp1.075,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak reklame akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak reklame.

#### **5. Pajak Penerangan Jalan**

Piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.201.237.660,35 Piutang ini adalah piutang tahun 2022 sebesar Rp3.007.275,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp2.198.230.385,35

- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp10.547,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak penerangan jalan akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak penerangan jalan.

#### **6. Pajak Parkir**

Piutang pajak parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.455.560,00 yang merupakan piutang pajak dari hasil SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) yang diterbitkan tahun 2023 pada wajib pajak Jatim Parking Center Jl. Dr. Soetomo No. 53 Kota Madiun untuk masa pajak April 2022 s/d Desember 2022.

- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak parkir sebesar Rp1.010,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak parkir akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak parkir.

#### **7. Pajak Air Tanah**

Piutang pajak Air tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.780.752,00

- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak air tanah sebesar Rp1.050,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak

air tanah akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak air tanah.

## 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

PBB mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.424.063.619,00

- SPPT PBB yang terbit di tahun 2023 sebesar Rp24.541.199.969,00
- Terdapat mutasi pelayanan yang menambah jumlah SPPT PBB awal tahun yang telah diterbitkan sebesar Rp457.835.855,00 dan terdapat mutasi pelayanan yang mengurangi jumlah SPPT PBB awal tahun 2023 sebesar Rp215.664.109,00
- Terdapat pelunasan menggunakan STTS PBB yang mengurangi jumlah saldo awal sebesar Rp570.366,00
- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang PBB tahun 2002 s/d 2017 sebesar Rp1.997.624.611,00
- Terdapat realisasi piutang tahun 2002 s/d 2017 yang telah dilakukan penghapusan yang dapat mengurangi nominal penghapusan piutang pajak daerah yaitu sebesar Rp100.352.162,00

## 9. Pajak BPHTB

Pajak BPHTB mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp54.099.400,00 yang terdiri dari piutang dari hasil terbitnya SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) untuk tahun :

- 2021 sebesar Rp51.299.400,00 dan,
- 2022 sebesar Rp2.800.000,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun,, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	UmurPiutang	KualitasPiutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.2.b**  
**Umur Piutang Pajak Daerah**

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th< 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak hotel	0,00	180.000,00	520.000,00	700.000,00
Pajak restoran	0,00	87.524.057,00	11.193.265,00	98.717.322,00
Pajak hiburan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Pajak reklame	125.425.230,00	11.268.150,00	57.925.360,00	194.618.740,00
Pajak penerangan jalan	2.198.230.385,35	3.007.275,00	0,00	2.201.237.660,35
Pajak parkir	17.455.560,00	0,00	0,00	17.455.560,00
Pajak air tanah	3.297.222,00	1.304.814,00	178.716,00	4.780.752,00
PBB	3.460.446.913,00	2.063.199.405,00	3.900.417.301,00	9.424.063.619,00
BPHTB	0,00	2.800.000,00	51.299.400,00	54.099.400,00
	<b>5.804.855.310,35</b>	<b>2.169.583.701,00</b>	<b>4.021.534.042,00</b>	<b>11.995.973.053,35</b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
Penyisihan pajak	<b>58.048.553,10</b>	<b>216.958.370,10</b>	<b>4.021.534.042,00</b>	<b>4.296.540.965,20</b>
	<b>5.746.806.757,25</b>	<b>1.952.625.330,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699.432.088,15</b>

### 7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>4.625.019.057,00</b>	<b>7.217.998.007,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.217.998.0007,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.217.998.0007,00 terjadi penurunan

sebesar Rp2.592.978.950,00. Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.3**  
**Piutang Retribusi Daerah**

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 1 + 2 - 3</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	7.217.998.007,00	11.295.836.565,00	13.888.815.515,00	4.625.019.057,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Retribusi Daerah 2023</b>	<b>7.217.998.007,00</b>	<b>11.295.836.565,00</b>	<b>13.888.815.515,00</b>	<b>4.625.019.057,00</b>
			<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2023</b>	<b>(2.068.159.551,60)</b>
			<b>Piutang Retribusi Daerah Netto 2023</b>	<b>2.556.859.505,40</b>

**Tabel 7.1.1.3.a**  
**Piutang Retribusi OPD**  
**Per 31 Desember 2023**

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 1 + 2 - 3</b>
<b>1. Dinas Perumahan dan Pemukiman</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Dinas Komunikasi dan Informasi</b>	<b>3.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.000,00</b>	<b>0,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Dinas Budparpora</b>	<b>184.591.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.591.936,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	184.591.936,00	0,00	0,00	184.591.936,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. BKPSDM</b>	<b>0,00</b>	<b>216.125.000,00</b>	<b>176.450.000,00</b>	<b>39.675.000,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	216.125.000,00	176.450.000,00	39.675.000,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
	1	2	3	4 = 1 + 2 – 3
<b>4. BPKAD</b>	<b>1.924.099.651,00</b>	<b>3.481.290.039,00</b>	<b>3.681.041.699,00</b>	<b>1.724.347.991,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	1.924.099.651,00	3.481.290.039,00	3.681.041.699,00	1.724.347.991,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Dinas Perdagangan</b>	<b>5.105.708.420,00</b>	<b>7.581.421.526,00</b>	<b>10.027.725.816,00</b>	<b>2.659.404.130,00</b>
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	5.105.708.420,00	7.581.421.526,00	10.027.725.816,00	2.659.404.130,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Piutang Retribusi Daerah 2023</b>	<b>7.217.998.007,00</b>	<b>11.295.836.565,0</b>	<b>13.888.815.515,00</b>	<b>4.625.019.057,00</b>
		<b>Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2023</b>		<b>(2.068.159.551,60)</b>
		<b>Piutang Retribusi Daerah Netto 2023</b>		<b>2.556.859.505,40</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per OPD per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.3.b**  
**Umur Piutang Retribusi Daerah**

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
<b>Piutang Retribusi Daerah</b>				
1. Dinas Perumahan, Pemukiman	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2. Dinas Budparpora	0,00	0,00	184.591.936,00	184.591.936,00

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
3. BKPSDM	39.675.000,00	0,00	0,00	39.675.000,00
3. BKAD	1.366.126.840,00	10.821.600,00	347.399.551,00	1.724.347.991,00
4. Dinas Perdagangan	540.135.220,00	670.902.640,00	1.448.366.270,00	2.659.404.130,00
<b>Total Piutang Retribusi 2023</b>	<b>1.962.937.060,00</b>	<b>681.724.240,00</b>	<b>1.980.357.757,00</b>	<b>4.625.019.057,00</b>
<b>Penyisihan Piutang Retribusi 2023</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Piutang Retribusi 2023</b>	<b>(19.629.370,60)</b>	<b>(68.172.424,00)</b>	<b>(1.980.357.757,00)</b>	<b>(2.068.159.551,60)</b>
<b>Piutang Retribusi Netto 2023</b>	<b>1.943.307.689,40</b>	<b>613.551.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556.859.505,40</b>

#### 7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Bagian lancar tagihan penjualan angsuran</b>	<b>110.358.980,00</b>	<b>121.517.355,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp121.517.355,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp121.517.355,00 mengalami penurunan karena adanya realisasi piutang sebesar Rp11.158.375,00.

Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2023.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.4.a**  
**Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	121.517.355,00	0,00	11.158.375,00	110.358.980,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	0,00	0,00	0,00	(110.358.980,00)
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2023</b>				<b>0,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.4.b**  
**Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**  
**Per 31 Desember 2023**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	36.816.850,00	36.816.850,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	1.067.130,00	1.067.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	46.603.000,00	46.603.000,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	25.872.000,00	25.872.000,00
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.358.980,00</b>	<b>110.358.980,00</b>
<b>Penyisihan 2023</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(110.358.980,00)</b>	<b>(110.358.980,00)</b>
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>8.072.837.702,85</b>	<b>6.558.726.241,18</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85 dan

31 Desember 2022 sebesar Rp6.558.726.241,18. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Lain – Lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.558.726.241,18 terjadi kenaikan sebesar Rp1.514.111.461,67.

Piutang lain-lain terdiri dari piutang bagian lancar investasi dana bergulir dan piutang atas klaim BLUD RSUD. Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.a**  
**Piutang Lain Lain**

<b>Perubahan 2023</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023</b>
<b>Piutang Lain-Lain</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = (1 + 2 -3)</b>
Bagian lancar investasi dana bergulir	86.882.300,00	0,00	1.198.000,00	85.684.300,00
Piutang BLUD	6.471.843.941,18	7.984.145.183,67	6.468.835.722,00	7.987.153.402,85
<b>Piutang Lain-Lain 2023</b>	<b>6.558.726.241,18</b>	<b>7.984.145.183,67</b>	<b>6.470.033.722,00</b>	<b>8.072.837.702,85</b>
		<b>Penyisihan Piutang lain lain 2023</b>		<b>(165.826.573,75)</b>
		<b>Piutang Lain-Lain Netto 2023</b>		<b>7.907.011.129,10</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Klasifikasi Umur Piutang</b>	<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Taksiran Piutang Tak Tertagih</b>
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.b**  
**Umur Piutang Lain Lain**

<b>Klasifikasi Umur Piutang</b>	<b>≤ 1 tahun</b>	<b>&gt; 1 th &lt; 2 th</b>	<b>&gt; 2 Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Piutang lain-lain</b>				
Bagian lancar investasi dana bergulir	0,00	0,00	85.684.300,00	85.684.300,00
Piutang BLUD	7.984.145.183,67	3.008.219,18	0,00	7.987.153.402,85
<b>Jumlah Piutang Lain-lain 2023</b>	<b>7.984.145.183,67</b>	<b>3.008.219,18</b>	<b>85.684.300,00</b>	<b>8.072.837.702,85</b>
<b>Penyisihan 2023</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan Piutang Lain-lain 2023</b>	<b>79.841.451,84</b>	<b>300.821,92</b>	<b>85.684.300,00</b>	<b>(165.826.573,75)</b>
<b>Piutang Lain-Lain Netto 2023</b>	<b>7.904.303.731,83</b>	<b>2.707.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.011.129,10</b>

### **7.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>	<b>85.684.300,00</b>	<b>86.882.300,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp86.882.300,00. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp86.882.300,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.198.000,00.

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.1.a**  
**Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir**

<b>Perubahan 2023</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	51.320.100,00	0,00	0,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	0,00	14.440.000,00

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	17.362.200,00	0,00	1.198.000,00	16.164.200,00
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2023</b>	<b>86.882.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>85.684.300,00</b>
<b>Penyisihan Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2023</b>				<b>(85.684.300,00)</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2023</b>				<b>0,00</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.1.b**  
**Piutang Investasi Dana Bergulir**

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir</b>				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	51.320.100,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.440.000,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	0,00	0,00	16.164.200,00	16.164.200,00
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.684.300,00</b>	<b>85.684.300,00</b>
<b>Penyisihan 2023</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(85.684.300,00)</b>	<b>(85.684.300,00)</b>
<b>Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 7.1.1.5.2. Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Piutang BLUD</b>	<b>7.987.153.402,85</b>	<b>6.471.843.941,18</b>

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.471.843.941,18. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang BLUD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.471.843.941,18 terjadi kenaikan sebesar Rp1.515.309.461,67. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.2.a  
Piutang BLUD**

Perubahan Piutang BLUD	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Puskesmas	10.507.100,00	17.182.100,00	10.507.100,00	17.182.100,00
RSUD	6.461.336.841,18	7.966.963.083,67	6.458.328.622,00	7.969.971.302,85
<b>Piutang BLUD 2023</b>	<b>6.471.843.941,18</b>	<b>7.984.145.183,67</b>	<b>6.468.835.722,00</b>	<b>7.987.153.402,85</b>
		<b>Penyisihan Piutang BLUD 2023</b>		<b>(80.142.273,75)</b>
		<b>Piutang BLUD Netto 2023</b>		<b>7.907.011.129,10</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang BLUD per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.5.2.b  
Umur Piutang BLUD**

Klasifikasi Umur Piutang BLUD	≤ 1 tahun	> 1 th< 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Puskesmas	17.182.100,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	7.966.963.083,67	3.008.219,18	0,00	7.987.153.402,85
	<b>7.984.145.183,67</b>	<b>3.008.219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.153.402,85</b>
<b>Penyisihan 2023</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
Penyisihan piutang lain-lain	(79.841.451,84)	(300.821,92)	0,00	(80.142.273,75)
	<b>7.904.303.731,83</b>	<b>2.707.397,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.011.129,10</b>

### 7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Persediaan</b>	<b>13.537.733.840,96</b>	<b>12.928.832.764,50</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan tak habis pakai, persediaan pakai habis dan persediaan bekas pakai pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.928.832.764,50. Apabila dibandingkan antara jumlah Persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.928.832.764,50 terjadi kenaikan sebesar Rp608.901.076,46.

Setelah memperhitungkan persediaan kedaluwarsa yang belum dilakukan penghapusan pada tahun 2023. Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 terbagi menjadi persediaan tak habis pakai dan persediaan pakai habis.

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.928.832.764,50 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.1.6.a  
Persediaan**

No	Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Persediaan Tak Habis Pakai	858.025.724,00	915.118.932,00
2	Persediaan Pakai Habis	12.679.708.116,96	12.013.713.832,50
3	Persediaan Bekas Pakai	0.00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.537.733.840,96</b>	<b>12.928.832.764,50</b>

Perincian saldo persediaan tak habis pakai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.6.b**  
**Persediaan Tak Habis Pakai**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Persediaan Tak Habis Pakai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Permukiman	858.025.724,00	915.118.932,00
	<b>Jumlah</b>	<b>858.025.724,00</b>	<b>915.118.932,00</b>

Persediaan bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, barang cetakan, karcis, pakaian dinas, alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan. Perincian persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) sebagaimana tersaji dibawah ini.

**Tabel 7.1.1.6.c**  
**Persediaan Pakai Habis**  
**Per 31 Desember 2023**

Persediaan Bahan Pakai Habis	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1 Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dinas Kesehatan dan KB	10.058.137.583,00	10.932.672.447,96	10.058.137.583,00	10.932.672.447,96
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.228.818.474,00	50.678.000,00	372.630.812,00	906.865.662,00
4 Dinas Perhubungan	175.225.000,00	0,00	54.700.000,00	120.525.000,00
5 Dinas Sosial	6.450.000,00	0,00	2.415.000,00	4.035.000,00
6 Bagian Umum	215.096.869,00	79.922.000,00	34.098.147,00	260.920.722,00
7 Bagian Hukum	12.590.500,00	0,00	7.822.500,00	4.768.000,00
<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023</b>
8 Badan Pendapatan Daerah	17.511.650,00	0,00	12.953.600,00	4.558.050,00
9 Dinas Pertanian	276.625.563,50	201.167.151,50	56.155.677,00	421.637.038,00
10 Dinas Perdagangan	15.138.000,00	20.227.400,00	13.308.000,00	22.057.400,00
11 Sekretariat DPRD	8.120.193,00	1.668.797,00	8.120.193,00	1.668.797,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.013.713.832,50</b>	<b>11.286.335.796,46</b>	<b>10.620.341.512,00</b>	<b>12.679.708.116,96</b>

### 7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>364.051.750,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan belanja asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 s.d 15 Maret 2024 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1976 Nomor: 027/PPK/059/401.202/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk*), polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor.

### 7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>155.818.150.212,56</b>	<b>155.830.753.717,25</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25 terjadi penurunan sebesar Rp12.603.504,69.

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.2**  
**Investasi Jangka Panjang**

No	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25
2	Investasi Permanen	140.534.524.709,00	140.522.766.667,00
	<b>Jumlah</b>	<b>155.818.150.212,56</b>	<b>155.830.753.717,25</b>

### 7.1.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Non Permanen	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanen netto setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.050,25 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Non Permanen pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.050,25 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.361.546,69.

#### 7.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Dana Bergulir	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 terjadi penurunan sebesar Rp24.361.546,69.

Perincian investasi dana bergulir LKK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.1.a**  
**Investasi Dana Bergulir LKK**

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	11.761.997.436,00	11.761.997.436,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	11.732.983.845,41	11.327.869.353,97

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4	Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00
5	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	762.194.165,48	748.401.433,61
6	<b>Jumlah Investasi Dana Bergulir LKK</b>	<b>25.418.517.513,89</b>	<b>24.999.610.290,58</b>
7	<b>Cadangan Penyisihan Piutang LKK</b>	<b>(10.134.892.010,33)</b>	<b>(9.691.623.240,33)</b>
8	<b>Investasi Dana Bergulir LKK Netto</b>	<b>15.283.625.503,56</b>	<b>15.307.987.050,25</b>

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 Nilai tersebut termasuk modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp781.305.467,48 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar Rp19.111.302,00 maka diperoleh laba keseluruhan sebesar Rp762.194.165,48 Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33. Perincian investasi non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.1.b**  
**Investasi Non Permanen Dana Bergulir**

	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
<b>Dana Bergulir LKK</b>				
Modal	12.923.339.503,00	0,00	0,00	12.923.339.503,00
Pemupukan Modal	11.327.869.353,97	510.139.386,84	(105.024.895,40)	11.732.983.845,41
Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba atau Rugi LKK	0,00	781.305.467,48	(19.111.302,00)	762.194.165,48
Dana Bergulir Tahun 2023	24.251.208.856,97	1.291.444.854,52	(124.136.197,40)	25.418.517.513,89
		<b>Penyisihan Dana Bergulir LKK 2023</b>		<b>(10.134.892.010,33)</b>
		<b>Dana Bergulir LKK Neto 2023</b>		<b>15.283.625.503,56</b>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Perincian investasi non

permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2023 Rp15.283.625.503,56 tersaji di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.1.c**  
**Investasi Non Permanen Dana Bergulir OPD**  
**Per 31 Desember 2023**

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
<b>Investasi Dana Bergulir LKK</b>				
<b>Modal</b>	<b>12.923.339.503,00</b>			<b>12.923.339.503,00</b>
<b>Kec Kartoharjo</b>				
Kanigoro	2.097.256.015,45	139.060.755,33	-	2.236.316.770,78
Tawangrejo	48.772.345,00	980.111,00	-	49.752.456,00
Rejomulyo	54.012.122,00		(5.293.313,00)	48.718.809,00
Pilangbango	592.074.184,00	43.816.777,50	-	635.890.961,50
Oro-Oro Ombo	221.877.518,40	6.375.099,00		228.252.617,40
Sukosari	331.908.441,00	13.881.214,00	-	345.789.655,00
Kelun	672.207.545,33	19.307.707,61	-	691.515.252,94
Kartoharjo	399.504.523,80		(1.480.367,40)	398.024.156,40
Klegan	56.114.246,48	1.270.796,70	-	57.385.043,18
<b>Kec Manguharjo</b>				
Ngegong	802.993.678,00	57.587.703,03	-	860.581.381,03
Sogaten	282.505.273,90	9.067.688,80	-	291.572.962,70
Madiun Lor	231.037.591,00		(17.923.507,00)	213.114.084,00
Patihan	179.094.061,00	6.529.472,00	-	185.623.533,00
Nambangan Kidul	682.321.795,90	21.275.244,00	-	703.597.039,90
Manguharjo	289.549.410,00	968.248,20	-	290.517.658,20
Pangongangan	229.568.660,00	4.829.176,80	-	234.397.836,80
Nambangan Lor	134.383.080,00	15.829.514,40	-	150.212.594,40
Winongo	118.059.682,00	4.524.240,00	-	122.583.922,00
<b>Kec Taman</b>				
Demangan	(10.538.599,00)		(3.197.216,00)	(13.735.815,00)
Taman	116.302.129,00	4.273.801,20	-	120.575.930,20

<b>Perubahan 2023</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023</b>
Kuncen	349.208.274,00	23.239.202,20	-	372.447.476,20
Banjarejo	601.200.979,50	16.149.384,60	-	617.350.364,10
Josenan	626.321.997,00	60.273.267,00	-	686.595.264,00
Kejuron	420.496.200,40	1.568.163,00	-	422.064.363,40
Mojorejo	1.239.853.960,22	39.651.266,87	-	1.279.505.227,09
Pandean	463.845.230,40	19.680.553,80	-	483.525.784,20
Manisrejo	97.939.009,00		(77.130.492,00)	20.808.517,00
<b>Laba atau Rugi LKK Th. 2023</b>		<b>781.305.467,48</b>	<b>(19.111.302,00)</b>	<b>762.194.165,48</b>
<b>Investasi Dana Bergulir LKK 2023</b>	<b>24.251.208.856,97</b>	<b>1.291.444.854,52</b>	<b>(124.136.197,40)</b>	<b>25.418.517.513,89</b>
		<b>Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK 2023</b>		<b>(10.134.892.010,33)</b>
		<b>Investasi Dana Bergulir LKK Neto 2023</b>		<b>15.283.625.503,56</b>

Penambahan dari pendistribusian Laba LKK tahun 2022 untuk Pemupukan Modal sebesar 60% yaitu Rp405.114.491,64. Sedangkan untuk 40% dari Laba LKK 2022 telah didistribusikan untuk insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Penambahan yang lainnya merupakan penambahan atas Laba LKK tahun 2023 sebesar Rp781.305.467,48 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Pengurangan atas pendistribusian rugi LKK tahun 2022 sebesar Rp105.024.895,40,00 dan rugi LKK tahun 2023 sebesar Rp19.111.302,00. Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Umur Piutang</b>	<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Taksiran Piutang Tak Tertagih</b>
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK bukan berdasarkan jumlah nilai investasi nonpermanen LKK.

**Tabel 7.1.2.1.1.d**  
**Umur Piutang Investasi Non Permanen Dana Bergulir**  
**Per 31 Desember 2023**

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
<b>Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK</b>				
<b>Kec Kartoharjo</b>				
Kanigoro	1.091.852.000,00	170.362.000,00	495.641.000,00	1.757.855.000,00
Tawangrejo	3.900.000,00	-	531.075.870,00	534.975.870,00
Rejomulyo	15.698.000,00	17.854.000,00	271.320.700,00	304.872.700,00
Pilangbango	558.294.500,00	57.385.000,00	280.298.700,00	895.978.200,00
Oro-Oro Ombo	225.880.000,00	21.600.000,00	365.884.900,00	613.364.900,00
Sukosari	414.105.000,00	79.150.000,00	290.781.500,00	784.036.500,00
Kelun	302.818.500,00	122.440.000,00	628.976.400,00	1.054.234.900,00
Kartoharjo	74.700.000,00	10.700.000,00	189.481.300,00	274.881.300,00
Klegan	16.300.000,00	2.000.000,00	463.858.000,00	482.158.000,00
<b>Kec Manguharjo</b>				
Ngegong	560.076.666,67	174.201.666,67	343.801.775,00	1.078.080.108,33
Sogaten	297.886.000,00	103.346.000,00	215.025.445,00	616.257.445,00
Madiun Lor	211.534.500,00	160.018.500,00	327.972.150,00	699.525.150,00
Patihan	254.205.000,00	2.570.000,00	362.769.670,00	619.544.670,00
Nambangan Kidul	140.588.000,00	97.450.000,00	433.209.250,00	671.247.250,00
Manguharjo	206.450.000,00	20.700.000,00	540.495.000,00	767.645.000,00
Pangongangan	294.575.000,00	90.320.000,00	336.652.500,00	721.547.500,00
Nambangan Lor	274.750.000,00	17.300.000,00	404.952.802,00	697.002.802,00
Winongo	82.737.500,00	5.530.000,00	439.530.250,00	527.797.750,00
<b>Kec Taman</b>				
Demangan	-	-	113.598.500,00	113.598.500,00
Taman	137.208.000,00	64.469.500,00	313.359.500,00	515.037.000,00
Kuncen	286.070.000,00	59.270.000,00	163.369.300,00	508.709.300,00
Banjarejo	760.542.500,00	156.700.000,00	281.373.500,00	1.198.616.000,00
Josenan	915.340.000,00	27.650.000,00	82.715.000,00	1.025.705.000,00

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Kejuron	33.603.000,00	66.767.500,00	446.788.800,00	547.159.300,00
Mojorejo	840.140.000,00	262.090.000,00	413.993.500,00	1.516.223.500,00
Pandean	206.860.000,00	112.137.000,00	630.472.500,00	949.469.500,00
Manisrejo	41.194.000,00	54.150.000,00	489.405.000,00	584.749.000,00
<b>Piutang Dana Bergulir LKK 2023</b>	<b>8.247.308.166,67</b>	<b>1.956.161.166,67</b>	<b>9.856.802.812,00</b>	<b>20.060.272.145,33</b>
<b>Penyisihan piutang LKK</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	
<b>Penyisihan piutang Dana Bergulir LKK 2023</b>	<b>82.473.081,67</b>	<b>195.616.116,67</b>	<b>9.856.802.812,00</b>	<b>10.134.892.010,33</b>
<b>Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK Neto 2023</b>	<b>8.164.835.085,00</b>	<b>1.760.545.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.925.380.135,00</b>

### 7.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	10.134.892.010,33	9.691.623.240,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2023 Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung berdasarkan nilai piutang yang beredar pada seluruh LKK, bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyisihan Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 terjadi kenaikan sebesar Rp443.268.770,00. Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.1.2**  
**Penyisihan Piutang Dana Bergulir**

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lancar	82.473.081,67	87.511.983,33
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	195.616.116,67	145.851.836,67
3	Penyisihan Piutang Macet	9.856.802.812,00	9.458.259.420,33
		<b>10.134.892.010,33</b>	<b>9.691.623.240,33</b>

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No.1/LHP/XVIII.SBY/02/2022 dengan judul temuan Pengelolaan Investasi Non Permanen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan Belum Memadai, BPK merekomendasikan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK, maka dalam laporan ini kami sampaikan

Progress rencana aksi yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan saat ini yaitu sudah memasuki tahapan konfrontir terhadap pinjaman yang tidak mengakui pinjamannya melalui lembar konfirmasi positif yang sudah diedarkan sebelumnya. Hingga saat ini sudah melaksanakan tahapan konfrontir di 8 (delapan) LKK dari 27 (dua puluh tujuh) LKK yaitu di LKK Kelurahan Patihan, LKK Kelurahan Kelun, LKK Kelurahan Pilangbango, LKK Kelurahan Josenan, LKK Kelurahan Kanigoro, LKK Kelurahan Banjarejo, LKK Kelurahan Mojorejo dan LKK Kelurahan Manguharjo.

## **7.1.2.2. Investasi Permanen**

### **7.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Penyertaan Modal Pemda</b>	<b>140.534.524.709,00</b>	<b>140.522.766.667,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.534.524.709,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.522.766.667,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyertaan Modal Pemda pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar

Rp140.534.524.709,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.522.766.667,00 terjadi kenaikan sebesar Rp11.758.042,00.

Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim.

Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1.2.2.1.a**  
**Investasi Permanen**

<b>Perubahan 2023</b>	<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023</b>
<b>Penyertaan Modal Pemda</b>				
PDAM	61.486.970.783,00	13.993.862.557,00	6.665.668.490,00	68.815.164.850,00
PD BPR Bank Daerah	38.830.077.525,00	0,00	8.563.089.401,00	30.266.988.124,00
PD Aneka Usaha	6.689.611.609,00	1.246.653.376,00	0,00	7.936.264.985,00
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0,00	0,00	33.516.106.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>140.522.766.667,00</b>	<b>15.240.515.933,00</b>	<b>15.228.757.891,00</b>	<b>140.534.524.709,00</b>

### **Perumda Air Minum (PDAM)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perumda PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2019 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih Perumda PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal Perumda PDAM sebesar Rp68.815.164.848,00. Modal awal Perumda PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp200.099.148,50 ditambah dari penyesuaian sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Pencatatan investasi permanen pada Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Tahun

2022 terdapat kelebihan pembayaran atas pembagian Tantiem dan Jasa Produksi atas laba tahun buku 2021 yang dibagikan tahun 2022 pada Perumda Air Minum Tirta Tama sari sebesar Rp1.125.593.570,61 dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun telah menindaklanjuti dan mengembalikan kelebihan sebesar Rp1.009.628.400,00.

Dan terdapat saldo piutang merupakan saldo audited sebelum terbit keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Saldo Tahun 2023 merupakan saldo yang sesuai Petikan putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Sby Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara pada terdakwa Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

**Tabel 7.1.2.2.1.b**  
**Investasi Permanen PDAM**  
**Per 31 Desember 2023**

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001	200,099,148.50
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 04 Maret 1994	4.000.000,00
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2.000.000,00
Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 tahun 2002	5.969.273.000,00
Bantuan Modal sesuai SK Walikota No. 18 Tahun 2002	2.000.000.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	486.610.000,00
Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan Sektor Air Bersih Kota Madiun ( Berita Acara Pemerihth Kota Madiun No : 650/202/413.109/2000 tanggal 2 Januari 2001 ) terdiri dari :	267.872.000,00
a. Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjang 2.757 m sebesar	49.148.000
b. Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar	99.990.000,00
c. Pompa submersible kapasitas 40l/dt H= 40 m, 2 unit dan motor protektor 2 unt sebesar	118.734.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC 650/825/413.401/2003 (antara	281.500.000,00

Walikota dan Direktur PDAM)	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-AB sesuai BA No. 650/001A/413.401/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	173,500,000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara No. 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian :	1.993.728.000,00
a. Sumur Dalam	312.513.000,00
b. Pompa Submerble	247.041.000,00
c. Jaringan Perpipaan	1.087.614.000,00
d. Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa	135.383.000,00
e. Instalasi Gas Chlor	82.642.000,00
f. Pagar keliling Instalasi Sumur	128.5356.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang Sesuai Berita Acara No. 030/3180/401.024/2007 berupa :	885.287.000,00
a. Alat-alat Pengolahan Air	69.300.000,00
b. Jaringan Pipa Distribusi	463.850.000,00
c. Sumur-sumur	352.137.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan saluran pemukiman dan jaringan air bersih kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor : 050/880/401.109/2008 denga rincian :	1.569.029.000,00
a. Sumur-sumur	515.999.000,00
b. Peralatan Pompa	67.331.000,00
c. Alat-alat Pengolahan Air	158.774.000,00
d. Jaringan pipa distribusi	826.925.000,00
Berita Acara Serah Terima Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No. 028/802/401.012/2009 tertanggal 2 September 2009 berupa :	1.692.665.000,00
a. Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh)	434.220.000,00
b. Pengadaan generator set 150 kva	399.645.000,00
c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa q=30 liter per detik	287.900.000,00
d. Sambungan rumah murah	570.900.000,00
Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Milik Pemerintah Kota Madiun No. 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut :	2.158.667.500,00
a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi	632.478.000,00
b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	830.742.000,00
c. Pemasangan sambungan rumah	695.447.500,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)	543.431.000,00

Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)	775.782.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK), Jaringan pipa Distribusi, Meter Air Induk dan Sambungan Rumah	1.089.956.000,00
<b>Penyertaan Modal Pemerintah Pusat :</b> Koreksi penyertaan modal pemerintah pusat per 31 desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :	8.094.640.563,00
a. Bantuan meter air dari Direktorat teknik penyehatan departemen penyehatan umum sebesar	30.970.000,00
b. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1972 sd 1979 sebesar	127.445.650,00
c. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1983 sd 1991 sebesar	3.243.396.718,00
d. Bantuan tangki air dari PPSB Jatim sebesar	39.985.000,00
e. Bantuan dari PPSPB tahun 1994 sebesar	374.220,00
f. Bantuan Pipa dari PPSAB 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-Jatim/30/97 sebesar	26.164.575,00
g. Bantuan Pipa GMS,SOCK GI dari PPSAB tanggal 29 Maret 1999 sebesar	2.544.000,00
h. Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa Pipa ACP 250 diameter 240 sebesar	11.419.200,00
i. Berita Acara tanggal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam sebesar	180.744.300,00
j. Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimpin proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahun anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :	
- Sebuah sumur dalam	223.419.000
- Pipa distribusi ukuran 2Q dan 4Q	329.373.000
- Pipa distribusi ukuran 4Q dan 6Q	224.268.000
k. Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim. Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007.	187.220.000

l. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor,75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desember 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan	1.819.915.900	
m. Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan	14.238.700	
n. Berita Acara Serah Terima Nomor.10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	1.633.162.300	
<b>Penyertaan Modal Pemerintah Jawa Timur :</b>		
Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut :		168.346.000,00
a. Berita Acara Serah Terima Nomor : 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50Q+Accesoris=2.511 M dan Pipa GI 50Q+Accesoris=-30m	100.000.000	
b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp379.700 sehingga totalnya	68.346.000	
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		28.356.386.211,50
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		1.919.306.250,50
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012</b>		<b>30.275.692.462,00</b>
Penam nilai inves permanet selama th 2012 dan 2013		850.389.361,20
a. Laba Tahun 2011	4.251.946.806,00	
b. Deviden dari laba tahun 2011 ( PAD )	(2.338.570.743,30)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(212.597.340,30)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(425.194.680,60)	
e. Jasa Produksi	(425.194.680,60)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/211/401.101/2013		1.089.956.000,00
Koreksi Cadangan		(173.890.609,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2012		295.902.693,75
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012</b>		<b>32.338.050.507,95</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2012 dan 2013		909.569.900,34

a. Laba Tahun 2012	4.547.849.501,75	
b. Dividen dari laba tahun 2012 ( PAD )	(2.501.317.225,96)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(227.392.475,09)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(454.784.950,18)	
e. Jasa Produksi	(454.784.950,18)	
Penambahan Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai		
Berita Acara No. 050/1642/401.501/2013		53.855.000,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2013		117.827.232,25
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013</b>		<b>33.419.302.040,54</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2013 dan 2014		933.135.346,80
a. Laba Tahun 2013	4.665.676.734,00	
b. Dividen dari laba tahun 2013 ( PAD )	(2.566.122.203,70)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(233.283.836,70)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(466.567.673,40)	
e. Jasa Produksi	(466.567.673,40)	
f. Koreksi Cadangan		-168.299.732,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2014		1.804.284.739,00
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014</b>		<b>35.988.422.394,34</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2014 dan 2015		1.293.992.294,60
a. Laba Tahun 2014	6.469.961.473,00	
b. Dividen dari laba tahun 2014 ( PAD )	(3.558.478.810,15)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(323.498.073,65)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(646.996.147,30)	
e. Jasa Produksi	(646.996.147,30)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(-823.200.000,00)
Penyertaan dari Pemda sesuai Berita Acara No. :		
No. 050/088/401.501/2015		1.457.833.000,00
No. 050/359/401.501/2014		1.129.206.000,00
No. 050/361/401.501/2014		15.000.000,00
Penyertaan Dari Pemerinth Jatim sesuai Berita Acara: Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013		1.633.162.300,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2015		151.789.812,00
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015</b>		<b>40.846.206.400,94</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2015 dan 2016		1.324.350.257,00
a. Laba Tahun 2013	6.621.751.285,00	
b. Dividen dari laba tahun 2013 ( PAD )	(3.641.963.206,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(331.087.564,25)	

d. Dana Pensiun dan Sokongan	(662.175.128,50)	
e. Jasa Produksi	(662.175.128,50)	
Penambahan nilai investasi permanen th 2016		3.260.477.959,00
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016</b>		<b>45.431.034.016,94</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		1.976.445.848,80
a. Laba Tahun 2016	9.882.229.244,00	
b. Deviden dari laba tahun 2016 ( PAD )	(5.435.226.084,20)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(494.111.462,20)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(988.222.924,40)	
e. Jasa Produksi	(988.222.924,40)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(386.399.991,00)
g. Koreksi Penyertaan Modal Pusat		1.633.162.300,00
h. Koreksi pengurangan modal pemth Jatim		(1.633.162.300,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2017		427.964.813,17
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017</b>		<b>47.449.045.287,91</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		2.062.038.811,43
a. Laba Tahun 2017	10.310.194.057,17	
b. Deviden dari laba tahun 2017 ( PAD )	(5.670.606.731,44)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(515.509.702,86)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.031.019.405,72)	
e. Jasa Produksi	(1.031.019.405,72)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		-564.910.128,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2018		74.437.015,11
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018</b>		<b>49.020.610.386,45</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2018 dan 2019		2.076.926.214,32
a. Laba Tahun 2018	10.384.631.072,14	
b. Deviden dari laba tahun 2018 ( PAD )	(5.711.547.089,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(519.231.553,61)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.038.463.107,23)	
e. Jasa Produksi	(1.038.463.107,23)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(215.398.331,00)
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019		1.525.987.809,72

<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019</b>	<b>52.408.126.679,49</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019 dan 2020	(9.528.495.105,98)
a. Laba Tahun 2019	12,336,731,592.00
b. Deviden dari laba tahun 2019 ( PAD )	(6.550.840.385,10)
c. CSR	(238.212.377,65)
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(357.318.566,47)
e. Dana Kesejahteraan	(1.191.061.888,25)
f. Jasa Produksi	(1.191.061.888,25)
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020</b>	<b>55.216.363.165,77</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2020 dan 2021	2,637,209,955.00
a. Laba Tahun 2020	12,506,595,229.00
b. Deviden dari laba tahun 2020 55%	(6.785.202.376,15)
c. CSR 2%	(246,734,632.00)
d. Tantiem Dewas dan Direksi 3%	(370,101,948.00)
e. Dana Kesejahteraan 10%	(1.233.673.159,30)
f. Jasa Produksi 10%	(1.233.673.159,30)
g. Sambungan Gratis cadangan umum	479.520.000,00
Penambahan nilai investasi permanen tahun 2021 berupa tanah berdasarkan Perda No. 9 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Kota Madiun	1.918.126.800,00
Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal	(599,77)
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021</b>	<b>59.292.179.321,00</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2022	3,241,311,462.00
a. Laba Tahun 2021	13.246.587.646,00
b. Deviden dari laba tahun 2021	(6.878.627.376,00)
c. CSR	(250.131.905,00)
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(375.197.857,00)
e. Dana Kesejahteraan	(1.250.659.523,00)
f. Jasa Produksi %	(1.250.659.523,00)
g. Sambungan Gratis cadangan umum	1.046.520.000,00
Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal	
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022</b>	<b>61.486.970.783,00</b>
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2022	7.328.194.065,32
a. Laba Tahun 2023	12.984.234.155,35
b. Deviden dari laba tahun 2022	(6.665.668.490,03)
c. Pengembalian Tantiem & Jaspro tahun buku 2021 Yang dibagikan Tahun 2022	1.009.628.400,00
<b>Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023</b>	<b>68.815.164.850,00</b>

## **Perumda Bank Daerah Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui OPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih Perumda BPR Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%.

Pada Tahun 2023 terdapat permasalahan di Bank Daerah dan telah dilaksanakan bentuk tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan pegawai Bank Pada tahun 2023 Bank menemukan adanya penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan oleh pegawai dengan potensi kerugian sebesar Rp5.654.843.400 dan Rp40.000.000. Tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit yang telah dilakukan oleh Bank Daerah. Saat ini masih dalam proses penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan pemanggilan saksi. Sampai dengan posisi pemeriksaan nominal kerugian tersebut belum dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2023. Bank akan melakukan koreksi pada Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 dengan melakukan reklasifikasi kerugian tersebut sesuai POJK tentang KAP PPAP atas aset non produktif tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dan BPR akan membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas akun tagihan BPR tersebut.

**Tabel 7.1.2.2.1.c**  
**Investasi Permanen PD. BPR Bank Daerah**  
**Per 31 Desember 2023**

1	Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun	8.000.032.295,00
2	Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak	1.200.000.000,00
3	Saldo Cadangan Umum, Cadangan tujuan dan Laba ditahan	2.261.467.409,00
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010	683.347.316,00
	a. Laba Tahun 2009	1.893.174.388,00
	b. Deviden Tahun 2009	(946.587.194,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	-378.634.878,00
	d. Penambahan Cadangan tujuan	115.395.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>12.144.847.020,00</b>
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011	615.882.958,00
	a. Laba Tahun 2010	2.052.943.192,00
	b. Deviden Tahun 2011	(1.026.471.596,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(410.588.638,00)
	d. Penambahan Cadangan tujuan	128.549.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>12.889.279.478,00</b>
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012	730.580.401,00
	a. Laba Tahun 2011	2.435.268.003,00
	b. Deviden Tahun 2012	(1.217.634.004,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(487.053.600,00)
	d. Penambahan Cadangan tujuan	30.805.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>13.650.665.379,00</b>
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013	847.803.031,00
	a. Laba Tahun 2012	2.826.010.104,00
	b. Deviden Tahun 2013	(1.413.005.052,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(565.202.021,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>14.498.468.410,00</b>
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014	847.334.873,00
	a. Laba Tahun 2013	2.824.449.575,00
	b. Deviden Tahun 2014	(1.412.224.788,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(564.889.915,00)

	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>15.345.803.283,00</b>
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2014 dan tahun 2015	978.878.099,00
	a. Laba Tahun 2014	3.262.926.995,00
	b. Deviden Tahun 2014	(1.631.463.498,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(652.585.399,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>16.324.681.381,00</b>
10	Tambahan Penyertaan Modal secara tunai berdasarkan SP2D Nomor :900/SPP-LS/052/401.207/2015 tanggal 24 Nopember 2015	12.106.967.705,00
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016	957.561.317,00
	a. Laba Tahun 2015	3.191.871.055,00
	b. Deviden Tahun 2015	(1.595.935.528,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(638.374.211,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>29.389.210.403,00</b>
12	Tambahan Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah dengan nilai buku 492.400.000,00 berdasarkan BA Nomor : 028/1938/401.207/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai appraisal Rp 3.693.000.000,00	3.693.000.000,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017	1.220.671.042,00
	a. Laba Tahun 2016	4.068.903.474,00
	b. Deviden Tahun 2016	(2.034.451.735)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(813.780.695,00)
14	Pengurangan cadangan tujuan untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan ( BPHTB) sesuai surat No.580/82/401.502/2017 tanggal 28 Pebruari 2017	-181.650.001,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>34.121.231.444,00</b>
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018	824.849.966,00
	a. Laba Tahun 2017	2.749.499.888,00
	b. Deviden Tahun 2017	(1.374.749.944,00)
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(549.899.978,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>34.946.081.410,00</b>
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019	1.273.041.820,00
	a. Laba Tahun 2018	4.243.472.734,00

	b. Deviden Tahun 2018	(2.121.736.367,05)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(848.694.547,00)	
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas</b>		<b>36.219.123.230,00</b>
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020		495.252.541,00
	a. Laba Tahun 2019	2.476.262.706,00	
	b. Deviden Tahun 2019	(1.361.944.488,00)	
	c. Dana Kesejahteraan	(247.626.271,00)	
	e. Dana Tantiem	(99.050.508,00)	
	F Jasa Produksi	(198.101.016,00)	
	G CSR	(74.287.881,00)	
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020</b>		<b>36.714.375.772,00</b>
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2020 dan tahun 2021		722.998.293,00
	a. Laba Tahun 2021	3.614.991.463,00	
	b. Deviden Tahun 2020 55%	(1.988.245.305,00)	
	c. Dana Kesejahteraan 10%	(361.499.146,00)	
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(144.599.659,00)	
	F Jasa Produksi 8%	(289.199.317,00)	
	G CSR 3%	(108.449.744,00)	
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021</b>		<b>37.437.374.065,00</b>
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2022		338.331.828,00
	a. Laba Tahun 2021 dan 2022	1.691.659.137,00	
	b. Deviden dari Laba Tahun 2021 55%	(930.412.525,00)	
	c. Dana Kesejahteraan 10%	(169.165.914,00)	
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(67.666.365,00)	
	F Jasa Produksi 8%	(135.332.731,00)	
	G CSR 3%	(50.749.774,00)	
20	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022</b>		<b>37.775.705.893,00</b>
	Penambahan nilai investasi selama tahun 2022 audited		1.054.371.632,00

	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 2022</b>	<b>38.830.077.525,00</b>
	Pengurangan penyertaan modal ke PD Bank Daerah karena mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan audited Per 31 Desember 2023	<b>(7.719.592.095,00)</b>
	Penyesuaian berkurangnya investasi permanen pada bumd pd bank daerah karena pembagian deviden sebesar Rp579.904.398,00 ; dana kesejahteraan pegawai sebesar Rp105.437.163,00 ; jasa produksi sebesar Rp84.349731,00 ; csr sebesar Rp31.631.149,00 dan tantiem sebesar Rp42.174.865,00	<b>(843.497.306,00)</b>
21	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023</b>	<b>30.266.988.124,00</b>

### **Perumda Aneka Usaha**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagai anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perumda Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih Perumda Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 116 dan Pasal 117 berkaitan dengan Pelaporan Dewan Pengawas dan Pelaporan Direksi, BAB X, Pasal 119 ayat (1) tentang Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha. Serta memperhatikan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022 tertanggal 07 Februari 2023 oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan Nomor LAI : 60001/3.0437/AU.2/05/1237-2/1/II/2023. Dinyatakan bahwa Laba Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku

2022 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 menyatakan bahwa : “Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) seluruhnya digunakan untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 7.1.2.2.1.d**  
**Investasi Permanen PD. Aneka Usaha**  
**Per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran modal awal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha.	4.085.502.000,00
2	Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2007 tertuang dalam Berita Acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan peningkatan sarana praarna aparatur sub kegiatan perencanaan pengawasan teknik serta lanjutan pembangunan SPBU tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2007 Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 19 Desember 2007	4.489.766.850,00
3	Rugi Tahun – tahun sebelumnya	(2.307.352.895,00)
4	<b>Saldo Awal Tahun 2008</b>	<b>6.267.915.955,00</b>
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008 dan tahun 2009	282.884.044,00
	a. Laba Tahun 2008	423.402.038,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(176.266.244,00)
	c. Kenaikan cadangan	35.748.250,00
	d. Pengurangan laba ditahan	(474.431.588,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>6.076.368.411,00</b>
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010	228.277.463,00
	a. Laba Tahun 2009	550.651.565,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(423.402.038,00)
	c. Kenaikan cadangan	101.027.936,00
	d. Pengurangan laba ditahan	(838.470.116,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>5.466.175.758,00</b>
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011	90.552.939,00
	a. Laba Tahun 2010	531.074.191,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(550.651.565,00)
	c. Kenaikan cadangan	110.130.313,00
	d. Pengurangan laba ditahan	(1.059.866.296,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>4.496.862.401,00</b>
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012	(241.533.519,00)
	a. Laba Tahun 2011	389.896.947,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(531.074.191,00)
	c. Kenaikan cadangan	(100.356.275,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>4.255.328.882,00</b>
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013	105.556.865,00
	a. Laba Tahun 2012	361.281.487,00
	b. Deviden	(214.443.320,85)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(175.453.626,15)
	d. Kenaikan cadangan	134.172.325,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>4.360.885.747,00</b>

10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014	21.380.797,00
	a. Laba Tahun 2013	310.405.987,00
	b. Deviden	(198.704.817,85)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(162.576.669,15)
	d. Kenaikan cadangan	72.256.297,00
	e. Koreksi saldo laba	(188.648.413,00)
11	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>4.193.618.131,00</b>
	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015	(109.968.733,00)
	a. Laba Tahun 2014	138.356.057,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(248.324.790,00)
	c. Koreksi saldo laba	(1.956.299.461,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>2.127.349.937,00</b>
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016	24.628.851,00
	a. Laba Tahun 2015	307.932.523,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(283.303.672,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>2.151.978.788,00</b>
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017	(418.308.949,00)
	a. Laba Tahun 2016	(171.962.931,00)
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(246.346.018,00)
	c. Koreksi saldo laba	(2.079.500,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>1.731.590.339,00</b>
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2019	741.463.024,00
	a. Laba Tahun 2017	741.463.024,00
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>2.473.053.363,00</b>
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018	668.179.700,00
	a. Laba Tahun 2018	1.261.350.119,00
	b. Deviden	(407.804.663,00)
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(185.365.756,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	<b>3.141.233.063,00</b>
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019	521.062.283,00
	a. Laba Tahun 2017	1.530.142.378,00
	b. Deviden	(693.742.600,00)
	c. Sosial Pendidikan, Sokongan, jasa Produksi	(315.337.495,00)
	Penyertaan Modal Pemda Tahun 2019	1.500.000.000,00
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2019</b>	<b>5.162.295.346,00</b>
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020	371.136.750,00
	a. Laba Tahun 2019	1.595.250.651,00
	b. Deviden	(841.578.307,90)
	c. Dana Sosial dan Pendidikan	(76.507.118,00)
	E Dana Pensiun dan Sokongan	(153.014.238,00)
	F Jasa Produksi	(153.014.238,00)
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020</b>	<b>5.533.432.096,00</b>

18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2020 dan tahun 2021		179.463.413,20
	a. Laba Tahun 2021	1.455.663.934,00	
	b. Deviden tahun 2020 55%	(877.387.858,05)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan 5%	159.525.065,10)	
	d. Dana Pensiun dan Sokongan 10%	(159.525.065,10)	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	(15.952.506,51)	
	F Bonus Karyawan	(63.810.026,04)	
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021</b>		<b>5.712.895.509,20</b>
19	Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2022		976.716.099,80
	a. Laba Tahun 2022	2.141.247.247,00	
	b. Deviden tahun 2020 55%	(800.615.163,70)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan 5%	(145.566.393,40)	
	e. Dana Pensiun dan Sokongan 10%	(145.566.393,40)	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	(14.556.639,34)	
	F Bonus Karyawan	(58.226.557,36)	
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022</b>		<b>6.689.611.609,00</b>
	Penambahan nilai investasi permanen selama th 2022 dan 2023		<b>1.246.653.376 ,00</b>
	a. Laba Tahun 2023	1.246.653.376,00	
	b. Deviden dari laba tahun 2022		
	c. Dana Sosial & Pendidikan		
	d. Dana Pensiun dan Sokongan		
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas		
	f. Bonus Karyawan		
	<b>Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023</b>		<b>7.936.264.985,00</b>

## PT. Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014.

Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.516.106.750,00 tersaji dalam dibawah ini.

**Tabel 7.1.2.2.1.e**  
**Investasi Permanen PT. Bank Jatim**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000.000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	<b>Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2023</b>	<b>33.516.106.750,00</b>

### 7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Aset Tetap</b>	<b>2.381.738.610.915,86</b>	<b>2.304.956.764.976,94</b>

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.381.738.610.915,86 dan Rp2.304.956.764.976,94. Nilai netto Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.381.738.610.915,86 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.016.394.631.107,62 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.634.656.020.191,76.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.3**  
**Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	710.169.521.272,27	710.406.120.272,27
2. Peralatan dan mesin	776.839.667.064,50	704.569.408.867,71
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(638.444.793.528,54)	(574.146.833.518,54)
4. Peralatan dan mesin Netto	138.394.873.535,96	130.422.575.349,17
5. Gedung dan bangunan	1.051.357.839.620,13	943.400.178.827,51
6. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(214.838.706.903,30)	(191.683.302.682,30)
7. Gedung dan bangunan Netto	836.519.132.716,83	751.716.876.145,21
8. Jalan, irigasi dan jaringan	1.464.805.790.487,14	1.417.896.999.992,67
9. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(780.193.133.666,00)	(720.579.673.319,00)
10. Jalan, irigasi dan jaringan Netto	684.612.656.821,14	697.317.326.673,67
11. Aset tetap lainnya	6.698.636.203,19	6.625.595.703,19
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.179.386.093,92)	(1.071.131.843,92)
13. Aset tetap lainnya Netto	5.519.250.109,27	5.554.463.859,27
10. Konstruksi dalam pengerjaan	6.523.176.460,39	9.539.402.677,35
<b>Jumlah bruto (1+2+4+6+8+9)</b>	<b>4.016.394.631.107,62</b>	<b>3.792.437.706.340,70</b>
<b>Akumulasi penyusutan aset tetap (3+5+7)</b>	<b>(1.634.656.020.191,76)</b>	<b>(1.487.480.941.363,76)</b>
<b>Jumlah netto</b>	<b>2.381.738.610.915,86</b>	<b>2.304.956.764.976,94</b>

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp76.781.845.938,92 atau 3,33 %. Kenaikan aset tetap berasal dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp72.270.258.196,79 atau 10,26 %, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp107.957.660.792,62 atau 11,44 %, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp46.908.790.494,47 atau 3,31 %. Aset tetap tanah mengalami penurunan sebesar Rp236.599.000,00 atau 0,03%, Aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp73.040.500,00 atau 1,10 % sedangkan Konstruksi dalam pengerjaan juga mengalami penurunan sebesar Rp3.016.226.216,96 atau 31,62 %.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya berupa alat musik yang disusutkan sedangkan lainnya seperti hewan, tanaman, taman dan buku perpustakaan tidak disusutkan.

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu :

- Realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2023.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- Perolehan non APBD seperti perolehan aset tetap karena hibah/sumbangan, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Mutasi pengurangan aset tetap selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- reklas realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2023 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00.
- reklas aset tetap rusak berat atas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu :

- ☑ Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- ☑ Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal :

- ☑ Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- ☑ Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

### 7.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Tanah</b>	<b>710.169.521.272,27</b>	<b>710.406.120.272,27</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 dibandingkan aset tetap tanah per 31 Desember 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp236.599.000,00 karena adanya penambahan dan pengurangan aset tetap tanah.

Aset tetap tanah bertambah sebesar Rp Rp1.522.737.000,00 berupa penambahan aset tetap tanah yang berasal dari perolehan hibah sebesar Rp583.581.000,00 dan antar OPD sebesar Rp939.156.000,00. Hibah tanah berupa tanah jalan dan tanah RTH/RTH yang merupakan fasum fasos perumahan Taman Puspa Regency yang diserahkan ke Pemerintah Kota Madiun.

Aset tetap tanah berkurang sebesar Rp1.759.336.000,00 dengan pengurangan aset tetap tanah berupa hapus aset tanah jalan karena dobel catat pada Dinas PU PR sebanyak 19 ruas jalan seluas 9.975 m<sup>2</sup> sebesar Rp820.180.000,00 berdasarkan hasil inventarisasi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 620/2807/401.110/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penyajian Data Kondisi Ruas Jalan di Kota Madiun dan mutasi antar OPD sebesar Rp939.156.000,00. Mutasi antar OPD dari BKAD ke inspektorat sebesar Rp362.556.000,00, ke Kecamatan Taman sebesar Rp563.600.000,00 dan dari Dinas Pendidikan ke BKAD sebesar Rp13.000.000,00.

Masih terdapat tanah dibawah saluran yang sedang dalam proses identifikasi karena dimungkinkan keberadaannya diatas tanah milik pihak lain.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.1.1.1**.

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang, terdiri atas tanah sawah/bangunan/usaha sebanyak 916 bidang, tanah dibawah jalan sebanyak 1.473 bidang dan tanah

irigasi sebanyak 41 bidang. Atas tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang yang sudah bersertifikat sebanyak 2.327 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 103 bidang, dengan perincian berupa tanah sawah/bangunan/usaha yang sudah bersertifikat sebanyak 893 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 23 Bidang, tanah dibawah jalan yang telah bersertifikat sebanyak 1.410 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 63 bidang, sedangkan berupa tanah irigasi yang sudah bersertifikat sebanyak 24 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 17 bidang. Tidak terdapat aset tetap tanah yang dalam sengketa hukum. Terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.3.1**

**Pemanfaatan Aset Tetap Tanah oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai**

<b>Perubahan di tahun 2023</b>	<b>Saldo 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Penambahan (Rp)</b>	<b>Pengurangan (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Desember 2023 (Rp)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Tanah</b>				
PMI Cabang Madiun	155.200.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
KUA Manguharjo	29.835.000,00	0,00	0,00	29.835.000,00
Polsekta Kartoharjo	2.812.000.000,00	0,00	0,00	2.812.000.000,00
Primkop Kartika Merak Jaya	57.040.000,00	0,00	0,00	57.040.000,00
Koramil Manguharjo	13.600.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00
Kwarcab Kota Madiun	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00
Baznas Kota Madiun	494.775.000,00	0,00	0,00	494.775.000,00
	<b>4.102.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.450.000,00</b>

Perincian pemanfaatan aset tetap tanah oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana **Lampiran 7.1.3.1.2.**

**7.1.3.2. Peralatan dan Mesin**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>776.839.667.064,50</b>	<b>704.569.408.867,71</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp82.101.203.618,47 berupa penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp71.585.868.051,04 dan yang berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp2.126.749.315,00 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp5.480.074.816,73. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp2.718.884.935,70 dan koreksi karena penambahan dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp189.626.500,00.

Aset tetap peralatan dan mesin berkurang sebesar Rp9.830.945.421,68 dengan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp155.846.735,00, hibah keluar sebesar Rp1.314.674.613,91, mutasi antar OPD sebesar Rp5.480.074.816,73 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp1.966.955.136,04. Terdapat pengurangan karena koreksi sebesar Rp30.470.000,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap. Selain itu ada pengurangan aset tetap berupa penghapusan sebesar Rp882.924.120,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.1.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp638.444.793.528,54 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp574.146.833.518,54. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.2.**

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihibahkan ke pihak lain, seperti sampah pemilah, gerobak sampah, tempat sampah pemilah, tong sampah, dan komposter aerob namun masih tercatat di aset tetap Dinas Lingkungan Hidup. Atas aset tetap peralatan dan mesin tersebut masih dalam proses penghapusan.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan berupa Laptop dan Chromebook dalam kondisi rusak berat dan akan dilakukan proses penghapusan.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2

**Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin oleh Pihak Lain dalam bentuk  
Pinjam Pakai**

Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	1	2	3	4
<b>Kendaraan Roda 4</b>				
Denpom V/1	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Kodim 0803/ Madiun	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Polres Madiun Kota	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
PD. Aneka Usaha	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
Yonir Para Raider Bajra Yudha	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
Dewan Masjid Indonesia	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Baznas Kota Madiun	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00
Kwarcab Kota Madiun	208.490.000,00	0,00	0,00	208.490.000,00
PGRI Kota Madiun	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
PMI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
MUI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
IPHI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
NU Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Muhammadiyah Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
<b>Kendaraan Roda 2</b>				
Kwarcab Kota Madiun	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
	<b>2.833.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.995.000,00</b>

Perincian pemanfaatan aset tetap peralatan dan mesin oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana **Lampiran 7.1.3.2.3**.

### 7.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.051.357.839.620,13</b>	<b>943.400.178.827,51</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp1.051.357.839.620,13 berupa penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp80.940.539.683,65, berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp20.085.592.777,67 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp14.378.864.333,33. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp11.447.840.961,00 dan koreksi sebesar Rp818.382.659,00 dengan perincian koreksi berupa realisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp318.382.659,00 dan kurang catat aset sebesar Rp500.000.000,00.

Aset tetap gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp19.713.559.622,03 dengan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berupa mutasi antar OPD sebesar Rp14.378.864.333,33, reklas antar aset tetap sebesar Rp4.621.032.498,70 dan koreksi sebesar Rp713.662.790,00 berupa salah posting karena tidak memenuhi kriteria aset tetap atau berupa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp402.413.790,00 dan bayar hutang belanja Rp311.249.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.1.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.838.706.903,30 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.683.302.682,30. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.2.**

#### **7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.464.805.790.487,14</b>	<b>1.417.896.999.992,67</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap jalan, irigasi dan bangunan bertambah sebesar Rp67.011.923.038,00 berupa penambahan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp62.832.477.443,00, berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp93.869.680,00 dan berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp4.085.575.915,00.

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berkurang sebesar Rp20.103.132.543,53 berupa reklas antar aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp9.295.325.646,00 dan koreksi salah posting karena tidak memenuhi kriteria aset tetap atau berupa barang persediaan atau berupa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp10.044.759.147,53 dan koreksi bayar hutang belanja sebesar Rp763.047.750,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.1.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.193.133.666,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp720.579.673.319,00. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.2.**

Pemerintah Kota Madiun akan melakukan inventarisasi atas tanah dibawah jalan lingkungan paving untuk menyajikan pencatatan aset tanah dibawah konstruksi jalan lingkungan paving.

### **7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>6.698.636.203,19</b>	<b>6.625.595.703,19</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp2.436.417.485,00 berupa penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp2.431.417.485,00 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp5.000.000,00.

Aset tetap lainnya berkurang sebesar Rp2.363.376.985,00 dengan pengurangan aset tetap lainnya berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp2.059.871.521,00, reklas antar aset tetap sebesar Rp259.762.964,00 dan koreksi berupa koreksi aset tetap menjadi ke aset lainnya berupa aset tidak berwujud sebesar Rp43.742.500,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.1.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.179.386.093,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.071.131.843,92. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.2.**

### **7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>6.523.176.460,39</b>	<b>9.539.402.677,35</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Konstruksi dalam pengerjaan bertambah sebesar Rp1.326.396.137,00 berupa perencanaan yang fisik bangunannya akan dibangun tahun berikutnya dan berkurang sebesar Rp4.342.622.353,96 berupa konstruksi dalam pengerjaan karena reklas dari aset tetap dan ke aset tetap untuk dikapitalisasi ke aset tetap induknya sebesar Rp3.440.621.703,96 dan penghapusan sebesar Rp902.000.650,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.6.1.1.**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun belum menyajikan potensi properti investasi berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan menghasilkan pendapatan atas sewa karena belum diatur dalam kebijakan akuntansi. Adapun potensi properti investasi Pemerintah Kota Madiun atas aset tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp141.184.264.669,27 dan aset gedung dan bangunan

dengan nilai perolehan sebesar Rp118.781.460.895,10. Perincian potensi properti investasi dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.

#### 7.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Aset Lainnya</b>	<b>145.210.621.184,33</b>	<b>131.985.533.181,33</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian aset lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Tabel 7.1.4**  
**Perincian Aset Lainnya**

Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
3. Aset tidak berwujud	23.172.037.247,00	23.128.572.247,00
4. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(22.699.916.915,00)	(21.701.067.582,00)
5. Aset tidak berwujud Netto	472.120.332,00	1.427.504.665,00
6. Aset lain-lain	58.843.255.389,37	40.520.839.389,37
7. Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(33.637.654.541,04)	(29.495.710.877,04)
8. Aset lain-lain Netto	25.205.600.848,33	11.025.128.512,33
<b>Jumlah bruto (1+2+3+6)</b>	<b>201.548.192.640,37</b>	<b>183.182.311.640,37</b>
<b>Akumulasi amortisasi + penyusutan (4+7)</b>	<b>(56.337.571.456,04)</b>	<b>(51.196.778.459,04)</b>
<b>Jumlah neto</b>	<b>145.210.621.184,33</b>	<b>131.985.533.181,33</b>

##### 7.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

**Tabel 7.1.4.1**  
**Perincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Perubahan di tahun 2020 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	1	2	3	4
Tuntutan Ganti Rugi				
Pihak ke III	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **7.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>119.532.900.004,00</b>	<b>119.532.900.004,00</b>

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.4.2**  
**Perincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
	1	2	3	4
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>				
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	<b>119.532.900.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.532.900.004,00</b>

### 7.1.4.2.1. Bangun Guna Serah (BOT)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Bangun Guna Serah (BOT)</b>	<b>31.979.755.000,00</b>	<b>31.979.755.000,00</b>

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 7.1.4.2.1

#### Perincian Mutasi Bangun Guna Serah (BOT)

Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)				
Carrefour	8.500.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000,00	0,00	0,00	10.406.250.000,00
Kawasan Suncity	13.073.505.000,00	0,00	0,00	13.073.505.000,00
	<b>31.979.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.979.755.000,00</b>

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu
1	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)	15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parman (eks terminal) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 644.1/03/401.013/2008</u> Nomor : 001/III/KTP/2008 Saat ini dalam proses penilaian atas nilai wajar atas tanah dan bangunan setelah perjanjian berakhir.
2	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)	15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI <u>Nomor : 556/08/401.013/2008</u> Nomor : 001/XII/KTP/2008

		Saat ini dalam proses penilaian atas nilai wajar atas tanah dan bangunan setelah perjanjian berakhir.
3	PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl.Pelita Tama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO <u>Nomor : 415.4/14/401.011/2010</u> Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

#### 7.1.4.2.2.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)</b>	<b>87.553.145.004,00</b>	<b>87.553.145.004,00</b>

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.1.4.2.2**  
**Perincian Mutasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP)**

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	1	2	3	4
Kerjasama Pemanfaatan(KSP)				
Plaza Lawu Madiun	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	<b>87.553.145.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.553.145.004,00</b>

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA <u>Nomor : 030/4/401.202/2017</u>

		Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi tetap sebesar Rp1.250.000.000,00 dihitung mulai tahun 2019 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selain ini, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004,00 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.
--	--	--

### 7.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>23.172.037.247,00</b>	<b>23.128.572.247,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tidak berwujud bertambah sebesar Rp43.465.000,00 berupa penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari reklas aset tetap.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.1.1**.

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.699.916.915,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.701.067.582,00. Perincian amortisasi aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.2.1**.

### 7.1.4.4. Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>58.843.225.389,37</b>	<b>40.520.839.389,37</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain, aset rusak berat belum dihapuskan milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain Per 31 Desember 2023.

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu :

- ☑ Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan aset tetap karena akan diserahkan ke pihak lain.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ☑ Perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih.

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ Penghapusan aset rusak berat dan aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Aset lain-lain berkurang sebesar Rp146.000.000,00 berupa penghapusan.

Aset lain-lain senilai Rp58.843.255.389,37 yang tersaji merupakan aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain. Penyajian atas aset lain-lain antara aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain tercatat dalam satu akun karena aplikasi SIMDA BMD belum bisa mengakomodir dan memisahkan kedua aset tersebut. Adapun perincian sebagaimana berikut :

- ✓ Aset tetap rusak berat senilai Rp2.894.292.011,04 berada di OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- ✓ Aset yang akan diserahkan ke pihak lain senilai Rp31.526.447.447,33 berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang.
- ✓ Aset berupa bangunan gedung yang direncanakan untuk dihapuskan karena dilakukan rehab total senilai Rp6.100.099.931,00, berada di Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- ✓ Berdasarkan koreksi BPK terdapat penyesuaian atas pengakuan Aset lain-lain yang berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO berdasarkan Surat Edaran Nomor : S-574/wp.b.16/2024 tentang penyampaian data saldo rekening treasury deposit facility transfer ke daerah (TDF - TKD) periode 1 Desember 2023 - 12 Januari 2024 sebesar Rp18.468.416.000,00

Tabel 7.1.4.4

## Perincian Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum yang Akan Diserahkan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2014	27.200	775.305.395,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Ahmad Yani	2014	12.800	584.120.074,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2014	37.440	1.222.407.801,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Basuki Rachmad	2014	17.700	620.375.256,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. S. Parman	2014	6.400	513.308.579,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Thamrin	2014	9.600	548.152.730,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Haryono	2014	12.400	763.325.250,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Panjaitan	2014	17.300	1.607.513.490,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2014	15.360	1.496.230.227,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Sukarno Hatta	2014	22.400	1.941.751.956,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Mayjend. Sungkono	2014	16.100	958.716.483,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Lokal	Hotmix	-	2014	3.744	59.904.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2016	-	8.056.148.500,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Khusus Lain-lain	-	pengaspalan halaman polresta madiun	2016	-	202.691.596,00	Polres Madiun Kota
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pengaspalan halaman kantor dan rumah dinas korem	2016	-	407.951.377,00	Kodim
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2020	-	205.316.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2020	-	207.024.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2020	-	207.300.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2020	-	882.298.600,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Penataan Trotoar Pintu Masuk Kota Madiun-Jiwan	2020	-	209.539.000,00	-
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan A.Yani	2020	-	202.654.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Depan INKA	2020	-	206.280.000,00	Kementerian PUPR

Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Yos Sudarso	2020	-	204.879.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I - Jalan Basuki Rahmad (KARGO)	2020	-	1.258.101.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan S.Parman	2020	-	213.318.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jl. DI Panjaitan	2020	-	208.716.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Penataan Kawasan Road Race Bantaran Kali Madiun	2020	-	195.655.000,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kodim 0803	2022	-	459.966.333,33	Kodim
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2022	-	235.992.000,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kejaksaan Negeri	2022	-	925.069.400,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Ruang SKPT Polres Madiun Kota	2022	-	224.335.000,00	Polres Madiun Kota
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pos Polisi Manguharjo	2022	-	227.158.900,00	Polres Madiun Kota
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Yos Sudarso	2022	-	39.600.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Basuki Rahmat	2022	-	49.550.000,00	Kementerian PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	79.200.000,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	1.231.122.100,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	3.777.379.400,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kodim 0803	2023	-	318.091.000,00	Dinas PUPR
					<b>31.526.447.447,33</b>	

Terhadap aset yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR telah dilakukan koordinasi oleh DPU&TR Pemerintah Kota Madiun. Tahapan sebelum pelaksanaan fisik mulai dari ijin dan asistensi perencanaan telah dilakukan dengan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V dan telah mendapatkan persetujuan. Setelah fisik konstruksi selesai dikerjakan dan akan diserahkan, Pihak Kementerian PUPR direncanakan akan meninjau lapangan dan sampai saat ini proses tersebut belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini aset tersebut masih tersaji menjadi aset lain-lain.

Tabel 7.1.4.5

## Perincian Aset Lain-Lain pada yang akan dihapuskan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	126	1.061.880.063,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	94	305.336.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 3 Kota Madiun	2002	544	1.983.886.110,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	243	331.000.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	144	365.400.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Mliwis No. 26	2004	143	238.273.500,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Arwana No. 24, Madiun	1975	189	548.066.400,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	1980	72	15.120.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	144	149.760.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	199	602.466.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	110	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	5	3.900.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	3	1.950.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Beton	TPS. JL. BASUKI RAKHMAD SUKOSARI	2016	58.58	43.061.858,00	Dinas Lingkungan Hidup
					<b>6.100.099.931,00</b>	

Perincian mutasi tambah dan kurang aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.1.1.** Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.637.654.541,04 dan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp29.495.710.877,04. Perincian akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.2.**

## 7.2. UTANG

### 7.2.1. UTANG JANGKA PENDEK

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Jangka Pendek	22.524.854.759,67	14.704.441.851,67

Utang jangka pendek Pemerintah Kota Madiun adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.524.854.759,67 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.704.441.851,67.

Perincian utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.2.1**  
**Perincian Utang Jangka Pendek**

Utang Jangka Pendek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.132.820,00	8.791.710,00
2. Pendapatan diterima dimuka	5.051.616.973,67	4.898.956.358,67
3. Utang belanja	16.872.104.966,00	9.796.693.783,00
<b>Total</b>	<b>22.524.854.759,67</b>	<b>14.704.441.851,67</b>

#### 7.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.132.820,00	8.791.710,00

PFK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp601.132.820,00 disebabkan SP2D tanggal 29 Desember 2023 atas nama Bendahara Pengeluaran BKAD sampai dengan Per 31 Desember 2023 Bank Jatim belum melakukan pemindahbukuan ke Rekening penerima. Daftar SP2D tersebut terdiri dari :

1. SP2D Nomor 1697/LS/2023 sebesar Rp29.062.820,00 Pembayaran Iuran JKN TPG PPPK Bulan Juli s/d Desember 2023, JKN TPG PPPK Bulan Juli s/d Desember 2023 Tahap 2, JKN Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Juli s/d November 2023 ;
2. SP2D Nomor 1698/LS/2023 sebesar Rp436.719.700,00 Pembayaran iuran JKN TPG PNS Bulan Juli s/d Desember 2023, JKN TPG PNS Bulan Juli sd Desember 2023 Tahap 2 dan JKN Tambahan Penghasilan Guru PNS Bulan Juli sd Desember 2023 ;
3. SP2D Nomor 1709/LS/2023 sebesar Rp131.024.168,00 Pembayaran Iuran JKN TPP Beban Kerja PNS Pemkot Kota Madiun Bulan November dibayar Desember 2023 ;
4. SP2D Nomor 1710/LS/2023 sebesar Rp4.326.132,00 Pembayaran Iuran JKN TPP Beban Kerja PNS Pemkot Kota Madiun Bulan November dibayar Desember 2023 ;

### 7.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>5.051.616.973,67</b>	<b>4.898.956.358,67</b>

Pendapatan di terima di muka berasal dari pembayaran atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.051.616.973,67 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.898.956.358,67.

Perincian mutasi pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.051.616.973,67 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7.2.1.2**  
**Perincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka**

Perubahan di tahun 2023	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
	1	2	3	4
Dinas Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
BKAD	1.995.720.122,00	849.722.874,00	1.995.720.122,00	849.722.874,00
Badan Pendapatan Daerah	574.274.371,25	811.369.759,17	574.274.371,25	811.369.759,17

Kecamatan Kartoharjo	1.013.248.616,67	1.081.110.146,00	1.013.248.616,67	1.081.110.146,00
Kecamatan Manguharjo	490.052.223,75	1.093.257.877,50	490.052.223,75	1.093.257.877,50
Kecamatan Taman	748.449.425,00	1.185.052.317,00	748.449.425,00	1.185.052.317,00
Dinas Pertanian dan KP	14.247.000,00	0,00	14.247.000,00	0,00
Dinas Perdagangan	62.964.600,00	31.104.000,00	62.964.600,00	31.104.000,00
	<b>4.898.956.358,67</b>	<b>5.051.616.973,67</b>	<b>4.898.956.358,67</b>	<b>5.051.616.973,67</b>

### 7.2.1.3. Utang Belanja

Utang belanja terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja jasa dan utang belanja modal tahun anggaran 2023 tetapi belum dibayarkan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.872.104.966,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.796.693.783,00. Perincian utang belanja tersaji di tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Utang Belanja</b>	<b>16.872.104.966,00</b>	<b>9.796.693.783,00</b>

**Tabel 7.2.1.3**  
**Perincian Utang Belanja**

Utang Jangka Pendek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Utang Belanja Pegawai	4.261.848.017,50	5.276.851.627,00
2. Utang Belanja Jasa	3.415.274.648,00	2.951.883.802,00
3. Utang Belanja Modal	351.047.830,00	1.567.958.354,00
4. Utang Persediaan (Obat)	8.843.934.470,50	0,00
<b>Total</b>	<b>16.872.104.966,00</b>	<b>9.796.693.783,00</b>

Utang belanja pegawai sebesar Rp4.261.848.017,50 terdiri dari utang belanja TPP beban kerja ASN per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan pada tahun anggaran tahun 2023.

Utang belanja jasa sebesar Rp3.415.274.648,00 yang terdiri dari belanja honorarium daerah sebesar Rp562.700.000,00 dan utang belanja listrik, belanja air, dan belanja telepon/internet yang ada di beberapa

OPD untuk tagihan bulan Desember 2023 sebesar Rp562.700.000,00 dan Jasa Medis dari RSUD sebesar Rp2.712.570.735,00 bulan Desember 2023 yang dibayar di bulan Januari 2024.

Utang belanja atas obat sebesar Rp8.843.934.470,50 di RSUD tahun 2023 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.

## **7.3 EKUITAS**

### **7.3.1. Ekuitas**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>2.806.862.353.839,15</b>	<b>2.798.933.012.648,62</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.806.862.353.839,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.798.933.012.648,62.

## LAPORAN OPERASIONAL (LO)

### 8.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan LO</b>	<b>1.167.775.852.624,59</b>	<b>1.057.305.452.700,09</b>	<b>10,45%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.167.775.852.624,59 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.057.305.452.700,09 terjadi kenaikan sebesar 10,45%

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1**  
**Pendapatan LO**

Pendapatan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	264.360.007.027,12	259.472.840.887,09	1,88%
Pendapatan Transfer LO	880.526.052.824,80	796.504.081.567,00	10,55%
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%
<b>Jumlah</b>	<b>1.167.775.852.624,59</b>	<b>1.057.305.452.700,09</b>	<b>10,45%</b>

### 8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Pendapatan Asli Daerah LO</b>	<b>264.360.007.027,12</b>	<b>259.472.840.887,09</b>	<b>1,88%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan asli daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pajak daerah LO, retribusi daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan lain-lain PAD yang sah LO. Pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp264.360.007.027,12 dibandingkan pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 259.472.840.887,09 terjadi kenaikan sebesar 1,88%.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah LO**

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Pajak Daerah LO	114.046.677.401,10	106.736.313.999,26	6,85%
2. Retribusi Daerah LO	21.264.290.040,92	21.696.850.879,58	(1,99%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	22.714.358.167,73	18.468.304.240,97	22,99%
4. Lain-lain PAD yang sah LO	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)
<b>Jumlah</b>	<b>264.360.007.027,12</b>	<b>259.472.840.887,09</b>	<b>1,88%</b>

### 8.1.1.1. Pajak Daerah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pajak Daerah LO</b>	<b>114.046.677.401,10</b>	<b>106.736.313.999,26</b>	<b>6,85%</b>

Jumlah pendapatan pajak daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel LO, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah LO, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp114.046.677.401,10 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp106.736.313.999,26 terjadi kenaikan sebesar 6,85%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah LO**

Pendapatan Pajak Daerah LO	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Pendapatan Pajak LRA	+	113.514.116.369,67
2. Piutang Pajak Daerah 2023	+	11.995.973.053,35
3. Piutang Pajak Daerah 2022	(-)	(11.226.316.634,00)
4. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2023	(-)	(811.369.759,17)
5. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2022	+	574.274.371,25
<b>Jumlah Pajak Daerah LO (1+2-3-4+5)</b>		<b>114.046.677.401,10</b>

Perincian pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.2**  
**Pendapatan Pajak Daerah LO**

Pendapatan Pajak Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak hotel	8.034.758.525,00	7.119.223.190,00	12,86%
2. Pajak restoran	22.941.828.006,00	19.620.767.915,00	16,93%
3. Pajak hiburan	1.828.328.751,00	1.641.354.092,00	11,39%
4. Pajak reklame	2.140.243.381,08	2.056.916.210,50	4,05%
5. Pajak penerangan jalan	25.674.378.651,18	22.112.356.840,44	16,11%
6. Pajak parkir	1.700.245.616,00	1.435.513.434,55	18,44%
7. Pajak air tanah	321.693.220,84	292.564.417,30	9,96%
8. PBBP2	22.885.528.900,00	24.823.053.835,00	(7,81%)
9. BPHTB	28.519.672.350,00	27.634.564.064,47	3,20%
<b>Total</b>	<b>114.046.677.401,10</b>	<b>106.736.313.999,26</b>	<b>6,85%</b>

1. Pendapatan pajak hotel LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp8.034.758.525,00. Pendapatan pajak Hotel LO tahun 2023 tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp8.130.855.159,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp96.796.634,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp 700.000,00. Pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar 8.034.758.525,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar 7.119.223.190,00 terjadi kenaikan sebesar 12,86%.
2. Pendapatan pajak restoran LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan karcis pajak restoran yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp22.941.828.006,00. Pendapatan Pajak restoran yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.343.654.772,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp500.544.088,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp98.717.322,00. Pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.941.828.006,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak

- restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp19.620.767.915,00 terjadi kenaikan sebesar 16,93%.
3. Pendapatan pajak hiburan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp1.828.328.751,00. Pendapatan pajak hiburan LO tahun 2023 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.845.737.251,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp17.708.500,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp300.000,00. Pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.828.328.751,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.641.354.092,00 terjadi kenaikan sebesar 11,39%.
  4. Pendapatan pajak reklame LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp2.140.243.381,08. Pendapatan pajak reklame LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.304.955.619,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp122.235.590,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp194.618.740,00. Terdapat pendapatan diterima dimuka yang sudah dibayarkan di Tahun sebelumnya sebesar Rp574.274.371,25 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp811.369.759,17. Pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.140.243.381,08 dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.056.916.210,50 terjadi kenaikan sebesar 4,05%.
  5. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Potongan Pajak Penerangan Jalan dari PLN dan non PLN yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp25.674.378.651,18. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.482.333.529,83 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp9.192.539,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp2.201.237.660,35. Pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.674.378.651,18 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.112.356.840,44 terjadi kenaikan sebesar 16,11%.

6. Pendapatan pajak parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp1.700.245.616. Pendapatan pajak parkir LO tahun 2023 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp1.683.862.056,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.072.000,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp17.455.560,00. Pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.700.245.616,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.435.513.434,55 terjadi kenaikan sebesar 18,44%.
7. Pendapatan pajak air tanah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp321.693.220,84. Pendapatan pajak air tanah LO tahun 2023 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp318.395.998,84 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.483.530,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp4.780.752,00. Pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp321.693.220,84 dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp292.564.417,30 terjadi kenaikan sebesar 9,96%.
8. Pendapatan PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp22.885.528.900,00. Pendapatan PBB LO Tahun 2023 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.884.649.634,00 yang menjadi piutang tahun lalu sebesar Rp10.423.184.353,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp9.424.063.619,00. Pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.885.528.900,00 dibandingkan dengan pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.823.053.835,00 terjadi penurunan sebesar 7,81%.
9. Pendapatan BPHTB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp28.519.672.350,00. Pendapatan BPHTB LO yang telah disetor ke kasda sebesar Rp28.519.672.350,00 yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp54.099.400,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp54.099.400,00. Pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 dibandingkan

dengan pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp27.634.564.064,47 terjadi kenaikan sebesar 3,20%.

### 8.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Retribusi Daerah LO</b>	<b>21.264.290.040,92</b>	<b>21.696.850.879,58</b>	<b>(1,99%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan retribusi daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah LO terdiri dari retribusi jasa umum LO, retribusi usaha LO, retribusi perizinan tertentu LO. Pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.264.290.040,92 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.696.850.879,58 terjadi penurunan sebesar 1,99%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.1.2**  
**Retribusi Daerah LO**

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>1. 9.1.02.01 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.791.532.578,00</b>	<b>4.239.820.540,00</b>	<b>(10,57%)</b>
<b>a. 9.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<b>171.940.000,00</b>	<b>167.605.500,00</b>	<b>2,59%</b>
. Dinas Lingkungan Hidup	171.940.000,00	167.605.500,00	2,59%
<b>b. 9.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum</b>	<b>2.984.553.408,00</b>	<b>3.234.432.000,00</b>	<b>(7,73%)</b>
Dinas Perhubungan	2.984.553.408,00	3.234.432.000,00	(7,73%)
<b>c. 9.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>0,00</b>	<b>148.337.000,00</b>	<b>(100%)</b>
Dinas Perhubungan	0,00	148.337.000,00	(100%)

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>d. 9.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>364.421.204,00</b>	<b>427.874.709,00</b>	<b>(14,83%)</b>
Dinas Perhubungan	364.421.204,00	427.874.709,00	(14,83%)
<b>e. 9.1.02.01.11 Retribusi Ulang Tera</b>	<b>71.884.000,00</b>	<b>64.240.500,00</b>	<b>11,90%</b>
Dinas Perdagangan	71.884.000,00	64.240.500,00	11,90%
<b>f. 9.1.02.01.13 Retribusi Pengendalian Menara</b>	<b>198.733.966,00</b>	<b>197.330.831,00</b>	<b>0,71%</b>
Dinas Kominfo	198.733.966,00	197.330.831,00	0,71%
<b>2. 9.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>16.282.356.108,92</b>	<b>16.429.517.339,58</b>	<b>(0,90%)</b>
<b>a. 9.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>8.474.176.086,92</b>	<b>9.007.624.967,58</b>	<b>(5,92%)</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.025.000,00	1.569.000,00	220,27%
Dinas Perumahan dan Permukiman	179.385.000,00	124.405.000,00	44,19%
Disbudparpora	368.756.000,00	250.345.000,00	47,30%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSPDM)	176.450.000,00	174.630.000,00	1,04%
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	4.549.048.537,00	5.457.360.217,00	(16,64%)
Kecamatan Kartoharjo	1.270.070.645,67	1.318.886.834,33	(3,70%)
Kecamatan Taman	1.041.859.888,00	806.562.535,00	29,17%
Kecamatan Manguharjo	840.267.016,25	848.390.856,25	(0,96%)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43.314.000,00	25.475.525,00	70,02%
<b>b. 9.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan</b>	<b>6.263.331.622,00</b>	<b>5.501.134.466,00</b>	<b>13,86%</b>
Dinas Perdagangan	6.263.331.622,00	5.501.134.466,00	13,86%
<b>c. 9.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>784.061.000,00</b>	<b>1.006.457.700,00</b>	<b>(22,10%)</b>
Dinas Perhubungan	784.061.000,00	1.006.457.700,00	(22,10%)
<b>d. 9.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan</b>	<b>23.079.000,00</b>	<b>26.414.000,00</b>	<b>(12,63%)</b>
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.079.000,00	26.414.000,00	(12,63%)
<b>e. 9.1.02.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>	<b>737.708.400,00</b>	<b>887.886.206,00</b>	<b>(16,91%)</b>

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Perumahan dan Pemukiman	12.500.000,00	853.886.206,00	(98,54%)
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	725.208.400,00	34.000.000,00	2.032,97%
<b>3. 9.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.190.401.354,00</b>	<b>1.027.513.000,00</b>	<b>(15,85%)</b>
<b>a. 9.1.02.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan</b>	<b>1.189.201.354,00</b>	<b>1.026.433.000,00</b>	<b>(15,86%)</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.189.201.354,00	<b>1.026.433.000,00</b>	(15,86%)
<b>b. 9.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>11,11%</b>
Dinas Perhubungan	1.200.000,00	1.080.000,00	11,11%
	<b>21.264.290.040,92</b>	<b>21.696.850.879,58</b>	<b>(1,99%)</b>

## 1. Retribusi Jasa Umum

### A. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp171.940.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO periode 31 Desember 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp171.940.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp171.940.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp167.605.500,00 terjadi kenaikan sebesar 2,59%.

### B. Dinas Perhubungan

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO, Retribusi pelayanan pasar LO dan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO.

- ☑ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran dari juru parkir untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp2.984.553.408,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.984.553.408,00 yang menjadi piutang retribusi 2023 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.984.553.408,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.234.432.000,00 terjadi penurunan sebesar 7,73%.
- ☑ Retribusi pelayanan pasar LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pelayanan pasar LO untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pelayanan pasar LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp148.337.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.
- ☑ Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang telah dilakukan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp364.421.204,00. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp364.421.204,00. Retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp364.421.204,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp427.874.709,00 terjadi penurunan sebesar 14,83%.

### **C. Dinas Perdagangan**

Retribusi jasa umum LO berupa retribusi tera ulang LO

- ☑ Retribusi tera ulang LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat

Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp 71.884.000,00. Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 71.884.000,00. Pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp71.884.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp64.240.500,00 terjadi kenaikan sebesar 11,90%.

#### **D. Dinas Kominfo**

Retribusi jasa umum LO berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO.

- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp198.733.966,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp202.331.966,00 dan yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp3.598.000,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp198.733.966,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp197.330.831,00 terjadi kenaikan sebesar 0,71%.

### **2. Retribusi Jasa Usaha**

#### **A. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU dan TR)**

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp5.025.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp5.025.000,00. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.025.000,00 dibandingkan

dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.569.000,00 terjadi kenaikan sebesar 220,27%.

## **B. Dinas Perumahan dan Pemukiman**

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp179.385.000,00. Pendapatan pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 162.385.000,00 yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp17.000.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.385.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp124.405.000,00 terjadi kenaikan sebesar 44,19%.
- Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp12.500.000,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp12.500.000,00. Pendapatn retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO untuk periode 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO periode 31 Desember 2022 sebesar Rp853.886.206,00 terjadi penurunan sebesar 98,54%.

## **C. Dinas Perhubungan**

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi tempat khusus parkir LO.

- Retribusi tempat khusus parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp784.061.000,00. Pendapatan retribusi

tempat parkir khusus LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp784.061.000,00 dan sisanya menjadi piutang 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp784.061.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.006.457.700,00 terjadi penurunan sebesar 22,10%.

#### **D. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp368.756.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp368.756.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp368.756.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp250.345.000,00 terjadi kenaikan sebesar 47,30%.
- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp725.208.400,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp725.208.400,00 yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp725.208.400,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp34.000.000,00 terjadi kenaikan sebesar 2.032,97%.

#### **E. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKDPSDM)**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp176.450.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp136.775.000,00 dan yang menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp39.675.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp176.450.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp174.630.000,00 terjadi kenaikan sebesar 1,04%.

#### **F. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp4.549.048.537,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp3.602.802.949,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp849.722.874,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp1.995.720.122,00 dan sisanya menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp1.724.347.991,00 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.924.099.651,00. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.549.048.537,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.457.360.217,00 terjadi penurunan sebesar 16,64%

#### **G. Kecamatan Kartoharjo**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.270.070.645,67.

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.337.932.175,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.081.110.146,00 dan pendapatan diterima dimuka 2022 sebesar Rp1.013.248.616,67. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.270.070.645,67 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.318.886.834,33 terjadi penurunan sebesar 3,70%.

#### **H. Kecamatan Taman**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.041.859.888,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.478.462.780,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.185.052.317,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp748.449.425,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.041.859.888,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 806.562.535,00 terjadi kenaikan sebesar 29,17%.

#### **I. Kecamatan Manguharjo**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp840.267.016,25. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.443.472.670. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.093.257.877,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp490.052.223,75. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar

Rp840.267.016,25 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp848.390.856,25 terjadi penurunan sebesar 0,96%.

#### **J. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi rumah potong hewan LO.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp43.314.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp29.067.000,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 adalah sebesar Rp14.247.000,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp43.314.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp25.475.525,00 terjadi kenaikan sebesar 70,02%.

Retribusi rumah potong hewan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp23.079.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.079.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp23.079.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp26.414.000,00 terjadi penurunan sebesar 12,63%.

#### **K. Dinas Perdagangan**

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO

Retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan surat ketetapan/perijinan/yang dipersamakan/karcis retribusi

pelayanan pasar untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.263.331.622,00. Pendapatan retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp7.456.013.647,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 adalah sebesar Rp62.964.600,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan adalah sebesar Rp31.104.000,00. Yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp5.105.708.420,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp31.104.000,00. Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp6.263.331.622,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.501.134.466,00 terjadi kenaikan sebesar 13,86%

### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

#### **A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)**

Retribusi perizinan tertentu LO berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) LO.

- Retribusi IMB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan IMB yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.189.201.354,00. Pendapatan retribusi IMB LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.189.201.354,00 dan yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.189.201.354,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.026.433.000,00 terjadi kenaikan sebesar 15,86%.

#### **B. Dinas Perhubungan**

Retribusi perizinan tertentu LO berupa retribusi izin trayek LO.

- Retribusi izin trayek LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan izin trayek yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.200.000,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.200.000,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000,00 dibandingkan dengan pendapatan

retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.080.000,00 terjadi kenaikan sebesar 11,11%.

### 8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO</b>	<b>22.714.358.167,73</b>	<b>18.468.304.240,97</b>	<b>22,99%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.714.358.167,73 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.468.304.240,97 terjadi kenaikan sebesar 22,99%.

Perincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini. Dan tersaji pada lampiran 8.1.1.3

**Tabel 8.1.1.3**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PDAM	14.613.817.270,30	9.073.418.838,00	61,06%
2. BPR Bank Daerah	(263.592.908,00)	631.456.848,00	(141,74%)
3. Aneka Usaha	1.246.653.376,00	1.777.331.264,00	(29,86%)
4. Bank Jatim	7.117.480.429,43	6.986.097.290,97	1,88%
<b>Total</b>	<b>22.714.358.167,73</b>	<b>18.468.304.240,97</b>	<b>22,99%</b>

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.613.817.270,30. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.613.817.270,30 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp9.073.418.838,00 terjadi kenaikan sebesar 61,06%.
2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah sesuai laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan BPR Bank Daerah Tahun 2023 adalah sebesar (Rp263.592.908,00). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar (Rp263.592.908,00) dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp631.456.848,00 terjadi penurunan sebesar 141,74%.
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PD Aneka Usaha LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.246.653.376,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.246.653.376,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.777.331.264,00 terjadi penurunan sebesar 29,86%.
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan Bank Jatim LO Tahun 2023 telah tersaji Rp7.117.480.429,43. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.986.097.290,97 terjadi kenaikan sebesar 1,88%.

#### 8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Lain-lain PAD Yang Sah LO	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp106.334.681.417,37 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan LO, jasa giro LO, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO, hasil pengelolaan dana bergulir LO, pendapatan lain-lain LO, dan pendapatan BLUD LO. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp106.334.681.417,37 dibandingkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp112.571.371.767,28 terjadi penurunan sebesar 5,54%.

Perincian obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.4.1**  
**Lain-Lain PAD yang Sah LO**

4.1.4 Lain-Lain PAD yang sah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4 = (3/2 )
4.1.4.02 Jasa giro	599.729.647,13	89.080.155,53	573,25%
4.1.4.07 Pendapatan Bunga deposito	2.880.498.521,96	6.961.975.880,18	(58,63%)
4.1.4.06 Denda keterlambatan pelaksanaan keg	172.086.543,39	56.062.722,01	206,95%
4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	1.187.998.977,67	2.601.511.678,09	(54,33%)
4.1.4.13 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (LKK)	837.527.189,49	846.963.261,47	(1,11%)
4.1.4.15 Pendapatan BLUD	99.873.032.079,73	101.359.836.043,00	(1,47%)

4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	1	2	3	4 = (3/2)
4.1.4.14	Denda Pajak	629.196.758,00	624.387.027,00	0,77%
4.1.4.21	Denda atas pelanggaran lengkap peraturan daerah	121.838.700,00	0,00	100%
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.773.000,00	31.555.000,00	3,86%
	<b>Jumlah</b>	<b>106.334.681.417,37</b>	<b>112.571.371.767,28</b>	<b>(5,54%)</b>

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.1.4.2**  
**Lain-Lain PAD yang Sah LO - OPD**

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>1. Dinas Naker</b>	<b>762.194.165,48</b>	<b>748.401.433,61</b>	<b>1,84%</b>
a. LKK	762.194.165,48	748.401.433,61	1,84%
<b>2. Dinas Kesehatan dan RSUD</b>	<b>99.873.032.079,73</b>	<b>101.359.836.043,00</b>	<b>(1,47%)</b>
a. Pendapatan BLUD	99.873.032.079,73	101.359.836.043,00	(1,47%)
<b>3. BAPENDA</b>	<b>629.196.758,00</b>	<b>624.387.027,00</b>	<b>0,77%</b>
a. Pendapatan Denda Pajak	629.196.758,00	624.387.027,00	0,77%
<b>4. BKAD</b>	<b>4.915.646.714,16</b>	<b>9.807.192.263,67</b>	<b>(49,88%)</b>
a. Jasa giro	599.729.647,13	89.080.155,53	573,25%
b. Pendapatan bunga deposito	2.880.498.521,96	6.961.975.880,18	(58,63%)
c. Hasil pengelolaan dana bergulir	75.333.024,01	98.561.827,86	(23,57%)
d. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	172.086.543,39	56.062.722,01	206,95%
e. Pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan	1.187.998.977,67	2.601.511.678,09	(54,33%)

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>5. Dinas Perhubungan</b>	<b>121.462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	121.462.500,00	0,00	100%
<b>6. Dinas Pertanian</b>	<b>32.773.000,00</b>	<b>31.555.000,00</b>	<b>3,86%</b>
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	32.773.000,00	31.555.000,00	3,86%
<b>7. Dinas Perkim</b>	<b>376.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	376.200,00	0,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>106.334.681.417,37</b>	<b>112.571.371.767,28</b>	<b>(5,54%)</b>

#### 1. Dinas Naker

- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp762.194.165,48. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp762.194.165,48 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp748.401.433,61 terjadi penurunan sebesar 1,84%.

#### 2. Dinas Kesehatan dan RSUD

- Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp99.873.032.079,73. Terdapat pembayaran piutang tahun berjalan sebesar Rp 7.984.145.183,67 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp6.468.835.722,00. Pendapatan RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp99.873.032.079,73 dibandingkan dengan pendapatan

BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp101.359.836.043,00 terjadi penurunan sebesar 1,47%.

### **3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)**

- Pendapatan Badan Pendapatan Daerah LO berupa Pendapatan lain-lain LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp629.196.758,00. Pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp629.196.758,00 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp624.387.027,00 terjadi kenaikan sebesar 0,77%.

### **4. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

- Pendapatan jasa giro LO berupa pendapatan jasa giro RKUD dan jasa giro pemegang kas LO. Pendapatan jasa giro LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp599.729.647,13. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp599.729.647,13 dibandingkan dengan pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp89.080.155,53 terjadi kenaikan sebesar 573,25%.
- Pendapatan bunga deposito LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan bunga deposito RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp2.880.498.521,96. Pendapatan bunga deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 dibandingkan dengan pendapatan bunga deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.961.975.880,18 terjadi penurunan sebesar 79,88%.
- Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp75.333.024,01. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp75.333.024,01. Dibandingkan dengan pendapatan hasil

pengelolaan dana bergulir LKK Lo untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp98.561.827,86 terjadi penurunan sebesar 23,57%.

- ☑ Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp172.086.543,39. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp172.086.543,39 dibandingkan dengan pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp56.062.722,01 terjadi kenaikan sebesar 206,95%.
- ☑ Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp1.187.998.977,67. Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.187.998.977,67 dibandingkan dengan pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.601.511.678,09 terjadi penurunan sebesar 54,33%.

#### **5. Dinas Perhubungan**

Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp121.462.500,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp121.462.500,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%.

#### **6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Pendapatan penjualan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp32.773.000,00. Pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp32.773.000,00 dibandingkan dengan pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp31.555.000,00 terjadi kenaikan sebesar 3,86%.

## 7. Dinas Perkim

Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp376.200,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp376.200,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%.

### 8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan Transfer LO</b>	<b>880.526.052.824,80</b>	<b>796.504.081.567,00</b>	<b>8,23%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 . Pendapatan transfer LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah untuk tahun berjalan. Pendapatan transfer LO terdiri transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO, transfer pemerintah pusat – lainnya LO, dan transfer pemerintah provinsi LO. Pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp880.526.052.824,80 dibandingkan pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp796.504.081.567,00 terjadi kenaikan sebesar 10,55%.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2**  
**Pendapatan Transfer LO**

Pendapatan Transfer LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Transfer Pemerinta Pusat – Dana Perimbangan LO	684.539.046.012,80	668.609.902.487,00	(0,38%)
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	121.272.084.812,00	99.023.389.080,00	(22,47%)
<b>Total</b>	<b>880.526.052.824,80</b>	<b>796.504.081.567,00</b>	<b>8,23%</b>

### 8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO</b>	<b>684.539.046.012,80</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>(2,38%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO terdiri bagi hasil pajak LO, bagi hasil bukan pajak/SDA LO, DAU LO, DAK LO dan bagi hasil cukai LO. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp684.539.046.012,80 dibandingkan 31 Desember 2022 Rp668.609.902.487,00 terjadi penurunan sebesar 0,38%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.1**  
**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO**

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Bagi hasil pajak LO	42.560.552.000,00	29.804.646.600,00	42,80%
2. Bagi hasil SDA LO	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00	(55,68%)
3. DAU LO	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00	5,10%
4. DAK LO	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00	15,72%
5. Bagi hasil cukai LO	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00	64,93%
<b>Total</b>	<b>684.539.046.012,80</b>	<b>668.609.902.487,00</b>	<b>(0,38%)</b>

### 8.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bagi Hasil Pajak LO</b>	<b>42.560.552.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>(42,80%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan bagi hasil pajak LO terdiri bagi hasil PBB LO, bagi hasil PPh Pasal 21, 25 dan 29 LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.560.552.000,00 dibandingkan pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp29.804.646.600,00 terjadi penurunan sebesar 42,80%.

Berdasarkan koreksi BPK terdapat penyesuaian atas pengakuan Aset Lainnya yang berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO berdasarkan Surat Edaran Nomor : S-574/wpb.16/2024 tentang penyampaian data saldo rekening treasury deposit facility transfer ke daerah (TDF - TKD) periode 1 Desember 2023 - 12 Januari 2024 sebesar Rp18.468.416.000,00.

Perincian pendapatan bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.2.1.1  
Bagi Hasil Pajak LO**

Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PBB LO	2.725.606.000,00	5.510.384.675,00	(50,54%)
2. PPh Pasal 21,25,29 LO	39.834.946.000,00	24.294.261.925,00	(63,97%)
<b>Total</b>	<b>42.560.552.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>	<b>(42,80%)</b>

1. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak-PBB LO dari pemerintah pusat sebesar Rp2.725.606.000,00 untuk masa tahun

2023. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.510.384.675,00 terjadi penurunan sebesar 50,54%.

2. Pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO dari pemerintah pusat sebesar Rp39.834.946.000,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil pajak PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.294.261.925,00 terjadi penurunan sebesar 42,80%.

#### **8.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO</b>	<b>36.475.210.342,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>(55,68%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO terdiri bagi hasil sumber daya kehutanan LO, bagi hasil pungutan hasil perikanan LO, dan bagi hasil pertambangan umum migas LO. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.475.210.342,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp82.308.678.000,00 terjadi penurunan sebesar 55,68%.

Perincian pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.1.2.1.2**  
**Bagi Hasil Bukan Pajak LO**

Bagi Hasil Bukan Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. DBH SDA Minyak Bumi	33.797.056.552,00	76.819.003.249,00	(56,00%)
2. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	12.969.320,00	46.240.672,00	(71,95%)
3. DBH SDA Mineral dan Batu Bara	938.550.591,00	3.049.142.985,00	(69,22%)
4. DBH SDA Kehutanan	281.746.668,00	435.980.094,00	(35,38%)
5. DBH SDA Perikanan	1.444.887.211,00	1.958.311.000,00	(26,22%)
<b>Total</b>	<b>36.475.210.342,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>	<b>(55,68%)</b>

1. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp33.797.056.552,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp33.797.056.552,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp76.819.003.249,00 terjadi penurunan sebesar 56,00%.
2. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- panas bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp 12.969.320,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp12.969.320,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp46.240.672,00 terjadi penurunan sebesar 71,95%.
3. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO dari pemerintah pusat sebesar Rp938.550.591,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir

31 Desember 2023 sebesar Rp938.550.591,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.049.142.985,00 terjadi penurunan sebesar 69,22%.

4. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp281.746.668,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp281.746.668,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp435.980.094,00 terjadi penurunan sebesar 35,38%.
5. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp1.444.887.211,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 terjadi penurunan sebesar 26,22%.

### **8.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum (DAU) LO**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Dana Alokasi Umum LO</b>	<b>487.141.770.396,00</b>	<b>463.486.748.121,00</b>	<b>5,10%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan DAU LO mengakui

penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp487.141.770.396,00 apabila dibandingkan pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp463.486.748.121,00 terjadi kenaikan sebesar 5,10%.

#### 8.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Dana Alokasi Khusus/DAK LO</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>15,72%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan DAK LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 bahwa untuk Dana Alokasi Khusus Pemerintah Madiun mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus dengan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 82.402.483.839,80. Pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.402.483.839,80 dibandingkan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp71.207.048.405,00 terjadi kenaikan sebesar 15,72%.

Perincian pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.1.4  
Dana Alokasi Khusus LO**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
4.2.01.01.03 DAK Fisik	5.699.869.054,00	2.921.025.894,00	95,13%
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	76.702.614.785,80	68.286.022.511,00	12,33%
<b>Jumlah</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>71.207.048.405,00</b>	<b>15,72%</b>

### 8.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bagi Hasil Cukai LO</b>	<b>35.959.029.435,00</b>	<b>21.802.781.361,00</b>	<b>64,93%</b>

Jumlah pendapatan bagi hasil cukai LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil cukai LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp35.959.029.435,00 dibandingkan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp21.802.781.361,00 terjadi kenaikan sebesar 64,93%.

### 8.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>158,79%</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO terdiri dana otonomi khusus LO dan dana penyesuaian LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 dibandingkan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi kenaikan sebesar 158,79%

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.2**  
**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO**

<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00
2. Dana penyesuaian LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
<b>Total</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>158,79%</b>

**8.1.2.2.1.Dana Penyesuaian LO**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Dana Penyesuaian LO</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>158,79%</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana penyesuaian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan dana penyesuaian LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana penyesuaian LO terdiri dana insentif daerah (DID) LO dan dana insentif daerah tambahan LO.

Perincian pendapatan dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.2.1**  
**Dana Penyesuaian LO**

<b>Dana Penyesuaian LO</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Dana insentif daerah (DID) LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
<b>Total</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>	<b>158,79%</b>

Pendapatan dana insentif daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana insentif daerah LO, untuk tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Madiun mendapatkan alokasi pendapatan dana insentif daerah LO sebesar Rp74.714.922.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,0

dibandingkan pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 mengalami kenaikan sebesar 158,79%.

### 8.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Transfer Pemerintah Provinsi LO</b>	<b>121.272.084.812,00</b>	<b>99.023.389.080,00</b>	<b>22,47%</b>

Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO terdiri dana bagi hasil pajak LO dan dana bagi hasil lainnya LO. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp99.023.389.080,00 terjadi kenaikan sebesar 22,47%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.3**  
**Transfer Pemerintah Provinsi LO**

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dana bagi hasil pajak LO	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00	22,67%
2. Dana bagi hasil lainnya LO	0,00	0,00	0,00
3. Bantuan Keuangan LO	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)
<b>Total</b>	<b>121.272.084.812,00</b>	<b>99.023.389.080,00</b>	<b>22,47%</b>

#### 8.1.2.3.1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pendapatan Dana Bagi Pajak LO</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>22,67%</b>

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri pajak kendaraan bermotor (PKB) LO, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) LO, pajak pemanfaatan air permukaan LO, dan pajak rokok LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00 terjadi penurunan sebesar 22,67%.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.3.1**  
**Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO**

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PKB LO	34.918.489.800,00	30.500.722.060,00	14,48%
2. BBNKB LO	15.339.681.100,00	13.983.937.380,00	9,70%
3. Pajak bahan bakar kendaran bermotor LO	29.292.250.400,00	18.943.492.380,00	54,63%
4. Pajak air permukaan LO	371.681.600,00	270.478.040,00	37,42%
5. Pajak Rokok LO	40.643.479.300,00	34.585.376.220,00	17,52%
<b>Total</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>98.284.006.080,00</b>	<b>22,67%</b>

1. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil PKB LO sebesar Rp34.918.489.800,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp30.500.722.060,00 terjadi kenaikan sebesar 14,48%.
2. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil BBNKB LO sebesar Rp15.339.681.100,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan

dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp13.983.937.380,00 terjadi kenaikan sebesar 9,70%.

3. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO sebesar Rp29.292.250.400,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp18.943.492.380,00 terjadi kenaikan sebesar 54,63%.
4. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak air permukaan LO sebesar Rp371.681.600,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp371.681.600,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.478.040,00 terjadi kenaikan sebesar 37,42%.
5. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak rokok LO sebesar Rp40.643.479.300,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 40.643.479.300,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp34.585.376.220,00 terjadi kenaikan sebesar 17,52%.

### 8.1.2.3.2. Bantuan Keuangan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi LO</b>	<b>706.502.612,00</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>(4,45%)</b>

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO berupa bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LO, bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO, bantuan keuangan community college LO, bantuan keuangan BOP Madiun LO, bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO, bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO, Kegiatan Seleksi dan Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Diknas Berprestasi LO, Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas rawat Inap dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp706.502.612,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp739.383.000,00 terjadi penurunan sebesar 4,45 %.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.2.3.2**  
**Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO**

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bantuan keuangan dari provinsi LO	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)
<b>Total</b>	<b>706.502.612,00</b>	<b>739.383.000,00</b>	<b>(4,45%)</b>

### **8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO</b>	<b>22.889.792.772,67</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>1.622,94%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun

pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO terdiri pendapatan hibah LO, pendapatan darurat LO, pendapatan lainnya LO. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.889.792.772,67 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 terjadi kenaikan sebesar 1.622,94%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.3**  
**Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO**

<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Pendapatan hibah LO	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%
2. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.889.792.772,67</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>1.622,94%</b>

### **8.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah LO**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Pendapatan Dana Hibah LO</b>	<b>22.889.792.772,67</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>1.622,94%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Pendapatan dana hibah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana hibah terdiri pendapatan hibah tugas pembantuan dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah dekonsentrasi dari provinsi, pendapatan hibah dari bantuan operasional sekolah, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SDN LO yang dianggarkan di BPKAD selaku SKPKD, pendapatan hibah blockgrant LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah provinsi LO, pendapatan hibah barang dari komite LO, pendapatan hibah lainnya LO. Pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar

Rp22.889.792.772,67 dibandingkan pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 terjadi kenaikan sebesar 1.622,94%.

Perincian pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.1.3.1**  
**Pendapatan Hibah LO**

<b>Pendapatan Dana Hibah LO</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1.Pendapatan Hibah LO Dinkes	265.329.805,00	138.095.610,00	92,13%
2. Pendapatan Hibah LO DPU	1.164.905.527,67	0,00	100%
3. Pendapatan Hibah LO Dinas Perkim	20.604.672.812,00	0,00	100%
4. Pendapatan Hibah LO Satpol PP	42.327.500,00	0,00	100%
6. Pendapatan Hibah LO Dinsos	50.400.000,00	0,00	100%
7. Pendapatan Hibah LO Dishub	2.438.739,00	0,00	100%
8. Pendapatan Hibah LO Diskominfo	2.020.270,00	278.000.000,00	(99,27%)
10. Pendapatan Hibah LO Dispora	55.114.200,00	0,00	100%
9. Pendapatan Hibah LO Dinas Perpus	10.149.000,00	85.986.500,00	(88,20%)
10. Pendapatan Hibah LO Pereksos	533.000.000,00	194.100.000,00	174,60%
11. Pendapatan Hibah LO Sekwan	4.499.000,00	0,00	100%
12.Pendapatan Hibah LO Manguharjo	4.550.000,00	0,00	100%
13. Pendapatan Hibah LO Kec. Taman	80.385.919,00	0,00	100%
14. Pendapatan Hibah LO Bag. Umum	0,00	398.986.500,00	(100%)
15. Pendapatan Hibah LO Disnaker	0,00	26.061.636,00	(100%)
16. Pendapatan Hibah LO Dukcapil	0,00	203.700.000,00	(100%)
17. Pendapatan Hibah LO Kec.Kartoharjo	0,00	3.600.000,00	(100%)
18. Pendapatan Hibah Dinas Perdagangan	70.000.000,00	0,00	100%
<b>Total</b>	<b>22.889.792.772,67</b>	<b>1.328.530.246,00</b>	<b>1.622,94%</b>

## 8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Operasi</b>	<b>1.137.849.555.033,26</b>	<b>1.084.574.793.500,74</b>	<b>4,91%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban lain-lain terdiri dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi (asset extracom). Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.137.849.555.033,26 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.574.793.500,74 terjadi kenaikan 4,91%

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2**  
**Beban Operasi**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban pegawai	422.881.149.234,89	402.259.612.087,25	5,13%
2. Beban persediaan	162.232.535.065,04	161.980.339.760,76	0,16%
3. Beban jasa	247.925.077.120,63	243.168.503.606,19	1,96%
4. Beban pemeliharaan	31.556.734.043,18	33.681.434.482,28	(6,31%)
5. Beban perjalanan dinas	42.894.685.591,00	39.903.387.457,00	7,50%
6. Beban Subsidi	99.146.000,00	6.480.445.500,00	(98,47%)
7. Beban hibah	44.134.020.599,50	11.682.323.718,00	277,78%
8. Beban bantuan sosial	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00	(4,34%)
9. Beban Penyisihan Piutang	578.175.207,58	1.450.381.015,56	(60,14%)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
10. Beban Penyusutan	150.036.103.064,44	146.351.482.025,70	2,52%
11. Beban Amortisasi	998.849.333,00	1.985.993.167,00	(49,71%)
12. Beban Penyusutan Aset Lain-lain	492.226.518,00	441.991.276,00	11,37%
13. Beban Lain-lain	2.215.995.756,00	1.940.713.725,00	14,18%
<b>Jumlah</b>	<b>1.137.849.555.033,26</b>	<b>1.084.574.793.500,74</b>	<b>4,91%</b>

### 8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % (Rp)
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai</b>	<b>422.881.149.234,89</b>	<b>402.259.612.087,25</b>	<b>5,13%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang didanai dari APBD tahun anggaran 2023, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp422.881.149.234,89 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp402.259.612.087,25 terjadi kenaikan sebesar 5,13%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.1**  
**Beban Pegawai**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022**

Beban Pegawai	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai APBD	+	415.044.760.473,39
2. Belanja Pegawai BOS	+	0,00
3. Belanja Pegawai BLUD	+	8.851.392.371,00
4. Utang Belanja Pegawai 2023	+	4.261.848.017,50
5. Utang Belanja Pegawai 2022	(-)	(5.276.851.627,00)
<b>Jumlah Beban Pegawai (1+2+3+4-5)</b>		<b>422.881.149.234,89</b>

### 8.2.1.1. Beban Pegawai APBD

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai (APBD)</b>	<b>415.044.760.473,39</b>	<b>394.493.672.383,25</b>	<b>5,21%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah, beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp415.044.760.473,39 dibandingkan beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp394.493.672.383,25 terjadi kenaikan sebesar 5,21%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.1.1**  
**Beban Pegawai APBD**

Beban Pegawai Per OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	159.677.191.999,00	146.745.814.706,00	8,81%
Dinas Kesehatan KB	63.072.294.006,00	50.335.461.548,00	25,30%
Dinas PU TR	6.741.362.679,00	7.294.620.499,00	(7,58%)
Dinas Perkim	4.787.941.364,00	4.928.758.233,00	(2,86%)
Kantor Satpol PP	6.239.014.742,00	6.921.448.013,00	(9,86%)
BPBD	1.701.613.226,00	1.529.845.511,00	11,23%

<b>Beban Pegawai Per OPD</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
Dinas Sosial	5.424.675.511,00	5.240.733.141,00	3,51%
Dinas Tenaga Kerja	5.067.862.752,00	4.725.786.477,00	7,24%
Dinas LH	9.297.966.573,00	10.126.696.205,00	(8,18%)
Dispendukcapil	4.317.572.955,00	3.763.290.319,00	14,73%
Dinas Perhubungan	6.228.595.727,00	6.340.822.791,00	(1,77%)
Dinas Infokom	4.931.346.454,00	5.148.484.206,00	(4,22%)
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.818.343.136,00	3.784.736.829,00	0,89%
Dinas Budparpora	4.265.260.370,00	4.147.363.429,00	2,84%
Dinas Perpustakaan	3.723.966.456,00	3.340.386.062,00	11,48%
Bagian Pemerintahan	816.749.507,00	783.029.832,00	4,31%
Bagian Organisasi	790.595.690,00	752.659.122,00	5,04%
Bagian Umum	11.090.677.770,00	10.527.377.772,00	5,35%
Bagian Hukum	829.661.789,00	1.167.982.365,00	(28,97%)
Bagian Perekkesra	906.628.617,00	979.512.379,00	(7,44%)
Bagian Adbang	1.652.305.058,00	1.531.030.620,00	7,92%
Sekretariat DPRD	17.377.019.689,00	18.575.840.357,00	(6,45%)
BKD	5.690.093.810,00	5.494.527.396,00	3,56%

Beban Pegawai Per OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
BPKAD	18.764.087.938,00	20.477.087.237,00	(8,37%)
Bapenda	7.725.180.552,39	8.693.387.116,25	(11,14%)
Inspektorat	7.166.570.507,00	7.297.810.514,00	(1,80%)
BAPPEDA	4.693.769.022,00	4.706.023.722,00	(0,26%)
Kec Kartoharjo	10.742.772.955,00	10.978.147.747,00	(2,14%)
Kec Manguharjo	11.070.556.260,00	10.998.897.097,00	0,65%
Kec Taman	10.266.975.319,00	11.216.851.061,00	(8,47%)
Bakesbangpol	3.618.182.330,00	3.424.160.333,00	5,67%
Dinas Pertanian KP	4.204.677.559,00	4.184.281.170,00	0,49%
Dinas Perdagangan	8.343.248.151,00	8.330.818.574,00	0,15%
<b>Total</b>	<b>415.044.760.473,39</b>	<b>394.493.672.383,25</b>	<b>5,21%</b>

### 8.2.1.2. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pegawai BLUD</b>	<b>8.851.392.371,00</b>	<b>8.411.320.725,00</b>	<b>5,23%</b>

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai BLUD mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai

akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.851.392.371,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.411.320.725,00 terjadi kenaikan sebesar 5,23%.

Perincian beban pegawai BLUD yang berakhir periode 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.1.2**  
**Beban Pegawai BLUD**

<b>Beban Pegawai BLUD</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. RSUD	8.851.392.371,00	8.142.010.725,00	5,23%
2. Puskesmas Ngegong	0,00	57.980.000,00	(100%)
3. Puskesmas Manguharjo	0,00	42.296.000,00	(100%)
4. Puskesmas Banjarejo	0,00	42.296.000,00	(100%)
5. Puskesmas Demangan	0,00	43.096.000,00	(100%)
6. Puskesmas Sukosari	0,00	42.296.000,00	(100%)
7. Puskesmas Tawangrejo	0,00	41.346.000,00	(100%)
<b>Total</b>	<b>8.851.392.371,00</b>	<b>8.411.320.725,00</b>	<b>5,23%</b>

### **8.2.1.3. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Beban Pegawai BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.667.000,00</b>	<b>(100%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban

pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.501.667.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

Beban Pegawai BOS sebesar Rp0,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri. Perincian beban pegawai BOS yang berakhir untuk periode 31 Desember 2023 tersaji pada table dibawah ini.

**Tabel 8.2.1.3**  
**Beban Pegawai BOS**

<b>Beban Pegawai BOS</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
1. Pegawai BOS SDN	0,00	694.447.500,00	(100%)
2. Pegawai BOSSMPN	0,00	807.220.000,00	(100%)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.667.500,00</b>	<b>(100%)</b>

## **8.2.2. Beban Persediaan**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)-100%</b>
<b>Beban Persediaan</b>	<b>162.232.535.065,04</b>	<b>161.980.339.760,76</b>	<b>0,16%</b>

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan konsumsi/pemakaian persediaan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2023 hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan

dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2023. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga setiap belanja barang jasa berupa belanja persediaan di catat sebagai beban persediaan dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp162.232.535.065,04 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp161.980.339.760,76 terjadi kenaikan sebesar 0,16%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.2**  
**Beban Persediaan**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023**

Uraian	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Pemakaian Persediaan Tahun Lalu	+	11.423.499.720,00
2. Belanja Persediaan APBD	+	119.688.351.728,50
3. Belanja Persediaan BLUD	+	31.180.220.179,00
4. Belanja Persediaan BOS	+	8.048.488.778,00
5. BOK	+	2.902.052.980,00
6. Reklas Barang Jasa	-	(7.851.641.994,50)
7. Utang Belanja	+	9.211.207.065,30
8. Koreksi Utang	-	(367.272.594,80)
9. Koreksi Aset	+	30.030.000,00
10. Sisa Persediaan Tahun 2023	-	(12.032.400.796,46)
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8+9-10)</b>		<b>162.232.535.065,04</b>

### 8.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Jasa</b>	<b>247.925.077.120,63</b>	<b>243.168.503.606,19</b>	<b>1,96%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp247.925.077.120,63 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp243.168.503.606,19 terjadi kenaikan sebesar 1,96%.

Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.3**  
**Beban Jasa**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023**

Beban Jasa	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja jasa APBD	+	194.536.222.012,63
2. Belanja jasa BLUD	+	7.849.373.216,00
3. Belanja jasa BOS	+	48.646.782.419,00
4. BOK	+	817.486.346,00
5. Utang Jasa 20NN	+	3.419.081.173,00
6. Utang Jasa 20NN-1	-	(2.949.683.802,00)
7. Koreksi Beban Jasa	+	440.000,00
8. Koreksi Beban Jasa	-	(474.063.684,00)
9. Penyesuaian Aset	-	(32.440.000,00)
10. Reklas Aset	+	402.413.790,00
11. Hibah	-	(3.926.482.600,00)
12. Koreksi Belanja Non Tunai	-	(364.051.750,00)
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8-9+10-11-12)</b>		<b>247.925.077.120,63</b>

#### **8.2.4. Beban Pemeliharaan**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>31.556.734.043,18</b>	<b>33.681.434.482,28</b>	<b>(6,31%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.556.734.043,18 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.681.434.482,28 penurunan sebesar 6,31%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.4**  
**Beban Pemeliharaan**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023**

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja pemeliharaan APBD	+	25.428.091.070,18
2. Belanja pemeliharaan BLUD	+	3.986.889.031,00
3. Belanja pemeliharaan BOS	+	1.738.679.342,00
4. BOK	+	1.000.000,00
5. Utang 20NN	+	0,00
6. Utang 20NN-1	-	(0,00)
7. Koreksi Aset	+	402.074.600,00
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)</b>		<b>31.556.734.043,18</b>

### 8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>42.894.685.591,00</b>	<b>39.903.387.457,00</b>	<b>7,50%</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023 dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2022. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.894.685.591,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp39.903.387.457,00 terjadi kenaikan sebesar 7,50%

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.5**  
**Beban Perjalanan Dinas**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023**

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja Perjalanan Dinas APBD	+	40.389.273.004,00
2. Belanja Perjalanan Dinas BLUD	+	1.569.751.087,00
3. Belanja Perjalanan Dinas BOS	+	119.905.000,00
4. Utang 20NN	+	0,00
5. Utang 20NN-1	(-)	(0,00)
6. BOK	+	815.756.500,00
<b>Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)</b>		<b>42.894.685.591,00</b>

### 8.2.6. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Subsidi</b>	<b>99.146.000,00</b>	<b>6.480.445.500,00</b>	<b>(98,47%)</b>

Jumlah tersebut merupakan beban Subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi dampak inflasi pada masyarakat. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi dalam program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

### 8.2.7. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Hibah</b>	<b>44.134.020.599,50</b>	<b>11.682.323.718,00</b>	<b>277,78%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban hibah mengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah mengakui hibah berasal dari belanja OPD tahun anggaran 2023 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana bantuan keuangan parpol, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp44.134.020.599,50 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.682.323.718,00 terjadi kenaikan sebesar 277,78%.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.7**  
**Beban Hibah**

<b>Beban Hibah</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Prosentase %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=(2/3x100%)(100%</b>
1. Beban Hibah Dinas Pendidikan	5.704.289.840,00	1.803.165.500,00	216,35%
2. Beban Hibah Dinas Kesehatan	3.918.238.964,50	1.954.821.762,00	100,44%
3. Beban Hibah DPU	10.358.184.000,00	0,00	100%
4. Beban Hibah Dinas Perkim	94.200.000,00	0,00	100%
5. Beban Hibah Dinas Sosial	644.600.000,00	0,00	100%
6. Beban Hibah Disnaker	102.797.900,00	0,00	100%
7. Beban Hibah DLH	469.950.000,00	0,00	100%
8. Beban Hibah Dishub	14.320.000,00	0,00	100%
9. Beban Hibah Diskominfo	12.000.000,00	0,00	100%
10. Beban Hibah PTSP	23.500.000,00	0,00	100%
11. Beban Hibah Dinas Kebudayaan	3.569.082.100,00	2.616.657.956,00	36,40%
12. Beban Hibah Dinas Perpustakaan	32.865.000,00	0,00	100%
13. Beban Hibah Bag. Pemerintahan	67.000.000,00	0,00	100%
14. Beban Hibah Bag. Organisasi	90.000.000,00	0,00	100%
15. Beban Hibah Bag. Perekonomian	3.526.465.000,00	2.722.665.000,00	29,52%
16. Beban Hibah Bapelitbangda	44.265.000,00	0,00	100%
17. Beban Hibah Kec. Mangu	546.075.557,00	0,00	100%
18. Beban Hibah Kec. Taman	331.598.700,00	119.700.000,00	177,02%
19. Beban Hibah Kesbangpol	13.000.563.500,00	2.465.313.500,00	427,34%
20. Beban Hibah Disperta	1.584.025.038,00	0,00	100%
<b>Total Beban Hibah</b>	<b>44.134.020.599,50</b>	<b>11.682.323.718,00</b>	<b>277,78%</b>

## 8.2.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>(4,34%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan keuangan yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.804.857.500,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.248.185.680,00 terjadi penurunan sebesar 4,34%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

**Tabel 8.2.8**  
**Beban Bansos**

Beban Bansos	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Beban Bansos Dinas Pendidikan	10.481.900.000,00	10.028.550.000,00	4,52%
2. Beban Bansos Perkim	2.100.000.000,00	1.260.000.000,00	66,67%
3. Beban Bansos Dishub	0,00	109.074.180,00	(100%)
4. Beban Bansos BPBD	50.000.000,00	60.000.000,00	(16,67%)
5. Beban Bansos Dinsos	12.604.157.500,00	16.893.861.500,00	(25,39%)
6. Beban Bansos Bag.Pereksos	6.568.800.000,00	4.896.700.000,00	34,15%
<b>Jumlah</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>	<b>(4,34%)</b>

## 8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>578.175.207,58</b>	<b>1.450.381.015,56</b>	<b>(60,14%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasi berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban penyisihan piutang mengakui penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp578.175.207,58 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.450.381.015,56 terjadi kenaikan sebesar 60,14%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.9**  
**Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak Daerah	21.951.902,84	1.019.206.309,96	(97,85%)
2. Retribusi Daerah	97.530.700,40	431.174.705,60	(77,38%)
3. Piutang lain-lain	15.423.834,34	0,00	100%
4. Investasi Dana Bergulir	443.268.770,00	0,00	100%
<b>Jumlah</b>	<b>578.175.207,58</b>	<b>1.450.381.015,56</b>	<b>(60,14%)</b>

## 8.2.10. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>150.036.103.064,44</b>	<b>146.351.482.025,70</b>	<b>2,52%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp150.036.103.064,44 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp146.351.482.025,70 terjadi kenaikan sebesar 2,52%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.10**  
**Beban Penyusutan Aset Tetap**

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Peralatan dan Mesin	67.378.238.257,44	61.292.556.933,78	9,93%
2. Gedung dan Bangunan	21.228.960.991,00	19.047.868.279,00	11,45%
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.320.649.566,00	65.911.397.564,00	(6,97%)
4. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	108.254.250,00	99.659.248,92	8,62%
<b>Jumlah</b>	<b>150.036.103.064,44</b>	<b>146.351.482.025,70</b>	<b>2,52%</b>

### 8.2.11. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>998.849.333,00</b>	<b>1.985.993.167,00</b>	<b>(49,71%)</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp998.849.333,00. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp998.849.333,00 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.985.993.167,00 terjadi penurunan sebesar 49,71%.

## 8.2.12. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>492.226.518,00</b>	<b>441.991.276,00</b>	<b>11,37%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset lain-lain akibat dilakukan koreksi atas penyusutan aset lain-lain yang tahun 2023 tidak dilakukan penyusutan. Belum dilakukan penyusutan atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023. Beban penyusutan aset lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 Rp492.226.518,00 dibandingkan beban penyusutan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp441.991.276,00 terjadi kenaikan sebesar 11,37%.

## 8.2.13. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>2.215.995.756,00</b>	<b>1.940.713.725,00</b>	<b>14,18%</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.215.995.756,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.940.713.725,00 terjadi kenaikan sebesar 14,18%

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.13.1**  
**Beban Lain-Lain**

Beban Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Reklas BM tidak memenuhi kapitalisasi AT</b>			
1. Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	156.124.235,00	287.658.011,00	(45,73%)
3. Gedung dan Bangunan	0,00	17.582.660,00	(100%)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00

Beban Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
5. Aset Tetap Lainnya	2.059.871.521,00	1.635.473.054,00	25,95%
<b>Jumlah</b>	<b>2.215.995.756,00</b>	<b>1.940.713.725,00</b>	<b>14,18%</b>

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 8.2.13.2**  
**Beban Lain-lain OPD**

Penambahan selama 2023	KIB A (Rp)	KIB B (Rp)	KIB C (Rp)	KIB D (Rp)	KIB E (Rp)
Beban Lain-lain	1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	0,00	80.956.084,00	0,00	0,00	1.994.402.371,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	60.315.817,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	4.892.404,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	2.105.180,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	6.410.250	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP&UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	65.469.150,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penambahan selama 2023	KIB A (Rp)	KIB B (Rp)	KIB C (Rp)	KIB D (Rp)	KIB E (Rp)
	1	2	3	4	5
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Bagian Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bapenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Taman	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>156.124.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.871.521,00</b>

Beban lain-lain atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.215.995.756,00.

### 8.3. Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(452.881.988,00)</b>	<b>(1.799.730.285,00)</b>	<b>(74,84%)</b>

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus (defisit) kegiatan non operasional Kota Madiun yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Kegiatan Non Operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian jangka panjang, defisit penjualan aset non lancar, defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2023

sebesar Rp452.881.988,00 dibandingkan dengan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 Rp.1.799.730.285,00 terjadi penurunan 74,84%.

### 8.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>	<b>449.118.662,00</b>	<b>481.163.643,00</b>	<b>(6,66%)</b>

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus penjualan aset non lancar yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp449.118.662,00.

### 8.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>902.000.650,00</b>	<b>2.280.893.928,00</b>	<b>(60,45%)</b>

Jumlah tersebut adalah defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp902.000.650,00 dibandingkan dengan defisit dari kegiatan non operasional lainnya periode 31 Desember 2022 Rp2.280.893.928,00 terjadi penurunan 60,45%..

### 8.4. Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>(50,49%)</b>

Jumlah tersebut adalah adalah beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023. Beban pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan beban tidak terduga. Beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.238.717.822 dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 Rp2.502.082.962,00 terjadi penurunan 50,49%

### 8.4.1. Beban Tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
<b>Beban Tidak Terduga</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>	<b>(50,49%)</b>

Jumlah tersebut adalah terdiri dari beban tidak terduga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.238.717.822 terdiri dari pembayaran sisa dana bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.038.250,00, pembayaran ganti rugi sewa tanah aset milik Pemerintah Kota Madiun tahun 2021-2022 kelurahan Klegen kecamatan Kartoharjo sebesar Rp2.014.000,00, pengembalian dana retribusi sewa GOR pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 sebesar Rp12.400.000,00, pengembalian dana BOSP tahun 2020 sampai dengan 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp640.715.446,00, pengembalian kelebihan pembayaran PBB a.n PT Hasta Mulya Putra pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp12.851.376,00, belanja kegiatan program tekan inflasi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp551.363.000,00, pengembalian kelebihan bayar retribusi PBG a.n Duhuri Permata pada Dinas PU sebesar Rp5.176.000,00, pengembalian dana pajak reklame Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp13.159.750,00.

**Tabel 8.4.1**  
**Perincian OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023**

Nama OPD	Realisasi 2023 (Rp)
1	2
BKAD	1.038.250,00
Kec Kartoharjo	2.014.000,00
Disbudparpora	12.400.000,00
Dinas Pendidikan	640.715.446,00
Bapenda	12.851.376,00
Dinas Perdagangan	551.363.000,00
DPU	5.176.000,00
DISHUB	13.159.750,00
<b>Total</b>	<b>1.238.717.822,00</b>

## PENJELASAN POS - POS

### LAPORAN ARUS KAS

#### 9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

##### 9.1.1. ARUS KAS MASUK

##### 9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>106.165.312.122,76</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1  
Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.950.000.000,00	8.130.855.159,00	116,99	7.026.280.556,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	20.230.000.000,00	23.343.654.772,00	115,39	19.278.495.104,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.612.500.000,00	1.845.737.251,00	114,46	1.638.210.592,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.304.955.619,00	115,25	2.114.017.568,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	21.528.250.000,00	23.482.333.529,83	109,08	22.103.164.301,44
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.530.000.000,00	1.683.862.056,00	110,06	1.434.441.434,55
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	270.000.000,00	318.395.998,84	117,92	292.100.851,30
4.1.01.15. PBB P2	23.944.700.000,00	23.884.649.634,00	99,75	24.574.559.488,00
4.1.01.16. BPHTB	26.175.000.000,00	28.519.672.350,00	108,96	27.704.042.227,47
<b>Jumlah</b>	<b>104.240.450.000,00</b>	<b>113.514.116.369,67</b>	<b>108,90</b>	<b>106.165.312.122,76</b>

### 9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>21.385.348.837,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.2**  
**Retribusi Daerah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.446.515.665,00</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>122,25</b>	<b>21.385.348.837,00</b>

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>1. 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.684.675.940,00</b>	<b>3.797.537.578,00</b>	<b>103,06</b>	<b>4.255.304.240,00</b>
a. 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	155.000.000,00	171.940.000,00	110,93	167.605.500,00
b. 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.898.595.940,00	2.986.960.408,00	103,05	3.234.432.000,00
c. 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar.	0,00	0,00	0,00	148.337.000,00
d. 4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	410.020.000,00	364.421.204,00	88,88	427.874.709,00
e. 4.1.2.01.11 Retribusi Ulang Tera	61.060.000,00	71.884.000,00	117,73	64.240.500,00
f. 4.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000,00	202.331.966,00	126,46	212.814.531,00
<b>2. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>14.010.759.725,00</b>	<b>17.563.133.621,00</b>	<b>125,35</b>	<b>16.102.531.597,00</b>
a. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.420.305.425,00	8.564.678.574,00	39,29	9.075.075.225,00
b. 4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	4.970.924.300,00	7.456.013.647,00	88,78	5.100.253.966,00
c. 4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	627.120.000,00	781.654.000,00	124,64	1.012.902.200,00
d. 4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	23.079.000,00	71,21	26.414.000,00
e. 4.1.2.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	960.000.000,00	737.708.400,00	76,84	887.886.206,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>3. 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>751.080.000,00</b>	<b>1.190.401.354,00</b>	<b>158,49</b>	<b>1.027.513.000,00</b>
a. 4.1.2.03.01				
Retribusi Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	1.189.201.354,00	158,56	1.026.433.000,00
b. 4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek	1.080.000,00	1.200.000,00	111,11	1.080.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.446.515.665,00</b>	<b>22.551.072.553,00</b>	<b>122,25</b>	<b>21.385.348.837,00</b>

### 9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</b>	<b>14.983.008.032,73</b>	<b>15.595.752.355,97</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.3**  
**Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.03.02.01 Bank Jatim	7.117.480.529,00	7.117.480.429,43	100,00	6.986.097.290,97
4.1.03.02.01 BPR Bank Daerah	579.904.398,00	579.904.398,00	100,00	930.412.525,00
4.1.03.02.02 PD Aneka Usaha	1.177.685.900,00	0,00	0,00	800.615.164,00
4.1.03.02.03 PDAM	7.285.623.200,00	7.285.623.205,30	100,00	6.878.627.376,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.160.694.027,00</b>	<b>14.983.008.032,73</b>	<b>92,71</b>	<b>15.595.752.355,97</b>

#### 9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan lain-lain PAD yang sah</b>	<b>104.057.177.790,22</b>	<b>120.584.652.558,82</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.4**  
**Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.01 Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.554.999,00
4.1.04.05 Jasa Giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
4.1.04.06 Hasil pengelolaan dana bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	58,72	98.561.827,86
4.1.04.07 Pendapatan bunga	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
4.1.04.11 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
4.1.04.12 Pendapatan denda pajak daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
4.1.04.13 Pendapatan denda retribusi daerah	28.122.900,00	121.838.700,00	433,24	0
4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
<b>Jumlah</b>	<b>122.967.683.216,00</b>	<b>104.057.177.790,22</b>	<b>84,62</b>	<b>120.584.652.558,82</b>

### 9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>29.804.646.600,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.5**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.001 DBH PBB	2.725.606.000,00	2.725.606.000,00	100	5.510.384.675,00
4.2.01.01.01.003 DBH PPh Pasal 25 dan 29	21.366.530.000,00	21.366.530.000,00	100	24.294.261.925,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>24.092.136.000,00</b>	<b>100</b>	<b>29.804.646.600,00</b>

### 9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>36.475.210.342,00</b>	<b>82.308.678.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.6**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 DBH SDA Minyak Bumi	29.896.423.000,00	33.797.056.552,00	113,05	76.819.003.249,00
4.2.01.01.01.0007 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.728.000,00	12.969.320,00	133,32	46.240.672,00
4.2.01.01.01.0009 DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	687.558.000,00	938.550.591,00	136,50	3.049.142.985,00
4.2.01.01.01.0010 DBH SDA Kehutanan-PSDH	244.509.000,00	281.746.668,00	115,23	435.980.094,00
4.2.01.01.01.0013 DBH Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.071.352.000,00</b>	<b>36.475.210.342,00</b>	<b>113,73</b>	<b>82.308.678.000,00</b>

### 9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Alokasi Umum</b>	<b>487.141.770.396,00</b>	<b>463.486.748.121,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

**Tabel 9.1.1.7**  
**Penerimaan Dana Alokasi Umum**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0001 DAU Murni Formula	459.655.490.000,00	459.508.986.396,00	99,97	463.486.748.121,00
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100	0,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	22.232.784.000,00	22.232.784.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>487.288.274.000,00</b>	<b>487.141.770.396,00</b>	<b>99,97</b>	<b>463.486.748.121,00</b>

### 9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Alokasi Khusus</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>71.207.048.405,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.8**  
**Penerimaan Dana Alokasi Khusus**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	89,05	2.921.025.894,00
4.2.01.01.03 DAK Non Fisik	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	87,20	68.286.022.511,00
<b>Jumlah</b>	<b>94.358.814.000,00</b>	<b>82.402.483.839,80</b>	<b>87,20</b>	<b>71.207.048.405,00</b>

### 9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai</b>	<b>35.959.029.435,00</b>	<b>21.802.781.361,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Tabel 9.1.1.9**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.04 DBH Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.607.909.000,00</b>	<b>35.959.029.435,00</b>	<b>121,45</b>	<b>21.802.781.361,00</b>

### 9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>98.284.006.080,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.10**  
**Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.01.0001 DBH PKB	28.601.641.000,00	34.918.489.800,00	122.09	30.500.722.060,00
4.2.02.01.01.0002 DBH BBNKB	12.062.084.000,00	15.339.681.100,00	127.17	13.983.937.380,00
4.2.02.01.01.0003 DBH PBBKB	17.363.013.000,00	29.292.250.400,00	168.70	18.943.492.380,00
4.2.02.01.01.0004 DBH Air Permukaan	231.250.000,00	371.681.600,00	160.73	270.478.040,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.01.0005 Pajak Rokok	37.405.500.000,00	40.643.479.300,00	108.66	34.585.376.220,00
<b>Total</b>	<b>95.663.488.000,00</b>	<b>120.565.582.200,00</b>	<b>126.03</b>	<b>98.284.006.080,00</b>

### 9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi</b>	<b>706.502.612,00</b>	<b>739.383.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.11**  
**Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Pemprov	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%	739.383.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>618.902.600,00</b>	<b>706.502.612,00</b>	<b>114,15%</b>	<b>739.383.000,00</b>

### 9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Dana Penyesuaian</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>28.870.790.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.12**  
**Penerimaan Dana Penyesuaian**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118.03%	28.870.790.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.300.891.000,00</b>	<b>74.714.922.000,00</b>	<b>118.03%</b>	<b>28.870.790.000,00</b>

### 9.1.1.13. Penerimaan Hibah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terdapat realisasi penerimaan hibah disebabkan karena pendapatan hibah dana BOS pada tahun anggaran 2023 reklas menjadi penerimaan DAK Non Fisik.

Perincian penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.1.13**  
**Penerimaan Hibah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9.1.2. ARUS KAS KELUAR

### 9.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran pegawai</b>	<b>423.896.152.844,39</b>	<b>404.406.660.608,25</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.1**  
**Pembayaran Pegawai**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	235.945.666.095,00	210.825.345.289,00	89,35	205.776.281.913,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.060.181.873,00	132.981.043.160,00	90,43	120.137.167.684,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	66.868.963.435,00	64.056.690.831,33	95,79	51.522.008.317,25
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	14.980.503.217,00	14.287.484.704,00	95,37	15.392.700.656,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.859.590.633,00	912.138.860,06	49,05	934.173.813,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	741.600.000,00	731.340.000,00	98,62	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.364.400.000,00	0,00	0,00	1.501.667.500,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	115.310.000,00	102.110.000,00	88,55	8.411.320.725,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>468.936.215.253,00</b>	<b>423.896.152.844,39</b>	<b>90,40</b>	<b>404.406.660.608,25</b>

### 9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran barang dan Jasa</b>	<b>487.718.322.693,31</b>	<b>474.775.658.285,04</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas BLUD dan kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.2**  
**Pembayaran Barang dan Jasa**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.01 Belanja Barang	130.795.592.613,00	122.590.404.708,50	93,73	115.594.663.182,78
5.1.02.02 Belanja Jasa	204.871.335.191,00	191.169.925.758,63	93,31	183.234.906.322,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	26.250.933.904,00	25.428.091.070,18	96,87	25.800.670.244,28
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	44.184.775.959,00	41.205.029.504,00	93,26	37.852.741.707,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.730.804.000,00	4.183.782.600,00	88,44	4.496.435.749,00
5.1.02.88 Belanja Barang Jasa BOS	16.493.491.830,00	17.756.446.336,00	107,66	15.861.064.197,98
5.1.02.99 Belanja Barang Jasa BLUD	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00
<b>5.1.02 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>513.171.846.360,00</b>	<b>487.718.322.693,31</b>	<b>95,04</b>	<b>474.775.658.285,04</b>

### 9.1.2.3. Pembayaran Subsidi

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran Subsidi</b>	<b>99.146.000,00</b>	<b>6.480.445.500,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota pada Dinas Perdagangan.

#### 9.1.2.4. Pembayaran Hibah

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran hibah</b>	<b>32.355.896.005,00</b>	<b>11.562.623.718,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/16/2023 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perincian pengeluaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.4  
Belanja Hibah**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.487.861.000,00	6.383.188.600,00	98,39	0,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	30.752.212.295,00	25.022.143.905,00	81,37	10.612.060.218,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	950.563.500,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>38.190.636.795,00</b>	<b>32.355.896.005,00</b>	<b>84,72</b>	<b>11.562.623.718,00</b>

### 9.1.2.5. Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran Bantuan Sosial</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>33.248.185.680,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.5  
Belanja Bantuan Sosial**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	28.044.911.700,00	27.376.940.000,00	97,62	28.528.115.680,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	00,00	113.400.000,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	4.727.890.000,00	4.427.917.500,00	93,66	4.606.670.000,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>32.772.801.700,00</b>	<b>31.804.857.500,00</b>	<b>97,05</b>	<b>33.248.185.680,00</b>

### 9.1.2.6. Pembayaran Tidak terduga

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pembayaran Tidak Terduga</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 9.1.2.6**  
**Pembayaran Tidak Terduga**

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	551.363.000,00	262.205.712,00
Belanja Jasa	0,00	1.708.752.850,00
Belanja Perjalanan	0,00	321.160.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Pengembalian	641.753.696,00	209.964.400,00
Pengembalian Pajak	26.011.126,00	0,00
Pengembalian Retribusi	17.576.000,00	0,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah	2.014.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.238.717.822,00</b>	<b>2.502.082.962,00</b>

### 9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>140.049.918.705,72</b>	<b>127.259.490.688,26</b>

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

**Tabel 9.1.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	1.117.163.011.570,42	1.060.235.147.441,55
Arus kas keluar	(977.113.092.864,70)	(932.975.656.753,29)
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>140.049.918.705,72</b>	<b>127.259.490.688,26</b>

## 9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

### 9.2.1. ARUS KAS MASUK

#### 9.2.1.1 Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Penjualan Aktiva Tetap</b>	<b>449.118.662,00</b>	<b>481.163.643,00</b>

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan alat angkut dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Pendidikan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Inspektorat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Perincian penjualan aktiva tetap untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.1.1**  
**Penjualan Aktiva Tetap**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Penjualan Alat Angkut</b>		
1. Bagian Umum	150.620.000,00	78.910.453,00
2. Badan Pendapatan Daerah	32.726.541,00	16.389.994,00
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		19.580.995,00
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah		19.796.866,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.919.096,00	0,00
6. Dinas Pekerjaan Umum	19.962.499,00	0,00
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.478.999,00
8. Dinas Perdagangan		81.769.999,00
9. Dinas Sosial		32.924.994,00
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	20.820.449,00
11. Dinas Kesehatan dan KB	129.351.976,00	19.520.098,00
12. Puskemas Banjarejo	15.455.677,00	0,00
13. Puskesmas Ngegong	6.744.999,00	0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup	10.300.000,00	24.425.799,00
15. Dinas Perumahan dan Permukiman	3.700.000,00	0,00
11.Dinas Penanaman Modal	0,00	2.769.999,00
12. Kelurahan Patihan	3.349.999,00	0,00
13. Kecamatan Manguharjo	0,00	5.439.998,00
14.Dinas Pendidikan	0,00	2.769.999,00
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.278.875,00	0,00
15. Satuan Pamong Praja	0,00	15.770.000,00
<b>Jumlah Penjualan Alat Angkut</b>	<b>448.409.662,00</b>	<b>344.368.642,00</b>
<b>Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>709.000,00</b>	<b>136.795.000,00</b>
<b>Jumlah total Aktiva Tetap</b>	<b>449.118.662,00</b>	<b>481.163.643,00</b>

## 9.2.2. ARUS KAS KELUAR

### 9.2.2.1. Perolehan Modal Tanah

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan Modal Tanah	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, yang berasal dari perolehan modal Tanah untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

### 9.2.2.2. Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	71.585.868.051,04	53.011.211.346,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.2**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>73.145.003.249,00</b>	<b>71.585.868.051,04</b>	<b>97,87</b>	<b>53.011.211.346,00</b>
5.2.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.660.786.600,00	2.654.100.000,00	99,87	3.436.776.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	3.377.556.750,00	3.243.522.130,00	96,03	26.814.906.500,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	81.655.000,00	81.120.000,00	99,34	327.688.765,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	129.870.000,00	128.500.000,00	98,95	16.650.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	5.137.916.366,00	4.624.879.550,00	90,01	9.475.981.185,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	923.791.522,00	872.617.018,00	94,46	910.538.025,00
5.2.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	5.571.940.953,00	4.804.418.371,00	86,23	1.957.878.063,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Komputer	50.195.953.480,00	50.089.399.142,00	99,79	2.628.164.333,00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.530.000,00	25.308.000,00	99,13	195.950.000,00
5.2.3.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	0,00	1.490.625,00
5.2.3.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.999.563,00
5.2.3.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.080.000,00	35.030.000,00	97,09	147.073.890,00
5.2.3.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu	3.076.259.437,00	3.058.049.636,04	99,41	4.549.069.492,00
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	127.800.000,00	126.928.500,00	99,32	200.220.000,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	999.056.841,00	1.048.869.678,00	104,99	1.852.590.889,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	800.806.300,00	793.126.026,00	99,04	486.234.016,00

### 9.2.2.3. Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan modal gedung dan bangunan	80.940.539.683,65	72.843.838.757,97

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.3**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>83.254.511.750,00</b>	<b>80.940.539.683,65</b>	<b>97,22</b>	<b>72.843.838.757,97</b>
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	82.001.521.750,00	79.753.930.683,65	97,26	71.911.964.241,57
5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	687.590.000,00	681.564.000,00	99,12	265.076.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	115.738.000,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000,00	505.045.000,00	89,33	551.060.516,40

#### **9.2.2.4. Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan</b>	<b>62.832.477.443,00</b>	<b>103.137.296.907,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.4**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.04.01 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>64.036.113.165,00</b>	<b>62.832.477.443,00</b>	<b>98,12</b>	<b>103.137.296.907,00</b>
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	35.368.976.275,00	34.989.390.906,00	98,93	59.563.387.262,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	24.934.457.040,00	24.239.146.850,00	97,76	43.115.947.645,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	3.157.850.000,00	3.125.017.187,00	98,96	457.962.000,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	0,00

### 9.2.2.5. Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Perolehan modal aset tetap lainnya</b>	<b>2.431.417.485,00</b>	<b>3.442.102.691,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.2.5**  
**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
<b>5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya</b>	<b>2.436.647.041,00</b>	<b>2.431.417.485,00</b>	<b>99,79</b>	<b>3.442.102.691,00</b>
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	135.737.440,00	73.487.150,00	54,14	145.110.700,00

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05.02 Belanja Modal Barang				
Bercorak Kesenian/	298.400.000,00	263.074.464,00	88,16	244.755.000,00
Kebudayaan/ Olah				
5.2.05.05 Belanja Modal	0,00	0,00	00,00	29.342.850,00
Tanaman				
5.2.05.08 Belanja Modal Aset	145.000.000,00	43.465.000,00	29,98	1.129.431.000,00
Tidak Berwujud				
5.2.05.88 Belanja Modal Aset	1.857.509.601,00	2.051.390.871,00	110,44	1.451.797.553,00
Tetap Lainnya BOS				
5.2.05.99 Belanja Modal Aset	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00
Tetap Lainnya BLUD				

### 9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(217.341.184.000,69)</b>	<b>(231.953.286.058,97)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.2.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	449.118.662,00	481.163.643,00
Arus kas keluar	(217.790.302.662,69)	(232.434.449.701,97)
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(217.341.184.000,69)</b>	<b>(231.953.286.058,97)</b>

### 9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

### 9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2023 dan tahun 2022, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

#### 9.3.1.1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.198.000,00	800.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

### 9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

#### 9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.198.000,00	800.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.3.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	1.198.000,00	800.000,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

## **9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **9.4.1. ARUS KAS MASUK**

#### **9.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
<b>Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)</b>	<b>61.215.397.853,00</b>	<b>59.270.137.579,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.4.1.1**  
**Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
<b>Total</b>	<b>61.215.397.853,00</b>	<b>59.270.137.579,00</b>

## 9.4.2. ARUS KAS KELUAR

### 9.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
<b>Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)</b>	<b>60.623.056.743,00</b>	<b>59.278.397.517,00</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris yang berasal dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dan Pengeluaran fihak ketiga (PFK) merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di OPD yang baru ditransfer ke rekening masing-masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2023.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.4.2.1**  
**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	0,00	59.278.397.517,00
Sisa Uang Persediaan	60.623.057.743,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60.623.056.743,00</b>	<b>59.278.397.517,00</b>

### 9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas transitoris</b>	<b>592.341.110,00</b>	<b>(8.259.938,00)</b>

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.4.3**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
Arus kas keluar	(60.623.056.743,00)	(59.278.397.517,00)
<b>Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris</b>	<b>592.341.110,00</b>	<b>(8.259.938,00)</b>

## 9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9.5**  
**Kenaikan (Penurunan) Kas**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	140.049.918.705,72	127.259.490.688,26
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(217.341.184.000,69)	(231.953.286.058,97)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.198.000,00	800.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	592.341.110,00	(8.259.938,00)
<b>Jumlah kenaikan (penurunan) kas</b>	<b>(76.697.726.184,97)</b>	<b>(104.701.255.308,71)</b>

## 9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini

**Tabel 9.6**  
**Saldo Akhir Kas**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(76.697.726.184,97)	(104.701.255.308,71)
Saldo awal kas daerah dan Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	6.254.896.034,24	7.457.912.123,59
Saldo awal kas di BLUD RSUD	64.695.549.324,61	61.231.491.260,82
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	10.236.077,000	6.402.708,00
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
Saldo awal Kas Lainnya BOS	465.593.889,35	1.265.487.451,33
Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	8.791.710,00	0,00
<b>Jumlah saldo akhir kas</b>	<b>114.554.737.972,46</b>	<b>191.252.464.157,43</b>
Saldo Akhir Kas	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	601.132.820,00	0,00
Saldo akhir kas di BLUD Dinas Kesehatan	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
Saldo akhir kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	10.230.722,00	7.662.000,00
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	2.574.077,00
Saldo akhir Kas Lainnya BOS	610.481.593,15	465.593.889,35
Saldo akhir Kas Lainnya PFK	0,00	8.791.710,00
<b>Jumlah saldo akhir kas</b>	<b>114.554.737.972,46</b>	<b>191.252.464.157,43</b>

## PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 10.1. Ekuitas Awal

Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
Ekuitas awal	2.798.933.012.648,62	2.810.414.582.202,98

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022.

### 10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus (Defisit) LO	28.234.697.781,33	(31.571.154.047,65)

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

### 10.3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Lain-lain	(20.305.356.590,80)	20.089.584.493,29

Jumlah tersebut merupakan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perincian ekuitas lain-lain Per OPD dan rincian ekuitas lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersebut dibawah ini. Rincian ekuitas lain-lain Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 10.3**  
**Rincian Ekuitas Lain - Lain per OPD**

Perubahan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
<b>Ekuitas Lain - Lain</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Dinas Pendidikan	(2.511.605.365,00)	63.844.445,00
2. Dinas Kesehatan & KB	(173.648.485,69)	83.797.469,35
3. Dinas PU & TR	(16.138.805.447,77)	(906.472.666,00)
4. Dinas Perkim	(7.261.835.290,53)	20.542.154.970,00
5. Satpol PP	1.299.868,00	-1,00
6. BPBD	809.984,00	-13,00
7. Dinas Sosial	1.445.917.953,00	2,00
8. Dinas Tenaga Kerja	(347.088.607,17)	(671.294.545,45)
9. Dinas Lingkungan Hidup	219.087.041,00	-65,00
9. Dispendukcapil	2.276.959,00	(2.602.752,00)
10 Dinas Perhubungan	788.712.915,00	49.617.759,00
11. Dinas Infokom	325.350.172,00	190.645,00
12. Dinas PM PTSP	869.335,00	(19,00)
13. Dinas Budparpora	2.069.550.575,00	38.719.991,00
14. Dinas Perpustakaan	(5,00)	(191.833.256,00)
15. Bagian Pemerintahan	(582.083,00)	0,00
16. Bagian Organisasi	0,00	0,00
17. Bagian Umum	2.050.739.830,71	361.406.822,00
18. Bagian Hukum	0,00	-5,00
19. Bagian Perekokesra	990.003,00	0,00
20. Bagian Adbang	(1.418.542,00)	0,00
21. Sekretariat DPRD	2.147.792,00	44,00

Perubahan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
	1	2
<b>Ekuitas Lain - Lain</b>		
22. BKD	1.249.699,00	4,00
23. BKAD	(8.158.080.355,05)	6.066.415,00
24. BAPENDA	1.335.254.292,57	261.422.966,39
25. Inspektorat	614.832.697,00	0,00
26. Bapelitbangda	392.447.509,00	0,00
27. Kec. Kartoharjo	1.548.190.339,33	(812.243,00)
28. Kec. Manguharjo	1.089.444.116,00	(1.923.768,00)
29. Kec. Taman	2.818.684.250,00	1.255.859,00
30. Bakesbangpol	9.969.600,00	0,00
31. Dinas Pertanian & KP	( 1.759.991,00 )	(11,00)
32. Dinas Perdagangan	15.990.618,80	456.046.446,00
<b>Total</b>	<b>(20.305.356.590,80)</b>	<b>20.089.584.493,29</b>

LAMPIRAN 10.3B

LAIN – LAIN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
				31-Dec-23
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	MENCATAT PENYESUIAN MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DLH TAHUN 2023	62.160.000,00	-	62.160.000,00
	MENCATAT PENYESUIAN MUTASI KELUAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN UPTD KEC TAMAN KE BKAD TAHUN 2023	-	445.985.480,00	- 445.985.480,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.832.317.917,00	- 1.832.317.917,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	31.781.183,00	-	31.781.183,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	44,00	-	44,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	96,00	-	96,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	499,00	-	499,00
	KOREKSI BPK MENCATAT ASET LAIN-LAIN PADA DINAS PENDIDIKAN KURANG SAJI ATAS BEBAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN DI TAHUN 2023		314.243.790,00	- 314.243.790,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP TANAH KE BKAD		13.000.000,00	- 13.000.000,00
				-
		<b>93.941.822,00</b>	<b>2.605.547.187,00</b>	
			<b>- 2.511.605.365,00</b>	
<b>DINAS KESEHATAN &amp; KB</b>	MENCATAT HIBAH ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI RUMAH SAKIT SOGATEN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KEPADA NURUL HAYAT TAHUN 2023	-	43.850.000,00	- 43.850.000,00
	MENCATAT PENGAKUAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINKES BERUPA 3 MOBIL AMBULANS DARI APBD KE BAZNAS SENILAI RP145.000.000,00 ; RPM SENILAI RP150.000.000,00 KE PMI SENILAI RP74.000.000,00 TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINKES KE DINAS SOSIAL BERUPA 3 TEMPAT TIDUR DI TAHUN 2023	-	73.110.000,00	- 73.110.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	11.886.966,00	- 11.886.966,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS KESEHATAN DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT RSUD DI TAHUN 2023	-	44.801.567,42	- 44.801.567,42
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN RSUD DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN RSUD DI TAHUN 2023	25,00	-	25,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN RSUD DI TAHUN 2023	3,00	-	3,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DINKES DI TAHUN 2023	23,73	-	23,73

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		51,73	173.648.537,42	
			- 173.648.485,69	
PUPR	PENGAKUAN REALISASI PEMBAYARAN ATAS UTANG BELANJA MODAL - PERENCANAAN GEDUNG BANGUNAN	368.613.200,00	-	368.613.200,00
	PENGAKUAN UTANG BELANJA ATAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ATAS ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN	1.056.731.380,00	-	1.056.731.380,00
	MENCATAT KOREKSI PENGURANGAN KARENA DOUBLE CATAT ASET TETAP TANAH JALAN DI TAHUN 2023	-	820.180.000,00	- 820.180.000,00
	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KE BUDPARPORA BERUPA INVENTARIS STADION WILIS TAHUN 2023	-	52.646.081,00	- 52.646.081,00
	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP BERUPA INVENTARIS STADIUN WILIS KE BUDPARPORA TAHUN 2023	-	11.715.024.863,33	- 11.715.024.863,33
	MENCATAT PENYESUAIAN BERKURANGNYA ASET LAIN-LAIN YANG DISERAHKAN KE BUDPARPORA BERUPA BARANG INVENTARIS DI TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN TAHUN 2023	-	10,00	- 10,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	165.979.813,00	- 165.979.813,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTANGEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	18.593.405,56	-	18.593.405,56
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	41,00	-	41,00
	ASET LAIN-LAIN PADA DPU PR KURANG SAJI BEBAN DAN AKUMULASI KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		3.403.568.124,00	- 3.403.568.124,00
	PENGAKUAN REALISASI PEMBAYARAN ATAS UTANG BELANJA MODAL - PERENCANAAN GEDUNG BANGUNAN		368.613.200,00	- 368.613.200,00
	PENGAKUAN UTANG BELANJA ATAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ATAS ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN		1.056.731.380,00	- 1.056.731.380,00
		1.443.938.026,56	17.582.743.474,33	
			-16.138.805.447,77	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>DINAS PERKIM</b>	PENGAKUAN REALISASI UTANG BELANJA MODAL ATAS PERENCANAAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2022 YANG DIBAYARKAN DI TAHUN 2023	142.613.774,00	-	142.613.774,00
	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KENDARAAN RODA 3 /KOREKSI ATAS SALAH JURNAL PER 30 SEPTEMBER 2023 YANG SEHARUSNYA TANPA RK PPKD PERALATAN MESIN KARENA BUKAN MUTASI ASET ANTAR OPD TETAPI PENGHAPUSAN DI TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN KARENA MEMENUHI KRITERIA BARANG PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7.870.115.664,53	- 7.870.115.664,53
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	-	11.649,00	- 11.649,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN SEBELUMNYA KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	533.384.628,00	-	533.384.628,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	665,00	-	665,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	100,00	-	100,00
	KOREKSI BPK ATAS BEBNAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN DI TAHUN 2023		2.338.000,00	- 2.338.000,00
	KOREKSI BPK ATAS BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMUALSI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN		65.369.144,00	- 65.369.144,00
				-
		<b>675.999.167,00</b>	<b>7.937.834.457,53</b>	
			<b>- 7.261.835.290,53</b>	
<b>SATPOL PP</b>	KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.299.870,00	-	1.299.870,00
	KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
		<b>1.299.870,00</b>	<b>2,00</b>	
			<b>1.299.868,00</b>	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>BPBD</b>	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	810.000,00	- 810.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	8,00	-	8,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	8,00	-	8,00
		<b>16,00</b>	<b>810.000,00</b>	
			<b>- 809.984,00</b>	
<b>DINSOS</b>	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINAS KESEHATAN BERUPA 3 TEMPAT TIDUR DI TAHUN 2023	73.110.000,00	-	73.110.000,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA BANGUNAN SRINDIT DARI DPU & TR DI TAHUN 2023	1.371.007.954,00	-	1.371.007.954,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2023	-	4,00	- 4,00
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	3,00	-	3,00
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.800.000,00	-	1.800.000,00
		<b>1.445.917.957,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1.445.917.953,00</b>
			<b>1.445.917.953,00</b>	
<b>DISNAKER</b>	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	4.999.666,00	- 4.999.666,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	4,00	-	4,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	KOREKSI LABA YANG DIBAGIKAN 40%	-	343.286.942,17	- 343.286.942,17
	MENCATAT KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN INVESTASI DANA BERGULIR KARENA TELAH DIBAYAR	1.198.000,00	-	1.198.000,00
		<b>1.198.004,00</b>	<b>348.286.611,17</b>	
			<b>- 347.088.607,17</b>	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	MENCATAT MUTASI ASET TETAP YANG DIHIBAHKAN BERUPA GEROBAK SAMPAH KE KORAMIL KOTA TAHUN 2023	-	4.440.000,00	- 4.440.000,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DINAS PENDIDIKAN SENILAI RP77.700.000,00 ; KEL. KARTOHARJO SENILAI Rp83.250.000,00 ; KEL. MANGUHARJO SENILAI RP38.850.000,00 ; KEL. TAMAN SENILAI RP66.600.000,00 DI TAHUN 2023.	-	213.120.000,00	- 213.120.000,00
	MENCATAT PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA DUA	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.527.166,00	- 1.527.166,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	10,00	- 10,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	101,00	-	101,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	32,00	-	32,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAI-LAIN PADA DLH LEBIH SAJI BEBAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN KARENA HITUNG APLIKASI	2,00	-	2,00
		<b>135,00</b>	<b>219.087.176,00</b>	
			<b>- 219.087.041,00</b>	
<b>DUKCAPIL</b>	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	2.276.960,00	- 2.276.960,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	2,00	-	2,00
				-
		<b>2,00</b>	<b>2.276.961,00</b>	
			<b>- 2.276.959,00</b>	
				-

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>DINHUB</b>	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM BERUPA PARKIR JALAN JAWA TAHUN 2023	494.560.920,00	-	494.560.920,00
	KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	294.151.666,00	-	294.151.666,00
	KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN OPERALATAMMESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	173,00	- 173,00
	KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	58,00	-	58,00
	KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	444,00	-	444,00
				-
		<b>788.713.088,00</b>	<b>173,00</b>	
			<b>788.712.915,00</b>	
				-
<b>DISKOMINFO</b>	KOREKSI KURANG CATAT TAHUN SEBELUMNYA ATAS ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MENARA TOWER	262.500.000,00	-	262.500.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	62.850.000,00	-	62.850.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	2,00	-	2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KURANG CATAT DI TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	172,00	-	172,00
		<b>325.350.174,00</b>	<b>2,00</b>	
			<b>325.350.172,00</b>	
<b>DINAS PTSP</b>	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	869.312,00	-	869.312,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMUBLATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMUBLATAN DI TAHUN 2023	16,00	-	16,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		869.335,00	-	
			869.335,00	
				-
<b>DINAS BUDPORA</b>	MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023	52.646.081,00	-	52.646.081,00
	MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG BANGUNAN 2023	2.016.904.484,00	-	2.016.904.484,00
	MENCATAT PENYESUAIAN KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	10,00	-	10,00
		2.069.550.575,00	-	
			2.069.550.575,00	
<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>	KOREKSI PEMBULATAN ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT	-	5,00	- 5,00
		-	5,00	
			- 5,00	
<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	582.083,00	- 582.083,00
		-	582.083,00	- 582.083,00
			- 582.083,00	
<b>BAGIAN UMUM</b>	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KE BAPENDA	-	398.037.500,00	- 398.037.500,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KE BAPPEDA	-	398.037.500,00	- 398.037.500,00
	MENCATAT PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	11.662.573,00	-	11.662.573,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG BANGUNAN DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	25,71	-	25,71
	MENCATAT MUTASI TAMBAH ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR DI TAHUN 2023	2.835.152.234,00	-	2.835.152.234,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		2.846.814.832,71	796.075.002,00	
			2.050.739.830,71	
<b>BAGIAN PEREKOKESRA</b>	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	990.000,00	-	990.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	3,00	-	3,00
		990.003,00	-	
			990.003,00	
<b>BAGIAN ADBANG</b>	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1.418.541,00	- 1.418.541,00
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00
		-	1.418.542,00	
			- 1.418.542,00	
<b>SEKRET. DPRD</b>	MENCATAT PENYESUIAN UBAH MASA MANFAAT ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2023	2.147.933,00	-	2.147.933,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUIAN KARENA PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2023	-	142,00	- 142,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUIAN KARENA PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2023	1,00	-	1,00
		2.147.934,00	142,00	
			2.147.792,00	
<b>BKD</b>	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.249.710,00	-	1.249.710,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	6,00	- 6,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	5,00	- 5,00
		1.249.710,00	11,00	
			1.249.699,00	
<b>BKAD</b>	MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI BKAD KE INSPEKTORAT ATAS RUMAH DINAS EKS KETUA DPRD DI TAHUN 2023	-	17.920.760,00	- 17.920.760,00
	MUTASI TAMBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI PENDIDIKAN CABANG DINAS KECAMATAN TAMAN DI TAHUN 2023	445.985.480,00	-	445.985.480,00
	MUTASI KURANG ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KE INSPEKTORAT DI TAHUN 2023	-	18.648.833,00	- 18.648.833,00
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA DOBLE CATAT AKUMULASI DI TAHUN SEBELUMNYA	95.985.000,00	-	95.985.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT TAHUN 2023	852.456,95	-	852.456,95
	KOREKSI TAMBAH PEMBULATAN NILAI PENYERTAAN MODAL KE PDAM SEBESAR RP2,00 DI TAHUN 2023	2,00	-	2,00
	MENCATAT PENYESUJIAN KERUGIAN BANK DAERAH ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED ATAS PEROLEHAN LABA PD BANK DAERAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2023	-	7.719.592.095,00	- 7.719.592.095,00
	KOREKSI BPK ATAS MUTASI ASET TETAP TANAH DARI CABANG DINAS KECAMATAN TAMAN DINAS PENDIDIKAN KE BKAD DI TAHUN 2023	13.000.000,00	-	13.000.000,00
	KOREKSI BPK MUTASI ASET TETAP TANAH EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD DARI BKAD KE INSPEKTORAT DI TAHUN 2023	-	362.556.000,00	- 362.556.000,00
	KOREKSI BPK MENCATAT PENYESUJIAN MUTASI ASET TETAP TANAH KANTOR KE KELURAHAN KEJURON KE BKAD DI TAHUN 2023	-	560.100.000,00	- 560.100.000,00
	KOREKSI BPK MENCATAT PENYESUJIAN MUTASI ASET TETAP TANAH SUMUR BOR JALAN MANGGA KE KELURAHAN KEJURON DI TAHUN 2023	-	3.500.000,00	- 3.500.000,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN PADA BKAD KURANG SAJI BEBAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI DI TAHUN 2023	-	31.585.604,00	- 31.585.604,00
		<b>555.822.938,95</b>	<b>8.713.903.294,00</b>	
			<b>- 8.158.080.355,05</b>	
<b>BAPENDA</b>	MENCATAT BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2023 (KHUSUS SKPD PENGHASIL)	934.025.511,57	-	934.025.511,57
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MOBIL DARI BAGIAN UMUM	398.037.500,00	-	398.037.500,00
	KOREKSI KARENA UBAH MASA MANFAAT AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TH 2022	42.871.250,00	-	42.871.250,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN PADA BAPENDA KURANG SAJI AKUMULASI KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI DI TAHUN 2023		39.679.969,00	- 39.679.969,00
		<b>1.374.934.261,57</b>	<b>39.679.969,00</b>	
			<b>1.335.254.292,57</b>	
<b>INSPEKTORAT</b>	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	17.920.760,00		17.920.760,00
	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	18.648.833,00		18.648.833,00
	MENCATAT PENYESUAIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNGDAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT ASET TETAP DI TAHUN 2023	215.707.100,00		215.707.100,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	4,00		4,00
	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP TANAH ATAS GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	362.556.000,00		362.556.000,00
		<b>614.832.697,00</b>	<b>-</b>	
			<b>614.832.697,00</b>	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>BAPPEDA</b>	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MOBIL INNOVA DARI BAGIAN UMUM	398.037.500,00		398.037.500,00
	MENCATAT KOREKSI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TH 2023	9,00		9,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN KARENA KURANGSAJI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		5.590.000,00	- 5.590.000,00
				-
		<b>398.037.509,00</b>	<b>5.590.000,00</b>	
			<b>392.447.509,00</b>	
<b>KARTOHARJO</b>	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DARI DLH KE BEBERAPA KELURAHAN DI KECAMATAN KARTOHARJO ANTARA LAIN KEL. ORO-ORO OMBO SEBESAR RP5.550.000,00 ; KEL. SUKOSARI SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. KLEGEN SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. REJOMULYO SEBESAR RP16.650.000,00 ; KEL. KANIGORO SEBESAR RP27.750.000,00 DAN KEL. SEBESAR RP11.100.000,00.	66.600.000,00	-	66.600.000,00
	MUTASI ANTAR OPD ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR BERUPA BALAI RT DAN RW KE 4 KELURAHAN TAHUN 2023	1.481.590.267,33	-	1.481.590.267,33
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI TAMBAH PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DI TAHUN 2023	-	13,00	- 13,00
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	78,00	-	78,00
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
				-
		<b>1.548.190.352,33</b>	<b>13,00</b>	
			<b>1.548.190.339,33</b>	
<b>MANGUHARJO</b>	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN DARI DLH SEBESAR RP38.850.000,00 DAN BAGIAN UMUM SEBESAR RP750.000,00 TAHUN 2023	31.080.000,00	-	31.080.000,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MENCATAT PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA 2	-	-	-
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR PADA TAHUN 2023	1.058.364.140,00	-	1.058.364.140,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	37,00	- 37,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	25,00	-	25,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	12,00	- 12,00
		<b>1.089.444.165,00</b>	<b>49,00</b>	
			<b>1.089.444.116,00</b>	
<b>TAMAN</b>	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DARI DLH KE KEL. TAMAN SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. PANDEAN SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. BANJAREJO SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. MANISREJO SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. KEJURON SEBESAR RP5.550.000,00 DAN KEL. JOSENAN SEBESAR RP10.650.000,00 KECAMATAN TAMAN TAHUN 2023	53.280.000,00	-	53.280.000,00
	MENCATAT MUTASI TAMBAHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR DI TAHUN 2023	2.209.414.704,00	-	2.209.414.704,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	7.610.454,00	- 7.610.454,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	4,00	- 4,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP TANAH KANTOR DARI BKAD KE KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN DI TAHUN 2023	563.600.000,00		563.600.000,00
		<b>2.826.294.711,00</b>	<b>7.610.461,00</b>	
			<b>2.818.684.250,00</b>	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
<b>BAKESBANGPOL</b>	KOREKSI PENAMBAHAN ASET DARI BELANJA BARANG DAN JASA KARENA TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2022	6.009.600,00	-	
	MENCATAT PENGAKUAN KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT TAHUN 2023	3.960.000,00	-	
		<b>9.969.600,00</b>	-	
			<b>9.969.600,00</b>	
<b>DINAS PERTANIAN &amp; KP</b>	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.760.000,00	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	4,00	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	6,00	-	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	
		<b>13,00</b>	<b>1.760.004,00</b>	
			- <b>1.759.991,00</b>	
<b>DINAS PERDAGANGAN</b>	MENCATAT MUTASI TAMBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KIOS KULINER BOGOWONTO SEBESAR RP253,092,000,00 DARI DPU TR DI TAHUN 2023	248.030.160,00	-	248.030.160,00
	KOREKSI AKUMULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2023	50,00	-	50,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUAIAN AKUMULASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.680.720,00	-	1.680.720,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUAIAN AKUMULASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	-	-
	KERINGANAN PIUTANG RETRIBUSI SEBESAR 60% DARI PIUTANG TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DI TAHUN 2023	-	1.232.920.040,00	- 1.232.920.040,00

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	PENYISIHAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	11.158.375,00	-	11.158.375,00
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2023	989.091.014,80	-	989.091.014,80
	KOREKSI BPK ATAS PENYESUIAN PENCATATAN ASET LAIN-LAIN PADA DINAS PERDAGANGAN KURANG SAJI AKUMULASI KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		1.049.661,00	
		<b>1.249.960.319,80</b>	<b>1.233.969.701,00</b>	
			<b>15.990.618,80</b>	
		19.365.467.270,65	39.670.823.861,45	- 18.867.180.668,80
<b>TOTAL</b>			<b>-20.305.356.590,80</b>	

#### 10.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>Ekuitas akhir</b>	<b>2.806.862.353.839,15</b>	<b>2.798.933.012.648,62</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.

## **INFORMASI NON KEUANGAN**

### **11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN**

#### **11.1.1 Keadaan Geografis**

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km<sup>2</sup> dan terletak pada koordinat 111<sup>0</sup> sampai 112<sup>0</sup> Bujur Timur dan 7<sup>0</sup> sampai 8<sup>0</sup> Lintang Selatan, yang secara administrative terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

#### **11.1.2 Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun

tahun 2022 mencapai 199.192 jiwa terdiri atas 97.370 penduduk laki-laki dan 101.822 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km<sup>2</sup> di Kota Madiun sebesar 5.994,34 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 41.753 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km<sup>2</sup>, sehingga kepadatannya 6.866,93 penduduk/km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 59.243 jiwa dan 54.387 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km<sup>2</sup> dan 10,73 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 5.900,70 dan 5.068,69 penduduk/ km<sup>2</sup>.

## **11.2 ORGANISASI**

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif

1. Walikota Madiun : Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd
2. Wakil Walikota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB

b. Pimpinan Legislatif

1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH
2. Wakil Ketua DPRD : Drs. Istono, M.Pd
3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman;

Pada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## 11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024

### 11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih  
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

### 11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang

ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Tabel 11.1  
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	
Pokok - Pokok Visi	Misi
<b>Bersih Berwibawa</b>	Misike- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )
	Misike- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
<b>Sejahtera</b>	Misike- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misike- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019 - 2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 11.2**  
**Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah**  
**Kota Madiun Tahun 2019-2024**

<b>No</b>	<b>Misi</b>	<b>Isu Strategis</b>
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi  Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Percepatan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi

### **11.3.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama**

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada Pelayanan Publik berbasis <i>smart cities</i>
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.2	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### 11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan**. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

### 11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1.3	: Meningkatnya Pemberdayaan Gender

### 5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif
Sasaran 1.1	: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Tujuan 2	: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat
Sasaran 2.1	: Pengurangan Kemiskinan
Sasaran 2.2	: Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat

## **PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, Pemerintah Kota Madiun telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Sesuai regulasi yang mendasarinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yang periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan keuangan guna pengambilan keputusan.

**Madiun,      Maret 2024**  
**WALI KOTA MADIUN**

**Dr.Drs.H.MAIDI, S.H., M.M., M.Pd**